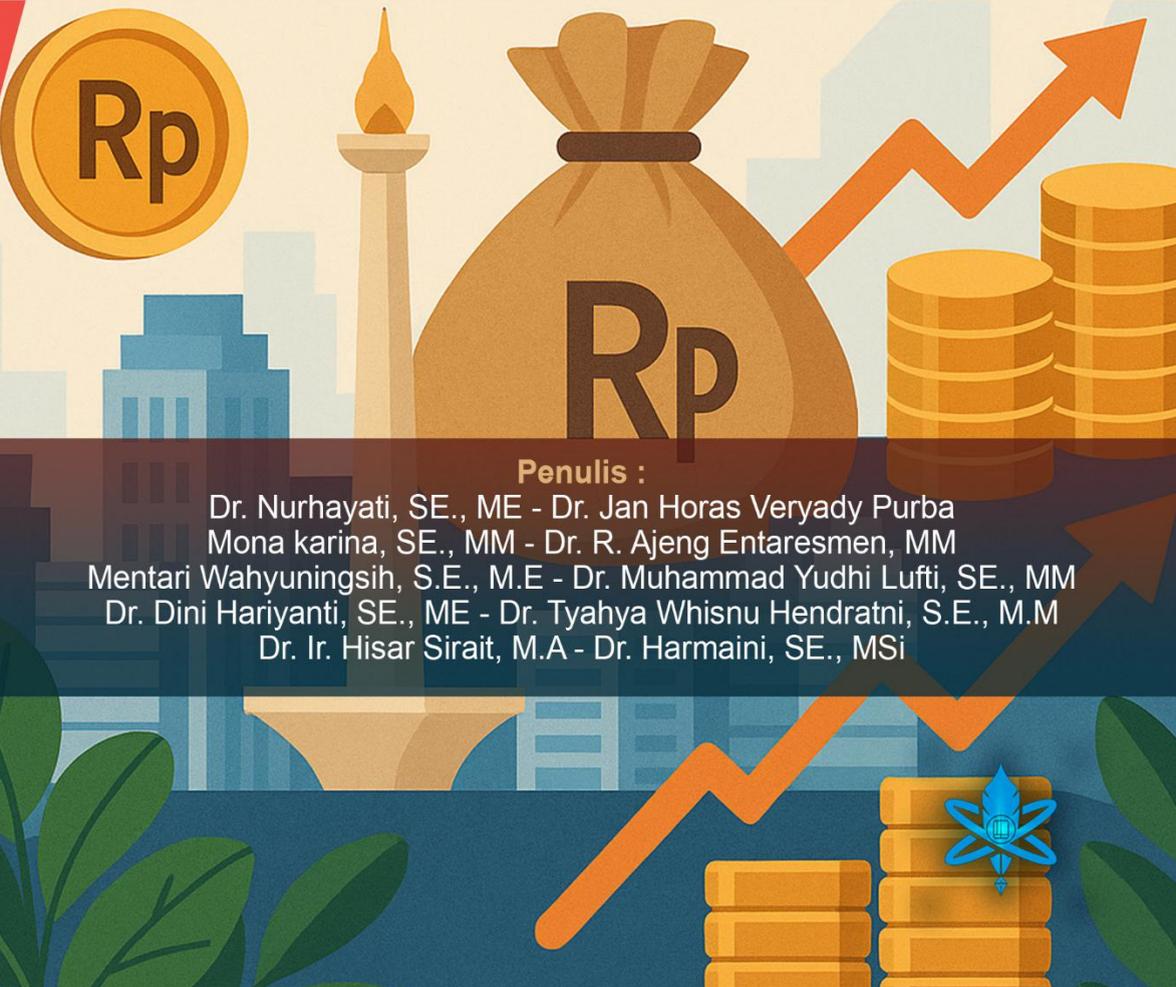


PEREKONOMIAN INDONESIA

Pengantar dan Isu Kontemporer
berbagai Sektor dalam Pertumbuhan
Pembangunan Ekonomi di Indonesia



Penulis :

Dr. Nurhayati, SE., ME - Dr. Jan Horas Veryady Purba
Mona karina, SE., MM - Dr. R. Ajeng Entaresmen, MM
Mentari Wahyuningsih, S.E., M.E - Dr. Muhammad Yudhi Lufti, SE., MM
Dr. Dini Hariyanti, SE., ME - Dr. Tyahya Whisnu Hendratni, S.E., M.M
Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A - Dr. Harmaini, SE., MSi

PEREKONOMIAN INDONESIA:

Pengantar dan Isu Kontemporer berbagai
Sektor dalam Pertumbuhan Pembangunan
Ekonomi di Indonesia

Penulis:

Dr. Nurhayati, SE., ME
Dr. Jan Horas Veryady Purba
Mona karina, SE., MM
Dr. R. Ajeng Entaresmen, MM
Mentari Wahyuningsih, S.E., M.E
Dr. Muhammad Yudhi Lufti, SE., MM
Dr. Dini Hariyanti, SE., ME
Dr. Tyahya Whisnu Hendratni, S.E., M.M
Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A
Dr. Harmaini, SE., MSi



PEREKONOMIAN INDONESIA:

Pengantar dan Isu Kontemporer berbagai Sektor dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Penulis :

Dr. Nurhayati, SE., ME, Dr. Jan Horas Veryady Purba, Mona karina, SE., MM, Dr. R. Ajeng Entaresmen, MM, Mentari Wahyuningsih, S.E., M.E, Dr. Muhammad Yudhi Lufti, SE., MM, Dr. Dini Hariyanti, SE., ME, Dr. Tyahya Whisnu Hendratni, S.E., M.M, Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A, Dr. Harmaini, SE., Msi

Editor :

Andra Juansa & Syifa Nurhaliza

Cover :

Deka Sugama

Penerbit : PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia

Email : ptstardigitalpublishing@gmail.com

Website : www.stardigitalpublishing.com

Anggota IKAPI : No. 202/DIY/2024

ISBN : 978-623-89945-6-4

Copyright © 2025 PT. Star Digital Publishing

Cetakan Pertama, Mei 2025

Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian maupun seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) di pidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai di maksud pada Ayat [1] di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul *Perekonomian Indonesia: Pengantar dan Isu Kontemporer Berbagai Sektor dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi di Indonesia* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku *Perekonomian Indonesia: Pengantar dan isu kontemporer berbagai sektor dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia* menyajikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Buku ini dimulai dengan pembahasan tentang sejarah perkembangan perekonomian Indonesia, yang mencakup era kolonial hingga masa reformasi ekonomi modern. Selanjutnya, konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, struktur, serta sistem perekonomian Indonesia dijelaskan secara mendalam, termasuk kebijakan-kebijakan ekonomi yang memainkan peran penting dalam pengembangan sektor-sektor utama.

Selain itu, buku ini mengulas isu-isu kontemporer yang terjadi di berbagai sektor strategis perekonomian Indonesia. Isu-isu tersebut meliputi sektor pertanian dan ketahanan pangan, sektor industri dan manufaktur, sektor keuangan dan perbankan, serta pentingnya peran UMKM dalam memajukan perekonomian nasional. Di bagian akhir, buku ini juga mengajak pembaca untuk memahami tantangan global yang mempengaruhi ekonomi Indonesia, seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan ketegangan geopolitik. Buku ini cocok untuk menjadi referensi akademik dan praktis bagi mereka yang ingin memahami perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami struktur dan perkembangan ekonomi Indonesia serta berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses pembangunan. Kami menyadari

bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan edisi selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Selamat membaca!

Jakarta, Mei 2025

Penulis

PEREKONOMIAN INDONESIA:

Pengantar dan Isu Kontemporer berbagai Sektor dalam
Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Bab	Penulis	Judul	Halaman
1	Dr. Nurhayati, SE., ME	Pengantar dan Sejarah perkembangan perekonomian Indonesia	1 - 15
2	Dr. Jan Horas Veryady Purba	Konsep Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia	16 - 37
3	Mona karina, SE., MM	Struktur Perekonomian Indonesia	38 - 45
4	Dr. R. Ajeng Entaresmen, MM	Sistem Perekonomian Indonesia	46 - 56
5	Mentari Wahyuningsih, S.E., M.E	Kebijakan Ekonomi Indonesia	57 - 72
6	Dr. Muhammad Yudhi Lufti, SE., MM	Isu-isu Kontemporer Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan	73 - 82
7	Dr. Dini Hariyanti, SE., ME	Isu-isu Kontemporer Sektor Industri dan Manufaktur	83 - 93
8	Dr. Tyahya Whisnu Hendratni, S.E., M.M	Isu-isu Kontemporer Sektor Keuangan dan Perbankan	94 - 103
9	Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A	Isu-isu Kontemporer Sektor UMKM	104 - 116
10	Dr. Harmaini, SE., MSi	Permasalahan dan Tantangan Global Ekonomi Indonesia	117 - 132

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENGANTAR DAN SEJARAH PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA.....	1
A. Karakteristik Perekonomian Indonesia	3
B. Sejarah Perkembangan Perekonomian di Indonesia.....	6
C. Transisi dan Tantangan.....	13
D. Penutup.....	14
BAB 2 KONSEP PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA	16
A. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.....	17
B. Teori Pertumbuhan Ekonomi	18
C. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	18
D. Model Solow-Swan dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	31
E. Indikator Pembangunan Ekonomi.....	33
F. Kesimpulan.....	36
BAB 3 STRUKTUR PEREKONOMIAN INDONESIA	38
A. Konsep Perekonomian.....	39
B. Sistem dan Konsep Perekonomian Indonesia	40
C. Struktur ekonomi Indonesia	41
D. Kesimpulan.....	45
BAB 4 SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.....	46
A. Pengertian Sistem Ekonomi	47
B. Macam-Macam Sistem Perekonomian.....	49
C. Sistem Ekonomi di Indonesia	54
BAB 5 KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA.....	57
A. Definisi & Tujuan Kebijakan Ekonomi	59
B. Sejarah Kebijakan Ekonomi di Indonesia	60

C. Kebijakan Ekonomi Makro.....	62
D. Kebijakan Ekonomi Sektor	66
E. Kebijakan Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan	69
BAB 6 ISU-ISU KONTEMPORER SEKTOR PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	73
A. Peran Strategis Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia.....	75
B. Tantangan Kontemporer Sektor Pertanian di Indonesia	77
C. Dinamika Ketahanan Pangan di Indonesia	79
D. Transformasi Kebijakan dan Inovasi dalam Sektor Pertanian di Indonesia.....	81
BAB 7 ISU-ISU KONTEMPORER SEKTOR INDUSTRI DAN MANUFAKTUR.....	83
A. Sejarah Perkembangan Industri.....	84
B. MANUFAKTUR: Konsep dan Konteks.....	86
C. Isu-Isu Kontemporer Industri dan Manufaktur	88
D. Strategi Industrialisasi.....	92
BAB 8 ISU-ISU KONTEMPORER SEKTOR KEUANGAN DAN PERBANKAN.....	94
A. Pendahuluan	95
B. Isu - Isu Kontemporer Sektor Keuangan.....	95
BAB 9 ISU-ISU KONTEMPORER SEKTOR UMKM	104
A. Digitalisasi: Tantangan Utama UMKM Indonesia	106
B. Landasan Konseptual dan Dimensi Transformasi Digital UMKM	108
C. Tahapan dan Gambaran Transformasi Digital UMKM	110
D. Kerangka Pengembangan Transformasi Digital UMKM	112
E. Kerangka Pengembangan Transformasi Digital UMKM	114
BAB 10 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN GLOBAL EKONOMI INDONESIA	117
A. Pendahuluan.....	118

B. Permasalahan Ekonomi Global Indonesia.....	118
C. Tantangan Ekonomi Global Indonesia.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	133
PROFIL PENULIS.....	146

BAB 1

**PENGANTAR DAN SEJARAH
PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN INDONESIA**

Memahami perekonomian Indonesia dari perspektif sejarah bukanlah sekadar melihat kejadian pada masa silam. Memahami ekonomi Indonesia juga merupakan upaya strategis untuk memahami fondasi-fondasi struktural yang membentuk dinamika ekonomi pada hari ini. Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah mengalami berbagai fase ekonomi yang kompleks. Dimulai dari sistem kolonial yang eksploitatif, transisi kemerdekaan yang penuh tantangan, hingga masa pembangunan dan liberalisasi di era modern. Menurut Boediono (2016), banyak masalah ekonomi kontemporer Indonesia yang sesungguhnya berakar dari kebijakan dan warisan masa lalu. Dengan menelusuri sejarah, kita dapat lebih memahami mengapa ketimpangan antardaerah tetap tinggi, mengapa struktur industri tidak sepenuhnya inklusif, serta bagaimana arah kebijakan makroekonomi ditentukan oleh pengalaman-pengalaman historis.

Bab ini bertujuan memberikan pengenalan menyeluruh tentang perkembangan ekonomi Indonesia, bermula dari zaman penjajahan hingga era reformasi. Beberapa ruang lingkup mencakup pergeseran sistem ekonomi, perubahan institusi, serta tantangan struktural yang muncul di setiap era. Mengacu pada Anne Booth (1998), salah satu kegagalan besar dalam sejarah ekonomi Indonesia adalah ketidakmampuan untuk memanfaatkan peluang secara optimal akibat struktur ekonomi yang timpang dan institusi yang lemah. Oleh karena itu, pemahaman sejarah tidak hanya menjadi alat refleksi, tetapi juga instrumen penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan ke depan.

Hubungan antara sejarah dan isu-isu kontemporer dalam pembangunan ekonomi sangat erat. Misalnya, sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) pada abad ke-19 mewariskan pola hubungan agraria yang timpang dan membentuk dasar dari struktur dualisme ekonomi yang masih terasa hingga saat ini. Demikian pula, pendekatan sentralistik pada masa Orde Baru menciptakan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, yang hingga kini menjadi tantangan dalam era desentralisasi. Sejarah juga menunjukkan bahwa setiap

krisis ekonomi di Indonesia yang selalu melahirkan reformasi kebijakan dan pergeseran paradigma pembangunan.

Dengan memahami kontinuitas dan perubahan pada ekonomi Indonesia, kita dapat mengembangkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya responsif terhadap isu kontemporer, tetapi juga sadar konteks sejarah yang melingkupinya.



Gambar 1.1 Perekonomian Indonesia

A. Karakteristik Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia memiliki karakteristik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, demografis, dan kekayaan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam integrasi ekonomi antarwilayah. Boediono (2016) menekankan bahwa kondisi geografis ini memengaruhi penyebaran infrastruktur dan akses pasar. Hal ini mengakibatkan struktur perekonomian yang tidak merata antar daerah. Masih terdapat banyak daerah, terutama daerah-daerah terpencil, yang tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk kebutuhan

utama seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, serta penunjang kebutuhan lainnya yang memengaruhi perekonomian.

Demografi Indonesia yang saat ini telah didominasi oleh kelompok usia produktif memberikan potensi besar bagi pembangunan ekonomi. Namun seperti keadaan yang saat ini tengah terjadi, diperlukan penciptaan lapangan kerja yang luas dan berkualitas. Tingginya tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka pengangguran Indonesia pada tahun ini merupakan masalah yang amat serius dan harus segera ditangani oleh pemerintah. Hal ini sangat memengaruhi perekonomian Indonesia dalam skala yang sangat besar.

Sementara itu, kekayaan sumber daya alam Indonesia, terutama hasil tambang, kehutanan, dan pertanian, merupakan aset terbesar Indonesia untuk ekspor komoditas primer (Booth, 1998). Hingga saat ini pun, sebagian besar produk ekspor Indonesia adalah hasil dari sumber daya alam. Ketergantungan terhadap komoditas primer ini menjadikan perekonomian Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Meskipun demikian, sektor ini tetap menjadi tulang punggung pendapatan negara. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Karakteristik penting lainnya dari perekonomian Indonesia adalah dominasi sektor informal dan peran besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam banyak hal, UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sektor UMKM telah menyerap sekitar 97% tenaga kerja dan menyumbangkan lebih dari 60% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional. Dalam penelitiannya, Munthe et al. (2023) menyatakan bahwa UMKM dianggap sebagai sektor yang sangat resilien terhadap krisis dan menjadi penopang ekonomi rakyat, terutama di masa pandemi maupun dalam situasi ketidakpastian global. Namun, UMKM masih menghadapi hambatan serius dalam akses pembiayaan, teknologi, dan pasar yang kompetitif. Ketergantungan terhadap sektor ini

mencerminkan struktur ekonomi yang masih didominasi oleh aktivitas berskala kecil dan informal, dengan produktivitas yang relatif rendah jika dibandingkan dengan sektor formal dan perusahaan besar.

Karakteristik perekonomian di Indonesia yang tidak dapat dilupakan adalah adanya dualisme ekonomi. Dualisme ekonomi adalah istilah koeksistensi antara sektor ekonomi modern dan tradisional. Anne Booth (1998) mencatat bahwa dualisme ekonomi merupakan warisan panjang dari masa kolonial dan belum terselesaikan secara struktural. Di satu sisi, Indonesia memiliki kawasan industri, perusahaan multinasional, dan sistem keuangan yang modern. Namun di sisi lain, sebagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung pada pertanian subsisten, perdagangan informal, dan pekerjaan tidak tetap.

Boediono (2016) menambahkan bahwa dualisme ekonomi sering menghasilkan ketimpangan dalam produktivitas dan pendapatan, serta menciptakan segregasi sosial dan spasial yang cukup dalam. Fenomena ini tidak hanya menantang dari segi ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi politik dan sosial yang perlu ditangani secara berkelanjutan. Pemerintah telah mencoba berbagai strategi untuk mengatasi kesenjangan ini, dimulai dengan pembangunan infrastruktur, hingga program pemberdayaan ekonomi desa. Meski begitu, hasil yang didapatkan belum dirasakan secara merata. Hal ini dikarenakan oleh implementasi kebijakan yang sering kali terhambat oleh birokrasi dan ketidaksesuaian program dengan kebutuhan lokal. Oleh sebab itu, pendekatan yang lebih matang dan partisipatif sangat dibutuhkan agar dualisme ekonomi dapat diminimalkan secara efektif.

Apabila kita melihat dari sisi kontemporer, tantangan struktural perekonomian Indonesia semakin kompleks dengan hadirnya digitalisasi yang amat pesat. Menurut Zirzis (2024) dalam Jurnal Literasi Indonesia, Generasi Z (Gen Z) telah menjadi aktor penting dalam mendorong perubahan pola konsumsi, memperluas ekonomi digital, dan menciptakan *gig economy* yang fleksibel. Namun,

transformasi digital turut memperlihatkan kesenjangan digital antardaerah, keterbatasan literasi teknologi, dan belum meratanya regulasi yang melindungi pelaku ekonomi digital informal. Tantangan lainnya dapat dilihat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, serta rendahnya kapasitas riset dan inovasi dalam mendorong industri bernilai tambah. Oleh karena itu, meskipun perekonomian Indonesia menunjukkan dinamika yang adaptif, struktur dasarnya tetap menghadapi persoalan laten yang perlu diselesaikan melalui pendekatan inklusif dan berorientasi jangka panjang.

B. Sejarah Perkembangan Perekonomian di Indonesia

Sejarah perekonomian Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dan kompleks yang dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan global. Perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari latar belakang kolonialisme yang membentuk struktur ekonomi awal, hingga transformasi besar yang terjadi pasca kemerdekaan. Setiap periode dalam sejarah membawa kebijakan, tantangan, dan pendekatan berbeda dalam mengelola sumber daya serta menata sistem ekonomi nasional. Untuk memahami arah dan wajah perekonomian Indonesia saat ini, penting untuk menelusuri evolusinya dari Masa Kolonial (Hindia Belanda), Masa Kemerdekaan Awal (1945–1959), Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), Masa Orde Baru (1966–1998), hingga Era Reformasi (1998–sekarang).

Masa Kolonial (Hindia Belanda)

Pada masa penjajahan Hindia Belanda, struktur perekonomian Indonesia dibentuk secara sistematis untuk melayani kepentingan pemerintah kolonial. Salah satu kebijakan ekonomi paling menonjol dan berdampak luas adalah *Cultuurstelsel* atau sistem tanam paksa yang diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan penduduk pribumi, khususnya di Pulau Jawa, untuk menyisihkan sebagian lahan

pertaniannya sekitar 20% untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, yang hasilnya dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga tetap. Kebijakan ini menciptakan keuntungan besar bagi Belanda, tetapi dilakukan melalui eksploitasi tenaga dan lahan petani lokal, yang menyebabkan penderitaan, kelaparan, dan meningkatnya angka kematian (Purba et al., 2024).

Menurut Anne Booth (1998), sistem tanam paksa menjadi salah satu penyebab utama terbentuknya struktur ekonomi kolonial yang ekstraktif dan tidak berkelanjutan. Perekonomian pada masa tersebut dirancang untuk menghasilkan surplus sebesar-besarnya demi kepentingan metropolitan Belanda. Pendapatan negara kolonial dari hasil ekspor komoditas seperti kopi dan gula akan disalurkan ke dalam kas Belanda dan menjadi pilar penting dalam pemulihan fiskal negara setelah masa peperangan di Eropa. Hal ini menyebabkan stagnasi dalam pembangunan ekonomi domestik Indonesia. Sistem tanam paksa ini tidak menyisakan investasi yang berarti dalam pendidikan, infrastruktur lokal, atau pengembangan industri di luar sektor perkebunan bagi masyarakat pribumi.

Warisan ekonomi kolonial ini meninggalkan struktur yang dangat tidak inklusif. Ketimpangan antara daerah penghasil komoditas dan pusat-pusat administrasi kolonial menciptakan pola pertumbuhan yang tidak merata. Selain itu, sistem birokrasi kolonial mengedepankan efisiensi fiskal dibandingkan pembangunan sosial bagi masyarakat. Keberhasilan ekonomi kolonial dinilai dari besarnya pendapatan yang dikirim ke Belanda, bukan dari seberapa besar kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia (Booth, 1998). Dampak jangka panjang dari sistem ini masih terasa hingga kini. Hal tersebut dapat dilihat dari konsentrasi lahan, keterbelakangan daerah pedesaan, serta ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Oleh karena itu, memahami sistem tanam paksa bukan hanya kenangan sejarah, melainkan bagaimana kita menelaah akar sejarah dari persoalan ekonomi struktural di Indonesia pada masa itu yang berimbas pada masa kini.

Masa Kemerdekaan Awal (1945-1959)

Masa awal kemerdekaan Indonesia merupakan periode transisi yang penuh dengan tantangan ekonomi. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mewarisi sistem ekonomi kolonial yang eksploitatif tanpa infrastruktur kelembagaan yang memadai. Boediono (2016) menuliskan bahwa struktur ekonomi pada masa itu sangatlah rapuh. Kegiatan produksi pertanian terganggu akibat perang, distribusi barang tidak lancar, hingga sistem keuangan belum terbentuk secara fungsional. Nasionalisasi aset-aset Belanda, terutama setelah Agresi Militer II, serta pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, menjadi langkah penting untuk mengembalikan kendali atas alat-alat produksi. Namun, nasionalisasi ini tidak serta-merta diiringi dengan kesiapan manajerial dan sistem ekonomi nasional yang solid. Hal ini menyebabkan banyak aset yang kemudian kurang produktif dan tidak efisien.

Kebijakan ekonomi nasional pertama yang dijalankan pasca-kemerdekaan antara lain melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956–1960. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat peran negara dalam pembangunan ekonomi. Namun, realisasinya terkendala oleh berbagai faktor seperti konflik politik, pergolakan daerah, serta lemahnya kapasitas fiskal dan administrasi negara. Anne Booth (1998) turut memperhatikan bahwa pada masa-masa tersebut, pemerintah sangat bergantung pada pembiayaan defisit dan pencetakan uang. Hal ini menyebabkan hiperinflasi. Hiperinflasi yang mencapai tingkat yang sangat tinggi pada akhir 1950-an mengikis daya beli masyarakat hingga menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Situasi ini diperparah oleh terputusnya jalur perdagangan internasional akibat embargo Belanda serta kurangnya investasi asing yang masuk, karena situasi politik domestik yang tidak stabil.

Fakta menarik dari periode ini adalah bagaimana semangat anti-kolonial yang begitu kuat pada masyarakat. Hal ini memengaruhi terbentuknya kebijakan ekonomi secara ideologis. Terdapat berbagai kebijakan ekonomi pada masa tersebut yang didasari semangat

sosialisme dan kemandirian nasional. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut sering tidak disertai dengan perhitungan teknokratis yang matang. Pembangunan ekonomi pada masa ini lebih banyak diarahkan oleh retorika politik dibandingkan dengan data empiris atau pendekatan ekonometrik. Hal ini dapat dimengerti mengingat prioritas utama saat itu adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan negara yang baru lahir. Meski belum menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, periode ini menjadi fondasi awal penting yang memunculkan gagasan tentang peran negara dalam ekonomi dan perlunya sistem ekonomi nasional yang tidak hanya lepas dari cengkeraman kolonial, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara luas (Boediono, 2016).

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Demokrasi Terpimpin tidak terlepas dari era pemerintahan Presiden Soekarno yang menerapkan pendekatan ekonomi sentralisasi. Negara mengambil alih sebagian besar kendali atas kegiatan ekonomi, termasuk perbankan, perdagangan luar negeri, serta distribusi hasil produksi. Menurut Booth (1998), intervensi negara yang berlebihan pada masa tersebut menyebabkan distorsi dalam mekanisme pasar dan efisiensi ekonomi. Pemerintah juga menjalankan berbagai proyek mercusuar yang amat ambisius, seperti pembangunan Monumen Nasional dan Gelora Bung Karno. Proyek-proyek tersebut telah memakan biaya yang amat besar di tengah lemahnya fondasi ekonomi. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya memperkuat identitas nasional melalui simbol-simbol pembangunan, namun tidak selalu berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Ketimpangan antara kebijakan simbolik dan kondisi ekonomi rakyat semakin memburuk akibat krisis fiskal dan ketergantungan pada utang luar negeri. Pada saat yang sama, hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, mulai menegang akibat pergeseran ideologis ke arah kiri. Pada masa tersebut, Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini berakibat pada ketergantungan yang besar pada impor

beras dan gandum dari Amerika Serikat melalui program bantuan pangan (PL-480). Ketergantungan ini mengakibatkan sektor pertanian dalam negeri tidak berkembang secara mandiri. Sementara itu, ketegangan politik domestik dan internasional turut memperburuk stabilitas ekonomi nasional (Amalia, 2018).

Ketidakseimbangan struktural semakin terlihat jelas menjelang akhir era ini. Hal ini amat terlihat, terutama dalam bentuk inflasi yang sangat tinggi. Menurut Booth (1998), tingkat inflasi pada tahun 1965 mencapai lebih dari 600%. Hal ini berdampak pada rusaknya nilai tukar rupiah dan melemahnya daya beli masyarakat secara drastis. Produksi industri dan pertanian turut menurun akibat kelangkaan bahan baku dan suku cadang yang diimpor. Kontrol harga yang diberlakukan oleh pemerintah gagal menstabilkan pasar dan justru mendorong praktik pasar gelap. Kombinasi antara kontrol negara yang ketat, lemahnya kapasitas fiskal, dan krisis politik menyebabkan ekonomi Indonesia nyaris kolaps pada akhir periode Demokrasi Terpimpin.

Masa Orde Baru (1966-1998)

Setelah runtuhnya Demokrasi Terpimpin, pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto berhasil menciptakan stabilitas politik dan makroekonomi. Fokus utama kebijakan ekonomi pada era ini diarahkan pada pengendalian inflasi, rehabilitasi sektor pertanian, dan penataan kembali anggaran negara. Boediono (2016) menilai keberhasilan awal Orde Baru sebagai titik balik penting yang membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan memasuki era pertumbuhan tinggi. Investasi asing mulai masuk, nilai tukar rupiah stabil, dan inflasi berhasil ditekan dari ratusan persen menjadi satu digit. Stabilitas ini menjadi fondasi bagi pembangunan jangka panjang melalui program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Salah satu kekuatan utama Orde Baru adalah peran para teknokrat dalam perumusan kebijakan ekonomi. Mereka adalah ekonom profesional yang memegang teguh prinsip-prinsip ekonomi pasar, namun tetap bekerja dalam kerangka negara yang kuat. Selama dua

dekade, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 6-7% per tahun. Tingkat kemiskinan pun turut menurun drastis. Pemerintah juga mendorong liberalisasi perdagangan, reformasi sektor keuangan, dan diversifikasi ekspor. Namun di balik pertumbuhan tersebut, muncul ketergantungan yang tinggi terhadap utang luar negeri dan penanaman modal asing (Shaleha et al., 2024).

Ketika krisis moneter Asia melanda pada tahun 1997, fondasi ekonomi yang dibangun selama Orde Baru menjadi rapuh. Nilai tukar rupiah anjlok sangat tajam dari Rp2.400 menjadi lebih dari Rp15.000 per dolar AS dalam hitungan bulan. Krisis ini memicu kehancuran sektor perbankan dan korporasi, lonjakan inflasi, dan gelombang PHK besar-besaran. Ketimpangan sosial dan praktik ekonomi yang tidak transparan turut memperparah dampak krisis. Krisis pada masa tersebut tidak hanya mengguncang ekonomi nasional, tetapi juga menjadi titik balik politik yang akhirnya menjatuhkan rezim Orde Baru pada Mei 1998 (Boediono, 2016).

Era Reformasi (1998-sekarang)

Pasca runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki babak baru dalam pembangunan ekonomi melalui era Reformasi. Era reformasi ditandai dengan desentralisasi fiskal dan demokratisasi ekonomi. Pemerintah pusat mulai mendistribusikan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2001. Boediono (2016) menyebutkan bahwa langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai wilayah dan mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal. Namun dalam praktiknya, desentralisasi ini juga menghadirkan tantangan berupa disparitas kapasitas fiskal antar daerah serta potensi korupsi di tingkat lokal. Meskipun demikian, kebijakan ini menjadi fondasi penting bagi partisipasi publik dan kontrol sosial dalam perencanaan pembangunan ekonomi.

Arah kebijakan ekonomi Indonesia semakin terbuka terhadap integrasi global. Pemerintah mendorong liberalisasi perdagangan, meningkatkan investasi asing, dan bergabung dalam berbagai

kerjasama ekonomi internasional seperti AFTA dan MEA. Reformasi struktural di sektor keuangan, perbankan, dan investasi telah memperkuat daya tarik Indonesia di mata investor global. Namun, hal ini juga menuntut kesiapan pelaku ekonomi domestik untuk bersaing di pasar bebas. Seperti diungkap oleh Mihradi & Siregar (2017), pemberlakuan MEA mengharuskan Indonesia untuk tidak hanya memperkuat perlindungan buruh migran, tetapi juga menyiapkan mereka menjadi pelaku usaha yang kompeten agar tidak sekadar menjadi buruh di era persaingan regional.

Salah satu isu penting yang terus dihadapi dalam era Reformasi adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi. Meskipun pertumbuhan ekonomi secara makro cenderung stabil, ketimpangan pendapatan antara wilayah urban dan rural masih sangat mencolok. Daya saing Indonesia masih terkendala oleh kualitas pendidikan, birokrasi yang belum efisien, serta lemahnya inovasi di sektor industri (Boediono, 2016). Ketidakmerataan pembangunan ini turut memperkuat jurang kesejahteraan antar daerah dan memperlambat proses pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, UMKM tetap menjadi sektor penyerap tenaga kerja utama dan penopang ekonomi rakyat. Menurut Munthe et al. (2023), peran UMKM menjadi semakin penting dalam mendorong pertumbuhan inklusif, namun dukungan pembiayaan, digitalisasi, dan akses pasar masih menjadi hambatan struktural. Tidak sedikit pelaku UMKM yang juga menghadapi keterbatasan dalam hal literasi keuangan dan manajemen usaha yang berdampak pada keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang lebih terarah dan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk memperkuat daya saing UMKM.

Selain UMKM, eksistensi pasar tradisional juga menjadi sorotan penting dalam menghadapi ekspansi pasar modern dan ritel dalam skala besar. Pasar tradisional mengalami tekanan yang amat berat akibat masuknya pasar modern yang lebih sistematis, bersih, dan didukung oleh modal besar. Namun, pasar tradisional tetap memiliki

nilai strategis yang berbasis komunitas dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus mampu mengintegrasikan sektor informal, usaha kecil, dan pasar rakyat ke dalam strategi nasional. Reformasi ekonomi di era ini tidak hanya bertumpu pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan pelaku ekonomi lokal sebagai aktor utama dalam pembangunan jangka panjang (Dakhoir, 2018).

C. Transisi dan Tantangan

Perekonomian Indonesia saat ini berada dalam fase transformasi struktural yang signifikan. Hal ini ditandai dengan pergeseran dari dominasi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Sektor pertanian, yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi nasional, perlahan tergeser oleh pertumbuhan industri pengolahan dan sektor jasa, termasuk keuangan, teknologi informasi, dan logistik. Transformasi seperti ini sudah mulai terjadi sejak masa Orde Baru, namun baru menunjukkan dampak nyata dalam dua dekade terakhir (Booth, 1998). Meskipun transformasi ini mencerminkan kemajuan modernisasi ekonomi, tantangan terletak pada kesenjangan produktivitas antarsektor serta peningkatan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan sektor baru. Boediono (2016) turut menegaskan bahwa kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasi harus menjadi prioritas utama agar transformasi ini berdampak positif secara inklusif.

Namun demikian, ketimpangan wilayah dan tingkat urbanisasi yang tinggi masih menjadi persoalan besar dalam struktur ekonomi di Indonesia. Perkembangan pesat di wilayah perkotaan tidak selalu diimbangi dengan kemajuan di wilayah perdesaan dengan tertinggalnya infrastruktur, akses pendidikan, dan layanan dasar. Boediono (2016) menyebut fenomena ini sebagai bentuk "*pertumbuhan tidak merata*", yang menciptakan tekanan sosial dan migrasi besar-besaran ke kota-kota besar. Di tengah ketimpangan

tersebut, UMKM masih menjadi tumpuan ekonomi rakyat di daerah. Namun, UMKM masih membutuhkan dukungan lebih besar dalam hal digitalisasi dan pembiayaan dalam memperkuat peran ekonominya secara nasional. Ketimpangan yang dibiarkan tidak hanya akan memperlebar kesenjangan sosial, tetapi juga menghambat produktivitas nasional secara keseluruhan (Munthe et al, 2023).

Pembangunan berkelanjutan menjadi tantangan kontemporer yang tidak dapat diabaikan pada masa digitalisasi seperti saat ini. Pertumbuhan ekonomi tidak lagi cukup hanya dihitung dari angka PDB, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, kualitas hidup, dan keadilan sosial. Zirzis (2024) menyoroti bagaimana Generasi Z mulai memainkan peran penting dalam ekonomi digital dan kewirausahaan sosial. Generasi Z dinilai mampu menciptakan ruang ekonomi baru yang lebih adaptif dan berbasis teknologi.

Namun, perubahan cepat ini juga membawa tantangan berupa disrupsi tenaga kerja konvensional, perlunya literasi digital merata, serta kebijakan yang responsif terhadap ekonomi kreatif dan hijau. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun sistem ekonomi yang tidak hanya mampu bersaing secara global, tetapi juga tangguh menghadapi krisis, inklusif terhadap kelompok rentan, dan ramah terhadap keberlanjutan jangka panjang.

D. Penutup

Sejarah perkembangan perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional dibentuk oleh berbagai dinamika yang sangat kompleks. Setiap periode pemerintahan menyisakan tantangan struktural dan meninggalkan warisan kebijakan yang masih terasa dampaknya hingga hari ini. Transformasi dari ekonomi berbasis sektor primer menuju sektor tersier tidak hanya membawa peluang besar, tetapi juga memperlihatkan kelemahan mendasar dalam pemerataan pembangunan, kualitas SDM, dan kapasitas kelembagaan negara. Kesadaran historis sangatlah penting untuk

menentukan kebijakan yang tepat agar kita tidak mengulang pola kegagalan masa lalu dan berangkat dari pembelajaran yang komprehensif.

Di tengah transformasi global dan disrupsi teknologi, perekonomian Indonesia kini menghadapi tekanan baru. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus mengalami penurunan mencerminkan melemahnya kepercayaan investor terhadap stabilitas makroekonomi nasional. Pada saat yang sama, belanja negara belum sepenuhnya memprioritaskan sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan. Padahal kedua sektor ini sangat krusial dalam membangun daya saing jangka panjang. Ketimpangan antarwilayah, produktivitas UMKM yang masih rendah, dan stagnasi pertumbuhan sektor informal menjadi cerminan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Ditambah lagi, ketidakpastian global, konflik geopolitik, dan krisis iklim yang semakin mempertegas perlunya pendekatan ekonomi yang tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan agenda reformasi struktural yang menyeluruh dan konsisten. Pemerintah perlu mengalihkan fokus dari kebijakan simbolik dan jangka pendek ke pembangunan institusi yang kuat, meritokratis, dan berorientasi pada pelayanan publik. Peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, digitalisasi UMKM, serta penguatan ekonomi berbasis komunitas lokal harus menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan ke depan. Selain itu, peran generasi muda dan ekonomi digital perlu diintegrasikan dalam strategi nasional, bukan sekadar pelengkap, tetapi sebagai motor penggerak ekonomi masa depan. Dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai poros utama pembangunan, Indonesia tidak hanya akan bertahan dalam arus globalisasi, tetapi juga mampu tampil sebagai negara dengan ekonomi yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

BAB 2

**KONSEP PERTUMBUHAN
DAN PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA**

Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berkat sumber daya alam yang melimpah, letak geografis strategis, serta jumlah penduduk yang besar. Namun, tantangan seperti kesenjangan sosial, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, dan perlunya kebijakan yang mendorong pertumbuhan inklusif tetap menjadi isu utama. Memahami konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menjadi kunci bagi pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan yang merata. Pertumbuhan ekonomi seringkali diukur dari peningkatan output nasional, tetapi pembangunan ekonomi yang lebih luas mencakup pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada ekspansi ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi manfaat yang lebih adil demi transformasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

A. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output per kapita dalam jangka panjang. Hal ini mencerminkan ekspansi kapasitas suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa melalui investasi, inovasi, dan perubahan struktural. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi diukur dalam periode panjang. Menurut Kuznets (1971), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, reformasi kelembagaan, dan perubahan ideologi, sementara Sadono Sukirno (2006) melihatnya sebagai ekspansi ekonomi yang meningkatkan produksi. Todaro & Smith (2020) mendefinisikannya sebagai peningkatan kapasitas produktif, yang mendorong pertumbuhan output dan pendapatan nasional lebih besar.

Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesetaraan pendapatan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat, pembangunan ekonomi memastikan pertumbuhan inklusif yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi dapat dikategorikan dalam tiga pendekatan utama:

1. **Teori Klasik (Adam Smith & David Ricardo)** menekankan mekanisme pasar bebas, spesialisasi, dan akumulasi modal sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Smith berargumen bahwa pembagian kerja meningkatkan produktivitas, sementara Ricardo memperkenalkan konsep diminishing returns, dimana pertumbuhan dapat melambat jika pemanfaatan sumber daya tidak efisien. Teori ini kurang mempertimbangkan teknologi sebagai faktor utama dalam pertumbuhan jangka panjang.
2. **Teori Neoklasik (Solow-Swan)** memperbaiki kelemahan teori klasik dengan memasukkan kemajuan teknologi sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Akumulasi modal memiliki dampak terbatas karena diminishing returns, sehingga kemajuan teknologi menjadi kunci bagi pertumbuhan berkelanjutan. Model ini juga memperkenalkan *steady-state growth*, di mana ekonomi tumbuh stabil melalui kombinasi optimal antara tabungan, investasi, dan teknologi. Teknologi adalah eksogen, yang tidak dapat dikendalikan melalui kebijakan.
3. **Teori Pertumbuhan Endogen (Paul Romer & Robert Lucas)** berargumen bahwa kemajuan teknologi dan inovasi berasal dari dalam sistem ekonomi, bukan faktor eksternal. Investasi dalam riset dan pengembangan (R&D), pendidikan, serta modal manusia menjadi pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. Model ini menekankan bahwa kebijakan pemerintah berperan dalam menciptakan ekosistem inovasi, sehingga pertumbuhan dapat dipacu secara internal tanpa bergantung pada faktor luar.

C. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

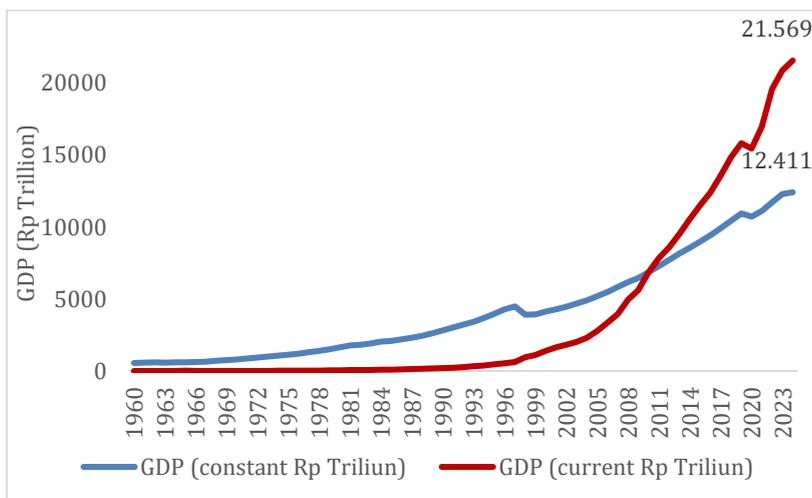
Dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang (1960-2024), dapat dilihat dari tiga aspek penting berikut: Produk Domestik Bruto, Pendapatan per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi.

1. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)* adalah ukuran total nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Dalam analisis ekonomi, PDB dapat dihitung dalam harga berlaku (*current price*), yang mencerminkan nilai ekonomi berdasarkan harga pasar saat ini, serta harga konstan (*constant price*), yang menyesuaikan efek inflasi untuk memberikan gambaran pertumbuhan riil tanpa distorsi harga. *Real GDP*, dihitung dengan formula berikut.

$$\text{Real GDP (Constant)} = \frac{\text{GDP (Current Price)}}{\text{GDP Deflator}} \times 100$$

Berikut ini disajikan PDB Indonesia, baik *Current Price* maupun *Constant Price*, tahun 1960 hingga 2024, dengan tahun dasar 2010.



Sumber: World Bank, 2025, Bank Indonesia, 2025

Gambar 2.1. GDP Nominal dan PDB Riil Indonesia tahun 1960 – 2024

a. Masa Awal (1960-an) – Fondasi Ekonomi Nascent

Pada awal 1960-an, perekonomian Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam, dengan infrastruktur terbatas serta tingkat industrialisasi yang rendah. PDB Indonesia saat itu berada di angka Rp 0,39 triliun, mencerminkan tantangan ekonomi pasca-kemerdekaan. Namun, pada 1964, pertumbuhan ekonomi meningkat pesat dengan PDB mencapai Rp 7,13 triliun, didorong oleh kebijakan penguatan sektor produksi dan perdagangan, meski tetap menghadapi ketidakstabilan politik, inflasi tinggi, dan ketimpangan pembangunan.

b. Krisis Ekonomi 1965-1966 dan Transisi Menuju Orde Baru

Pada 1965–1966, Indonesia mengalami krisis ekonomi parah akibat ketidakstabilan politik, defisit anggaran, dan ketidakseimbangan perdagangan, yang menyebabkan hiperinflasi hingga 600% serta merosotnya daya beli masyarakat. Pencetakan uang tanpa dukungan produksi semakin memperburuk situasi. Untuk mengatasi krisis, pemerintah menerapkan kebijakan Sanering 1966, mengkonversi Rp 1.000 menjadi Rp 1 guna memulihkan stabilitas moneter, meskipun berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Di sisi lain, GDP harga berlaku meningkat tajam menjadi Rp 23,71 triliun, tetapi tidak mencerminkan pertumbuhan riil akibat inflasi yang sangat tinggi.

c. Era Orde Baru: Era Transisi dan Era Pertumbuhan Pesat

Pada 1966–1969, Indonesia mengalami transisi pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, yang menandai awal Orde Baru dan fokus pada stabilisasi ekonomi. Langkah-langkah seperti pengendalian inflasi, reformasi fiskal, dan peningkatan investasi asing membantu menciptakan fondasi ekonomi yang lebih stabil. PDB Indonesia yang masih tertekan oleh krisis pada 1966 (Rp 0,3159 triliun) mulai menunjukkan pemulihan pada 1967, dengan pertumbuhan yang lebih stabil. Pada 1968, PDB melonjak menjadi Rp 2,097 triliun, didorong oleh

kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur serta penguatan sektor pertanian dan industri. Pemerintah juga mulai memprioritaskan pembangunan infrastruktur, sebagai persiapan untuk Pelita I (1969). Pada era Orde Baru (1969–1998), Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi pesat melalui industrialisasi, ekspor, dan stabilisasi ekonomi. Pelita I dan II, berfokus pada pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian, mendorong PDB naik 12 kali lipat, dari Rp 2,718 triliun pada 1969 menjadi Rp 32,025 triliun pada 1979. Dekade 1980-an diwarnai oleh boom minyak, yang meningkatkan pendapatan negara. Pada 1991–1997, pemerintah memperkuat sektor manufaktur dan ekspor non-migas, mempertahankan pertumbuhan sekitar 7% per tahun, serta menciptakan fondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan dalam menghadapi dinamika global.

d. Krisis Keuangan Asia 1997-1998 dan Dampaknya

Selama Krisis Keuangan Asia 1997–1998, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang tajam akibat depresiasi rupiah dari Rp 2.600 per USD pada 1997 menjadi lebih dari Rp 16.000 per USD pada 1998, yang menyebabkan PDB berkontraksi hingga -13,1%. Krisis diperburuk oleh lonjakan inflasi, kredit macet dalam sistem perbankan, dan ketidakstabilan politik yang menurunkan kepercayaan pasar. Namun, reformasi ekonomi yang dilakukan, termasuk transparansi fiskal, dan stabilisasi moneter, membantu pemulihan. Setelah pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998, Presiden B.J. Habibie memimpin pemulihan ekonomi, dengan PDB mencapai Rp 1.099,73 triliun pada 1999, menandai langkah awal stabilisasi ekonomi pasca-krisis.

e. Pemulihan Pasca Krisis dan Era Globalisasi

Pada periode 1999–2004, Indonesia berupaya memulihkan ekonomi pasca-krisis 1997–1998 di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden Megawati Soekarnoputri. Di era Gus Dur (1999–2001), pemerintah fokus pada reformasi ekonomi, termasuk restrukturisasi perbankan dan peningkatan transparansi fiskal, meskipun ketidakstabilan

politik menyebabkan pertumbuhan ekonomi kurang optimal. PDB Indonesia meningkat dari Rp 1.099,73 triliun pada 1999 menjadi Rp 1.646,32 triliun pada 2001.

Dibawah kepemimpinan Megawati (2001–2004), pertumbuhan ekonomi lebih stabil dengan fokus pada pemulihan sektor perbankan, investasi, dan stabilisasi fiskal. Rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 4–5% per tahun, dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN dan pembangunan infrastruktur guna menarik investasi asing. PDB meningkat menjadi Rp 2.295,82 triliun pada 2004, menandai peningkatan stabilitas ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

f. Perkembangan PDB Indonesia pada Era SBY

Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004–2014, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi stabil dengan rata-rata PDB tumbuh 5,78% per tahun, meningkat dari Rp 2.295,83 triliun pada 2004 menjadi Rp 10.569,71 triliun pada 2014. Pemerintahannya berfokus pada stabilisasi ekonomi, penguatan sektor industri, dan peningkatan investasi asing, yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti deindustrialisasi terlihat dari penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, dari 28% pada 2004 menjadi 23,5% pada 2013, menunjukkan pergeseran ke sektor jasa dan konsumsi.

g. Krisis Global 2008-2009 dan Dampak Jangka Pendek

Pada awal kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia menikmati ekspansi ekonomi yang solid berkat stabilitas makroekonomi dan meningkatnya investasi asing. Namun, Krisis Finansial Global 2008–2009 menyebabkan perlambatan, dengan PDB turun dari 6,1% pada 2008 menjadi 4,5% pada 2009, meskipun Indonesia tetap mencatat pertumbuhan positif dibanding banyak negara lain yang mengalami kontraksi. Orientasi ekonomi pada konsumsi domestik membantu mengurangi dampak krisis, sementara pemerintah merespons dengan stimulus fiskal dan moneter serta

restrukturisasi sektor keuangan, yang memperkuat daya tahan ekonomi. Pada 2010, pertumbuhan kembali meningkat menjadi 6,2%, menandai pemulihan dari krisis dan menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun berikutnya.

h. Era Joko Widodo

Pada era Joko Widodo 2014–2024, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi stabil, dengan PDB meningkat dari Rp 10.569,71 triliun pada 2014 menjadi sekitar Rp 20.892,38 triliun pada 2023. Fokus pada pembangunan infrastruktur seperti Tol Trans-Jawa dan Tol Trans-Sumatera, penguatan ekonomi digital, serta peningkatan investasi asing menjadi prioritas utama, dengan rata-rata pertumbuhan PDB sekitar 5% per tahun.

Pandemi COVID-19 pada 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar -2,1%, tetapi pemulihan dimulai pada 2021 dengan pertumbuhan 3,69%, didukung oleh stimulus ekonomi dan program vaksinasi. Pada 2022–2024, pertumbuhan mencapai 5,3%, didorong oleh pemulihan sektor pariwisata, ekspansi ekonomi digital, dan peningkatan investasi asing. Digitalisasi ekonomi, termasuk e-commerce, fintech, dan startup teknologi, menjadi motor utama ekspansi ekonomi pasca-pandemi, memperkuat daya saing Indonesia di era globalisasi.

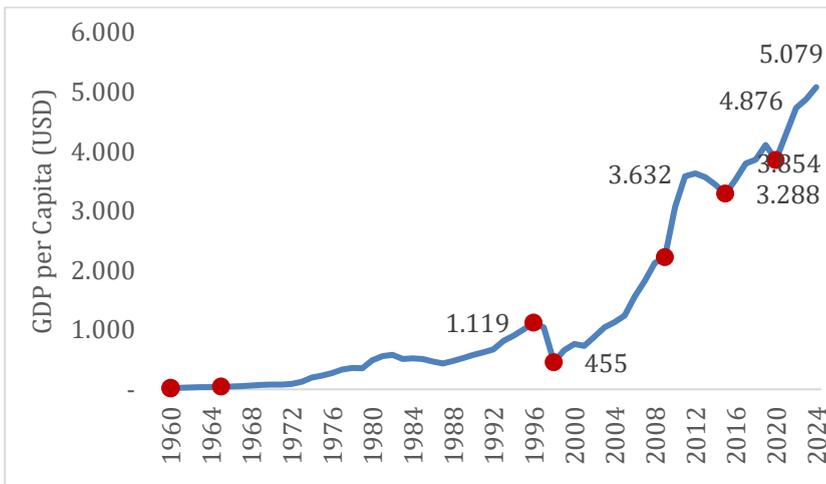
i. Era Prabowo

Pada 2024, PDB Indonesia mencapai Rp 21.568,78 triliun, dengan pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun. Fokus kebijakan meliputi swasembada pangan, hilirisasi industri, dan peningkatan investasi asing, melalui penguatan produksi dalam negeri, pengurangan impor, serta program hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah juga memberikan insentif dan deregulasi kebijakan untuk menarik investasi asing, meningkatkan kepercayaan industri.

Meskipun optimisme meningkat, tantangan seperti daya beli masyarakat yang lemah, ketergantungan pada impor, dan ketimpangan ekonomi tetap menjadi perhatian. Pemerintahan Prabowo berupaya mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, memperkuat daya saing Indonesia di era globalisasi.

2. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita dihitung dengan membagi total Produk Domestik Bruto (PDB) nominal dengan jumlah penduduk suatu negara. Jika dikonversikan ke dalam dolar AS, angka tersebut memudahkan perbandingan antar negara dan memberikan gambaran tentang daya beli rata-rata masyarakat Indonesia. Dalam rentang waktu 1960 hingga 2024, pendapatan per kapita Indonesia disajikan pada gambar berikut.



Sumber: World Bank, 2025

Gambar 2. 2. Pendapatan per Kapita Indonesia (USD)

Grafik menunjukkan beberapa fase perkembangan ekonomi Indonesia, dimulai dari fase peningkatan yang relatif landai pada periode 1960–1996, diikuti oleh pertumbuhan pesat antara 2000–2012, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 sejak

2020 hingga kini. Selain tren pertumbuhan, grafik juga mencerminkan dampak berbagai krisis terhadap pendapatan per kapita, termasuk Krisis Asia 1997–1998, Krisis Global 2008–2009, perlambatan akibat penurunan permintaan global 2012–2015, dan krisis pandemi COVID-19 pada 2020. Grafik di atas menggambarkan perkembangan berikut.

- a. Pada era 1960-an, pendapatan per kapita Indonesia hanya sebesar 21 USD per tahun, mencerminkan tahap awal pembangunan ekonomi yang ditandai oleh inflasi tinggi dan kebijakan ekonomi yang belum stabil. Meskipun terdapat upaya awal untuk membangun infrastruktur dan menciptakan stabilitas ekonomi, pendapatan per kapita Indonesia tetap jauh di bawah standar internasional.
- b. Memasuki era Orde Baru, pemerintah Indonesia menerapkan reformasi ekonomi yang agresif, mencakup kebijakan fiskal, moneter, dan perbaikan iklim investasi untuk mendorong pemulihan serta pertumbuhan yang lebih stabil. Transformasi struktural ini menghasilkan peningkatan ekonomi yang berkontribusi pada kenaikan pendapatan per kapita, meskipun angka tersebut tetap dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap USD. Pada 1968, pendapatan per kapita Indonesia mencapai 65 USD per tahun, dan dalam 29 tahun meningkat signifikan hingga 1.045 USD pada 1997, mencerminkan keberhasilan reformasi ekonomi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan nasional.
- c. Fluktuasi nilai tukar rupiah sangat mempengaruhi konversi pendapatan per kapita dari rupiah ke USD, terutama saat terjadi krisis ekonomi. Selama **Krisis Keuangan Asia 1997–1998**, rupiah mengalami depresiasi lebih dari 80% terhadap dolar AS, menyebabkan penurunan tajam pendapatan per kapita menjadi **455 USD** per tahun, meskipun sektor riil mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kondisi ini menggarisbawahi sensitivitas pendapatan per kapita terhadap guncangan eksternal serta volatilitas nilai tukar global, yang

dapat berdampak luas pada stabilitas ekonomi nasional (Idrus, 2024).

- d. **Krisis Global 2008–2009** berdampak signifikan pada pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia, menyebabkan perlambatan akibat guncangan ekonomi global dan pembatasan aktivitas domestik. Namun, kebijakan stimulus fiskal dan moneter dari pemerintah serta Bank Indonesia berhasil mempercepat pemulihan ekonomi. Program dukungan bagi UMKM dan investasi infrastruktur menjadi katalis dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat serta stabilisasi pasar. Berkat langkah-langkah ini, pada 2018, pendapatan per kapita Indonesia mencapai 2.125 USD, mencerminkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
- e. Pada 2012, pendapatan per kapita Indonesia mencapai 3.632 USD, tetapi mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut hingga 3.288 USD pada 2015 (World Bank, 2016). Perlambatan ini disebabkan oleh melemahnya investasi domestik serta **turunnya permintaan global** yang berdampak negatif pada sektor ekspor. Selain itu, merosotnya harga komoditas dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut mempengaruhi arus investasi asing. Kebijakan fiskal yang lebih ketat dalam upaya restrukturisasi ekonomi juga berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan selama periode tersebut.
- f. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pendapatan per kapita Indonesia dari 4.107 USD pada 2019 menjadi 3.654 USD pada 2020, dan hal ini sejalan dengan kontraksi ekonomi sebesar -2,1%. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah menerapkan stimulus ekonomi besar-besaran, mencakup kebijakan fiskal dan moneter, guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pemulihan. Berkat langkah-langkah tersebut, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan baik hingga 2024.

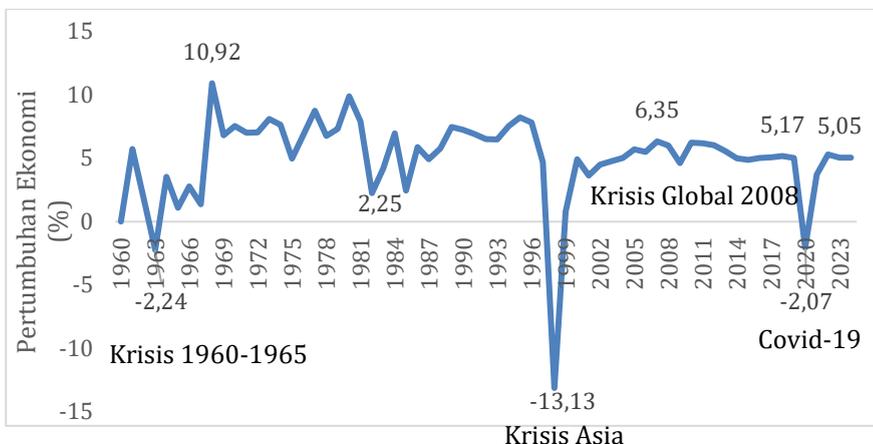
- g. Proyeksi ekonomi Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan pendapatan per kapita yang moderat hingga tinggi, mencapai 5.079 USD pada tahun 2024. Katalis utama pertumbuhan ini mencakup investasi infrastruktur, ekspansi teknologi digital, serta reformasi kebijakan makroekonomi yang responsif terhadap dinamika global. Berdasarkan analisis International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan terus meningkat, seiring dengan perbaikan iklim investasi dan stabilisasi ekonomi.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dari satu periode ke periode berikutnya, sebagaimana ditunjukkan formula berikut.

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDB \text{ tahun } t - PDB \text{ } t - 1}{PDB \text{ } t - 1} \times 100\%$$

Analisis pertumbuhan ekonomi menggunakan *Real GDP* penting untuk menghilangkan pengaruh inflasi, sehingga angka yang diperoleh benar-benar mencerminkan peningkatan output ekonomi. Jika GDP nominal tumbuh 6%, tetapi inflasi mencapai 3%, maka *Real GDP* hanya tumbuh 3%, mencerminkan pertumbuhan riil setelah memperhitungkan perubahan harga. Dalam studi Ekonomi Mikro, *Real GDP* memberikan gambaran lebih akurat dalam menilai tren jangka panjang dan efektivitas kebijakan ekonomi. Pada gambar 1, PDB riil Indonesia ditampilkan dengan harga konstan menggunakan tahun dasar 2010, memperlihatkan pola pertumbuhan ekonomi tanpa distorsi inflasi. Dari data tersebut, dapat dihitung pertumbuhan tahunan (*annual growth*) yang disajikan dalam gambar 3, memberikan wawasan tentang dinamika ekonomi Indonesia serta dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap pertumbuhan dari tahun ke tahun.



Sumber: World Bank, 2025

Gambar 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1960-2024

a. Krisis Ekonomi 1965-1966

Krisis Ekonomi Indonesia 1965–1966 merupakan periode yang sangat sulit, ditandai oleh hiperinflasi ekstrem yang melebihi 1.500%, akibat ekspansi fiskal yang tidak terkendali serta ketidakstabilan kebijakan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami volatilitas tinggi, dengan kontraksi dan tekanan fiskal yang semakin memburuk. Kondisi ini diperparah oleh ketidakstabilan politik, yang berujung pada pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, menandai titik balik bagi restrukturisasi ekonomi nasional.

Pemerintahan Soeharto mulai menerapkan program stabilisasi ekonomi, termasuk pengendalian inflasi, reformasi kebijakan moneter, dan restrukturisasi sektor keuangan. Dukungan dari IMF dan negara-negara donor melalui *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI) membantu restrukturisasi utang serta pemulihan ekonomi. Reformasi yang dijalankan setelah 1966 berhasil meredam inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, menjadi fondasi ekspansi ekonomi di dekade berikutnya.

b. Era Reformasi dan Konsolidasi Orde Baru (1967–1988)

Setelah masa krisis, dimulailah era Orde Baru yang ditandai dengan kebijakan stabilisasi dan pembangunan infrastruktur yang masif. Pada masa Orde Baru (sekitar 1966–1998), pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami percepatan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan GDP tahunan berada di kisaran 7–8% (Hill, 1999). Pencapaian ini digolongkan periode pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara. Pada 1982, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan drastis akibat guncangan eksternal dan kebijakan domestik yang konservatif. Penurunan harga minyak dan komoditas utama, akibat pengetatan moneter oleh *Federal Reserve* AS, mengurangi pendapatan devisa Indonesia, memperburuk neraca perdagangan, dan ekonomi nasional dan berkontribusi pada perlambatan ekonomi.

c. Stabilisasi dan Pertumbuhan Tinggi (1990-an awal)

Pada 1990-an, Indonesia memasuki periode pertumbuhan ekonomi tinggi, dengan ekspansi GDP mendekati 7–8% per tahun, didukung oleh kebijakan ekonomi yang semakin solid dan peningkatan investasi infrastruktur. Pertumbuhan ini ditopang oleh ekspor komoditas, investasi domestik, serta perbaikan regulasi ekonomi, yang memperkuat daya saing Indonesia dan menciptakan fondasi bagi integrasi ekonomi global.

d. Krisis Keuangan Asia 1997-1998

Krisis Keuangan Asia 1997–1998 menjadi titik balik yang menyebabkan depresiasi tajam rupiah, lonjakan inflasi, serta kehancuran sektor perbankan. Banyak perusahaan dan bank yang tidak mampu memenuhi kewajiban utang dalam dolar AS, memperburuk krisis ekonomi dan politik, yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998 setelah gelombang demonstrasi dan kerusuhan sosial. Untuk mengatasi krisis, Indonesia menerima bantuan IMF, tetapi kebijakan seperti penutupan bank dan pengetatan fiskal justru

memperburuk kondisi ekonomi dalam jangka pendek. Kemudian, reformasi ekonomi termasuk restrukturisasi perbankan dan stabilisasi moneter, membantu pemulihan bertahap.

e. Pemulihan dan Konsolidasi Pasca Krisis (Awal Abad 21)

Setelah Krisis Keuangan Asia 1997–1998, Indonesia memasuki fase pemulihan pada awal 2000-an, dengan fokus pada reformasi perbankan, deregulasi, privatisasi, serta penataan struktur fiskal yang lebih modern. Langkah-langkah ini berhasil menstabilkan sistem keuangan dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, memungkinkan pertumbuhan GDP kembali ke tren positif dengan laju yang lebih moderat namun berkelanjutan.

f. Krisis Global 2008-2009

Krisis Global 2008–2009 memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia, meskipun tidak sebesar Krisis Keuangan Asia 1997–1998. Krisis ini menyebabkan penurunan permintaan ekspor global, perlambatan investasi asing, dan volatilitas pasar modal, yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan PDB dari 6,0% pada 2008 menjadi sekitar 4,6% pada 2009. Pemerintah Indonesia menerapkan stimulus fiskal, penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia, dan peningkatan belanja publik di sektor infrastruktur guna menjaga likuiditas dan stabilitas perbankan. Kebijakan ini memulihkan kepercayaan investor dan mendorong pemulihan ekonomi secara bertahap (Halim & Saragih, 2010; dan Utami & Wijaya, 2011). -

g. Krisis Covid-19 dan Pemulihan 2020-2021

Krisis COVID-19 2020–2021 menyebabkan kontraksi ekonomi Indonesia sebesar -2,1%, dengan PSBB dan pembatasan aktivitas ekonomi yang berdampak signifikan pada sektor pariwisata, ritel, dan manufaktur. Gangguan rantai pasokan global serta penurunan daya beli masyarakat semakin

memperburuk kondisi, memaksa banyak UMKM untuk beradaptasi atau menghentikan operasionalnya (Irawan & Alamsyah, 2021). Untuk meredam dampak krisis, pemerintah meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang mencakup stimulus fiskal, bantuan sosial, dan dukungan bagi UMKM. Kebijakan moneter, termasuk penurunan suku bunga, juga diterapkan guna menjaga likuiditas pasar. Hal ini membatasi kejatuhan ekonomi serta membangun fondasi pemulihan bertahap (Irawan & Alamsyah, 2021).

D. Model Solow-Swan dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, dapat dipahami lebih dalam dengan analisis Model Solow-Swan, serta dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di China dan Singapura.

$$Y = A + K^a * L^{(1-a)}$$

Pertumbuhan ekonomi model Solow-Swan dipengaruhi oleh tiga pendorong utama, yakni K= akumulasi modal (fisik dan manusia), L=pertumbuhan tenaga kerja dan A=kemajuan teknologi (eksogen).

Data makro ekonomi yang terkait dengan variabel pertumbuhan ekonomi Solow-Swan tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 2.1. Perbandingan Makro Ekonomi China, Singapura dan Indonesia dalam Model Solow-Swan

Indikator	China	Singapura	Indonesia
1. PDB per kapita (USD, tahun 2023)	US\$13.000	US\$70.000	US\$4.200
2. Rata-rata Pertumbuhan GDP	7-9%	2-4%	5-5.5%
3. Investasi % (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	40-50%	30%	30-35%

4. Pengeluaran R&D (% dari PDB)	2,4%	2,2%	0,2-0.3%
5. Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja	Relatif moderat <1% pertahun)	Relatifrendah (<0,5%)	Tinggi (1,5–2%)

Data di atas dapat dinyatakan dengan ringkas pada tabel 2 berikut.

Tabel 2.2. Faktor Pertumbuhan Ekonomi China, Singapura, Indonesia

Variabel	China	Singapura	Indonesia
Akumulasi Modal (fisik dan manusia)	Investasi besar infrastruktur dan manufaktur meningkatkan stok modal fisik secara pesat	Investasi besar dalam infrastruktur	Investasi dan tabungan nasional masih lebih rendah, sehingga stok modal tumbuh lambat.
Pertumbuhan Tenaga Kerja	Urbanisasi massal dan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri meningkatkan produktivitas.	pengembangan modal manusia (human capital unggul, mendorong produktivitas tinggi.	Pertumbuhan tenaga kerja pesat, membutuhkan peningkatan tambahan modal agar produktivitas tidak tergerus.
Kemajuan Teknologi	Meningkatkan R&D dan transfer teknologi, sehingga mendongkrak output per kapita menuju <i>steady state</i> yang lebih tinggi.	Adopsi teknologi canggih memastikan pertumbuhan output per kapita yang signifikan, sehingga mencapai <i>steady state</i> yang tinggi.	Laju adopsi teknologi di Indonesia masih tertinggal, sehingga memperlambat kenaikan output per kapita.

Dalam kerangka model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan, perbedaan antara China, Singapura, dan Indonesia dapat dipahami dari tiga aspek utama:

1. **Akumulasi Modal:** China dan Singapura telah mengoptimalkan investasi untuk membangun stok modal produktif, sedangkan Indonesia masih dalam proses peningkatan investasi.
2. **Pertumbuhan Tenaga Kerja:** Dividend demografi Indonesia menawarkan potensi besar, tetapi tanpa peningkatan modal, efeknya terhadap output per kapita tidak maksimal.
3. **Kemajuan Teknologi:** Dengan pengeluaran R&D dan adopsi teknologi yang lebih tinggi, China dan Singapura telah mencapai pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi, sementara Indonesia perlu mempercepat inovasi untuk menyeimbangkan

E. Indikator Pembangunan Ekonomi

Disamping ketiga indikator pertumbuhan ekonomi diatas, pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur kualitas hidup melalui kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, menjadi acuan utama dalam menilai kemajuan pembangunan Indonesia sejak diperkenalkan oleh UNDP pada 1990-an. Pada awal era tersebut, IPM masih rendah karena terbatasnya akses layanan kesehatan dan pendidikan serta rendahnya pendapatan per kapita. Memasuki era Reformasi, Indonesia meningkatkan infrastruktur sosial, memperluas akses pendidikan, dan memperbaiki layanan kesehatan, sehingga IPM naik dari 69,31 pada 2010 menjadi 71,91 pada 2015 (BPS). Proyeksi menunjukkan IPM mencapai 73,5 pada 2024, mencerminkan dampak positif reformasi kebijakan pembangunan.

2. Kesenjangan Pendapatan

Indikator kesetaraan pendapatan, yang sering diukur dengan koefisien Gini, menunjukkan tingkat pemerataan distribusi

pendapatan di Indonesia. Pada 1960-an, distribusi pendapatan relatif lebih merata, tetapi industrialisasi dan transformasi ekonomi di era Orde Lama dan Orde Baru menyebabkan ketimpangan meningkat, terutama di kota-kota besar dan sektor formal. Pasca Krisis Keuangan Asia 1997–1998, pemerintah mulai menerapkan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan, seperti program sosial, investasi pendidikan, dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Meskipun nilai koefisien Gini berkisar 0,38–0,41 pada awal 2000-an hingga 2010-an, sedikit tren penurunan terlihat berkat kebijakan redistributif. Hingga 2024, pemerataan pendapatan tetap menjadi fokus utama kebijakan pembangunan, dengan tantangan urbanisasi pesat dan ketimpangan regional, guna meningkatkan distribusi pendapatan.

3. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran di Indonesia mencerminkan kapasitas penciptaan lapangan kerja dan kesehatan ekonomi, dengan pengukuran dilakukan oleh BPS, meskipun sektor informal sering mempengaruhi interpretasi angka resmi. Pada 1980-an, tingkat pengangguran relatif rendah (4–6%), tetapi meningkat signifikan akibat Krisis Keuangan Asia 1997–1998, sebelum mulai pulih di awal 2000-an.

Pada 2019, pengangguran turun menjadi 5,28%, didukung oleh pertumbuhan ekonomi 5%, tetapi melonjak menjadi 7,1% pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Hingga 2024, tren pasar kerja semakin kompleks karena globalisasi, teknologi, dan perubahan struktural ekonomi, dengan diversifikasi sektor serta vocational training membantu penciptaan lapangan kerja. Meski Okun's Law menunjukkan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, jobless growth dapat terjadi jika peningkatan produktivitas didorong oleh investasi modal intensif atau inovasi teknologi, tanpa peningkatan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.

4. Tingkat Kemiskinan

Garis kemiskinan ditentukan berdasarkan biaya minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan dan non-pangan, dengan pengukuran dilakukan oleh BPS melalui SUSENAS. Pada 1960-an, sebagian besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan akibat keterbatasan pendapatan, akses layanan dasar, dan infrastruktur. Selama era Orde Baru, pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan modernisasi pertanian membantu menurunkan kemiskinan, meskipun distribusi manfaatnya belum merata. Pasca Krisis Keuangan Asia 1997–1998, Indonesia meluncurkan program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan langsung tunai, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur inklusif, yang mendorong penurunan angka kemiskinan hingga 24%–30% di awal 2000-an. Hingga 2024, angka kemiskinan terus menurun, dari 26,25% pada 1998 menjadi 9,5% pada 2023, dengan proyeksi 9,2% pada 2024. Dengan kebijakan pembangunan inklusif, investasi sosial, dan jaminan kesejahteraan, Indonesia berupaya mempertahankan tren penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Keberlanjutan Lingkungan

Sejak 1980-an, Indonesia mengalami tantangan besar dalam keberlanjutan lingkungan, terutama akibat industrialisasi dan ekspansi pertanian yang menyebabkan penurunan tutupan hutan dari 90–95 juta hektar. Meskipun terdapat kebijakan konservasi, regulasi lingkungan yang belum optimal menyebabkan deforestasi, polusi udara, dan degradasi ekosistem berlanjut. *Environmental Performance Index* (EPI) Indonesia terus mengalami penurunan, mencerminkan kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Skor EPI Indonesia turun dari 45 pada tahun 2000 menjadi 33,6 pada 2024, menunjukkan kemunduran dalam pengelolaan sumber daya alam, emisi karbon, serta kualitas udara akibat industri dan kendaraan. Meskipun program rehabilitasi hutan dan energi terbarukan telah diperkenalkan, efektivitasnya bergantung pada

penegakan hukum, investasi lingkungan, dan transisi energi ke sumber yang lebih ramah lingkungan. Dengan kebijakan yang lebih tegas dan konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk memperbaiki keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

F. Kesimpulan

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diukur melalui peningkatan GDP dan pendapatan per kapita, mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat serta transformasi struktural dari ekonomi agraris menuju sektor industri, jasa, dan digital, yang mendukung peningkatan standar hidup. Namun, pertumbuhan ekonomi harus inklusif, memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pemerataan pendapatan dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci agar pertumbuhan berdampak pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Sejarah ekonomi Indonesia menegaskan pentingnya reformasi struktural dan kebijakan makro dalam menjaga stabilitas pertumbuhan, dengan tantangan seperti krisis keuangan dan fluktuasi harga komoditas menunjukkan perlunya kemampuan adaptasi terhadap dinamika global. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi terbukti berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan tingkat pengangguran, serta penurunan kemiskinan. Namun, Indonesia perlu terus memperhatikan kesetaraan pendapatan dan menjaga keberlanjutan lingkungan, agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang.

2. Model Solow-Swan mengungkap tantangan pertumbuhan jangka panjang Indonesia, terutama dalam investasi untuk stok modal produktif, yang berperan dalam akumulasi modal guna meningkatkan output ekonomi. Selain itu, pengembangan tenaga kerja menjadi faktor kunci dalam mencapai produktivitas tinggi, mengingat pentingnya peningkatan keterampilan dan efisiensi tenaga kerja dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Lebih jauh, kemajuan teknologi menjadi elemen utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia, sebagaimana terbukti dalam keberhasilan negara-negara maju. Untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, investasi dalam riset, inovasi, dan adopsi teknologi harus diprioritaskan agar Indonesia dapat meningkatkan daya saing global serta mempercepat modernisasi ekonomi.

3. Indonesia memerlukan pengembangan kerangka kebijakan yang responsif guna memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif. Integrasi pasar global, transformasi digital, serta investasi dalam sumber daya manusia menjadi pilar utama dalam optimalisasi pertumbuhan. Dengan keseimbangan antara ekspansi ekonomi, pemerataan hasil, dan keberlanjutan lingkungan, Indonesia dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

BAB 3
STRUKTUR PEREKONOMIAN
INDONESIA

A. Konsep Perekonomian

Ekonomi suatu negara tidak akan lepas dari kebijakan negara tersebut, sehingga struktur ekonomi setiap negara memiliki perbedaan. Ada lima permasalahan yang selalu dihadapi oleh sebuah negara dalam perekonomian, yaitu: (Sukirno, 2012)

1. Masalah pertumbuhan ekonomi
2. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi
3. Masalah pengangguran
4. Masalah kenaikan harga-harga (Inflasi)
5. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran

Dari lima permasalahan pokok ini, setiap negara menentukan jenis sistem perekonomian yang diterapkan dalam negaranya, seperti: (Sattar, 2018)

1. Sistem Ekonomi Pasar (Kapitalis): Sistem ini memberikan kebebasan penuh kepada individu dan perusahaan swasta untuk mengatur kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah yang signifikan.
2. Sistem Ekonomi Terpusat (Sosialis): Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap alat produksi dan distribusi barang dan jasa.
3. Sistem Ekonomi Campuran: Sistem ini menggabungkan elemen-elemen dari ekonomi pasar dan ekonomi terpusat, di mana pemerintah dan sektor swasta bersama-sama mengatur kegiatan ekonomi. Indonesia, misalnya, menerapkan sistem ekonomi campuran yang menekankan peran aktif pemerintah dalam perekonomian sambil tetap memberikan ruang bagi inisiatif swasta

Meskipun setiap negara memiliki ideologi masing-masing yang kemudian menjadi dasar perekonomian mereka, namun secara substantif dan teoritis tidak akan keluar dari konsep tiga jenis sistem perekonomian di atas. Sebab, tiga jenis sistem perekonomian di atas merupakan rumusan global yang menggambarkan tujuan utama dari pengelolaan sistem perekonomian, yaitu: (Erowati, 2020)

- a. Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan ini berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan nasional.
- b. Stabilitas Harga. Tujuan ini untuk mengelola inflasi agar daya beli masyarakat terlindungi.
- c. Pemerataan Pendapatan. Tujuan ini adalah upaya dalam menghilangkan kesenjangan pendapatan di masyarakat.
- d. Keseimbangan Neraca Pembayaran. Tujuan ini sebagai cara dalam membuat serta menjaga keseimbangan antara aliran masuk dan keluar devisa.
- e. Peningkatan Kesejahteraan. Tujuan ini untuk membangun kualitas hidup masyarakat dengan cara penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial.

Dasar dari perekonomian bagi sebuah negara adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, melalui pengendalian mekanisme ekonomi yang tertata dan baik.

B. Sistem dan Konsep Perekonomian Indonesia

Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan keanekaragaman budaya, suku, agama serta corak kehidupan antar pulau. Karakteristik ini menjadikan pertimbangan utama bagi bapak bangsa menentukan sistem perekonomian negara, yakni memadukan antara sistem ekonomi pasar dan intervensi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, sehingga bisa dipastikan bahwa konsep perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi campuran.

Sistem ini membiarkan mekanisme pasar tetap berjalan namun pemerintah turut aktif mengatur dan mengarahkan perekonomian guna mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33, "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan," yang mencerminkan orientasi kerakyatan dan keadilan sosial dalam pengelolaan ekonomi. Konsep pasal 33 ini, menjadikan Sadono Sukirno (2016) memiliki pandangan bahwa, sistem ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti pola

kapitalis maupun sosialis, melainkan menekankan pada sistem ekonomi Pancasila. Alasan ini melihat dari aktualisasi dari nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila seperti keadilan, gotong royong, dan kedaulatan rakyat. Bagaimana peran pemerintah Pemerintah dalam ekonomi Pancasila ini?, Sadono berpendapat bahwa pemerintah berperan penting sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pelaku ekonomi di sektor-sektor strategis, seperti energi, pangan, dan transportasi, yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat.

Pandangan Sadono terhadap konsep perekonomian Indonesia sebenarnya tidak keluar dari toeritis sistem ekonomi campuran sebab peran pemerintah mengatur dan masyarakat menjalankan sistem ekonomi sebagaimana seharusnya. Secara struktural, perekonomian Indonesia ditopang oleh empat pelaku utama: rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Keempatnya terlibat dalam aktivitas ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemerintah turut campur tangan melalui kebijakan fiskal (pajak dan belanja negara) dan kebijakan moneter (pengaturan uang beredar dan suku bunga oleh Bank Indonesia) untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan mengatasi ketimpangan.

C. Struktur Ekonomi Indonesia

Secara konseptual, struktur ekonomi mencerminkan susunan sektor-sektor produktif dalam suatu perekonomian yang diklasifikasikan secara umum ke dalam tiga kelompok utama:

1. Sektor Primer: mencakup kegiatan ekonomi yang langsung memanfaatkan sumber daya alam, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan.
2. Sektor Sekunder: terdiri atas kegiatan industri pengolahan dan konstruksi, di mana bahan mentah diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
3. Sektor Tersier: meliputi aktivitas jasa, baik yang bersifat komersial (perdagangan, transportasi, keuangan) maupun sosial (pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pemerintahan).

Perubahan struktur ekonomi dari dominasi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier umumnya menjadi indikator pertumbuhan dan modernisasi ekonomi suatu negara.

Indonesia memiliki ideologis Pancasila dalam sistem ekonomi, dan landasan berpijak Undang-undang Dasar 1945, sehingga struktur ekonomi Indonesia tidak lepas dari ruh pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 (Hamid, Labetubun, Muchtar A., 2021). Konsep memahami perekonomian Indonesia dari dua landasan tersebut (Pancasila dan UUD 1945), mendorong terjadinya perubahan struktur perekonomian, sebab perubahan pemerintah atau sistem pemerintah menjadi faktor utama dalam membentuk struktur ekonomi Indonesia. Nugroho (2022) menyebutkan bahwa transformasi struktural ekonomi Indonesia terus berubah, bahkan sejak era reformasi menunjukkan pergeseran dari sektor primer ke sektor jasa dan industri pengolahan.

Melihat dari perjalanan sejarah pemerintahan Indonesia, bisa digambarkan bahwa perubahan struktur ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut:

- Periode Awal Kemerdekaan (1945–1966)
Pada masa ini, perekonomian Indonesia sangat bergantung pada sektor pertanian. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor ini, dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sangat dominan. Struktur ekonomi masih bersifat agraris dan belum mengalami diversifikasi.
- Masa Orde Baru (1967–1998)
Pemerintahan Orde Baru menerapkan strategi pembangunan jangka panjang yang terfokus pada stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan industri. Melalui program REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), pemerintah mendorong industrialisasi dan modernisasi sektor pertanian. Kontribusi sektor industri pengolahan mulai meningkat.
- Era Reformasi dan Globalisasi (1999–sekarang)
Krisis moneter 1997–1998 memicu reformasi struktural dalam perekonomian nasional. Desentralisasi fiskal, liberalisasi

ekonomi, dan berkembangnya sektor jasa menjadi ciri khas periode ini.

Perubahan struktur ekonomi di Indonesia merupakan transformasi struktural yang terjadi dalam rangkaian perubahan pemerintahan dalam komposisi Pengeluaran agregat (AD), perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), AS (produksi dan menggunakan faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1979). Terlihat sekali struktural transformasi ekonomi Indonesia dari masa pemerintahan kemasa pemerintahan yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan dan misi presiden:

1. Era perekonomian Presiden Soekarno (1945-1967):
 - a. Struktural ekonomi pada masa awal kemerdekaan Indonesia berorientasi pada pembangunan fondasi negara yang baru merdeka dari kolonialisme Belanda.
 - b. Dilakukannya integrasi nasional.
 - c. Konsep ekonomi lebih terpusat dengan peran besar pemerintah dalam sektor-sektor kunci seperti pertanian dan industri nasionalisasi.
2. Era perekonomian Presiden Soeharto (1967-1998):
 - a. Struktural ekonomi pada era ini lebih fokus karena ada program REPLITA. Era ini juga dikenal sebagai "pembangunan berdasarkan ekonomi."
 - b. Era kedua ini lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
 - c. Investasi asing dan industrialisasi berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi.
 - d. Peran pemerintah yang dominan sehingga terdapat kendali politik yang ketat oleh pemerintah.
3. Era perekonomian Presiden BJ Habibie (1998-1999):
 - a. Struktur ekonomi era ini berada dalam tekanan ekonomi dan reformasi politik karena masa transisi.

- b. Sistem ekonomi yang dilakukan mempromosikan liberalisasi ekonomi dan demokratisasi.
4. Era perekonomian Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1999-2001):
 - a. Struktural ekonomi pada masa ini ditandai dengan reformasi politik dan upaya peningkatan pemerintahan yang lebih terbuka.
 - b. Sistem ekonomi lebih fokus pada pemulihan stabilitas politik dan ekonomi pasca-krisis 1997-1998.
 5. Era perekonomian Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004):
 - a. Struktural ekonomi masa ini fokus pada pengatasan dampak krisis ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 - b. Fokus pada sektor pertanian dan kebijakan kemiskinan.
 6. Era perekonomian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004-2014):
 - a. Struktural ekonomi pada era ini dinyatakan cukup stabil karena jabatan yang lama.
 - b. Lokus pergerakan ekonomi pada infrastruktur, pendidikan, dan perbaikan iklim investasi.
 7. Era perekonomian Presiden Joko Widodo (Jokowi) (2014-2024):
 - a. Struktural ekonomi pada era ini hampir mirip dengan era SBY, Fokus pada pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan peningkatan konektivitas nasional.
 - b. Konsep perekonomian dari era ini adalah digitalisasi dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi.

Kesimpulannya adalah Fase pembangunan di Indonesia dari masa Orde Lama hingga saat ini mencerminkan perjalanan yang kompleks dan beragam. Pada masa Soekarno, negara baru merdeka berfokus pada kemerdekaan politik dan fondasi negara yang kuat, dengan pemerintah memiliki peran besar dalam sektor-sektor utama. Kemudian, era Orde Baru di bawah Soeharto membawa pertumbuhan

ekonomi yang pesat dengan fokus pada industrialisasi, infrastruktur, dan investasi asing. Pemerintah memiliki kendali politik yang ketat selama periode ini

D. Kesimpulan

Struktur ekonomi merupakan konfigurasi dari komponen-komponen yang terdapat dalam suatu negara, berfungsi untuk mengelola ekonomi domestik negara tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa unsur, yaitu sistem ekonomi, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, serta pasar input dan pasar output. Setiap elemen ini memiliki jenis kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Unsur-unsur dalam sebuah ekonomi meliputi pasar input (faktor produksi), pasar output (produk dan layanan), rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sistem ekonomi itu sendiri. Saling keterkaitan antara elemen-elemen ini menciptakan kesatuan yang saling mempengaruhi, mirip dengan struktur organisasi. Struktur ekonomi juga menunjukkan unit-unit ekonomi, interaksi yang terjadi, serta saluran-saluran wewenang dan tanggung jawab yang ada di dalam suatu sistem ekonomi, sehingga struktur ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan dan kekuasaan pemerintah serta anekaragaman budaya serta suku dan kekayaan alam.

BAB 4
SISTEM PEREKONOMIAN
INDONESIA

Perekonomian merupakan salah satu faktor yang penting dalam perkembangan suatu negara, dengan perekonomian yang baik tentunya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di setiap negara tentunya mempunyai suatu sistem ekonomi yang diterapkan berdasarkan bagaimana situasi serta kondisi yang ada di negara tersebut. Maka, sistem ekonomi di setiap negara dapat berbeda. Agar dapat mengendalikan perekonomian masyarakat, tentunya setiap negara dapat mempunyai suatu sistem. Negara dapat bertanggung jawab dalam mengatur serta menjaga supaya perekonomian stabil dan dapat meningkat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

Sistem perekonomian Indonesia, dari sejak awal tentunya sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini yang tercantum dalam UUD 1945. Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila yang merupakan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai kebangsaan seperti gotong royong dan saling menguatkan. Sistem ekonomi pancasila telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33. Dalam pasal dijelaskan terkait susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan ekonomi. Konstitusi ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi Pancasila dengan arah kebijakan ekonomi yang tentunya mengutamakan kemakmuran masyarakat daripada kemakmuran individu. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya tertuju pada individu atau golongan tertentu, tetap secara merata. Sistem ekonomi meliputi mengenai nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, hukum, norma serta peraturan yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan. Dalam sistem ekonomi Indonesia merujuk kepada seluruh lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan bangsa Indonesia dalam mengelola segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

A. Pengertian Sistem Ekonomi

Pengertian sistem ekonomi adalah strategi atau cara suatu Negara dalam mengatur kehidupan perekonomiannya dalam rangka

mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi suatu negara bertujuan untuk menjawab permasalahan pokok ekonomi, antara lain: barang dan jasa apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Setiap komunitas memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan sistem ekonomi yang mereka anut. Pendekatan komunitas dalam mengelola aspek ekonomi ini disebut sebagai sistem ekonomi atau tata ekonomi. Sistem ekonomi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan lembaga ekonomi yang digunakan oleh suatu negara atau bangsa untuk mengatur aktivitas ekonomi mereka. Lembaga ekonomi ini mencakup panduan, peraturan, dan norma-norma yang digunakan oleh masyarakat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi.

Sistem ekonomi juga merupakan seluruh tata cara yang digunakan dalam mengkoordinasikan perilaku masyarakat mencakup produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik dalam hal produksi, distribusi, konsumsi, maupun investasi yang secara terintegrasi membentuk satu kesatuan utuh teratur dan dinamis sehingga mampu menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Beberapa pengertian menurut para ahli dari Dumairy (1966) bahwa sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur hubungan ekonomi antara manusia dan pembentukan kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi tidak harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pandangan, pola dan filsafat hidupnya. Ia juga yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan. Sedangkan Gilarso (1992) mengatakan bahwa sistem ekonomi merupakan cara yang digunakan untuk mengkoordinasikan perilaku keseluruhan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik itu produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, juga dapat menghindari terjadinya kekacauan.

Dalam sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang memengaruhi sistem ekonomi suatu

negara antara lain: falsafah dan ideologi yang dianutnya, sistem pemerintahan serta sistem politik suatu negara. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi sistem ekonomi antara lain: pengaruh sistem ekonomi yang dianut negara lain, pengaruh politik dunia internasional serta pengaruh sosial budaya luar negeri. Ada beberapa lembaga ekonomi yang bersifat tertulis, seperti hukum, peraturan pemerintah, atau instruksi presiden, sementara yang lainnya bersifat tidak tertulis, seperti kebiasaan, adat-istiadat, atau praktik yang umumnya diikuti oleh masyarakat dalam urusan ekonomi. Perangkat kelembagaan ini meliputi proses operasional, mekanisme hukum, peraturan ekonomi, dan norma sosial yang tercatat maupun yang tidak tertulis, yang semuanya terkait dengan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi ini merupakan bagian integral dari ideologi sosial suatu negara atau bangsa. Setiap sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara memiliki karakteristik khasnya sendiri. Agar dapat membedakannya dari sistem ekonomi negara lain dapat dilihat dari sudut pandang yang melibatkan terkait dengan kepemilikan sumber daya atau faktor produksi, tingkat kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat dalam bersaing satu sama lain serta peran pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi.

B. Macam-Macam Sistem Perekonomian

Pada sistem perekonomian di berbagai Negara dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam dimana perbedaannya berdasarkan sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi, keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetensi satu sama lain serta mengenai kadar peranan pemerintahan dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya. Beberapa jenis sistem perekonomian yang ada di dunia. Berikut beberapa diantaranya:

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang dalam organisasi kehidupan ekonominya berdasarkan suatu kebiasaan, tradisi masyarakat yang secara turun-temurun yang

mengandalkan suatu faktor produksi apa adanya. Dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi tradisional merupakan sistem paling konvensional dengan dua elemen utama didalamnya yaitu menghargai tradisi dan minimnya jumlah limbah yang dihasilkan. Sistem ekonomi tradisional sendiri juga identik diterapkan di masyarakat pedesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Ciri-cirinya adalah tidak adanya pembagian kerja yang jelas, sistem ini masih bergantung pada sektor pertanian atau agraris, mempunyai ikatan kekeluargaan serta teknologi produksinya masih sederhana.

Cara transaksi yang digunakan untuk sistem tradisional ini dapat dengan cara bertukar barang sebab hasil dari alam dan tenaga manusia adalah modal utama di masyarakat saat itu. Dalam sistem ekonomi tradisional Pemerintah tidak berhubungan langsung dalam aktivitas ekonomi, ia hanya berperan sebagai penjaga ketertiban. Maka tujuan utama sistem ekonomi ini sendiri hanya sampai kepada kebutuhan hidup sehari-hari masyarakatnya yang terpenuhi bukan mencari keuntungan.

2. Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi komando merupakan sistem yang terpusat dan terdominasi. Sebagian besar sistemnya akan dikendalikan oleh pemerintah yang terlibat dalam proses produksi mulai dari peralatan hingga ke fasilitasnya. Faktor dominasi sendiri jelas terlihat pada sumber daya berharga, karena sesuatu yang mampu menghasilkan keuntungan terbesar akan dikuasai oleh pemerintah dan sumber daya lainnya akan dikelola oleh rakyat.

Sistem ekonomi komando juga sering digunakan untuk menggambarkan sistem ekonomi mengenai barang-barang dimiliki secara bersama sama dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan anggota masyarakat. Artinya bahwa sistem ekonomi komando merupakan suatu sistem perekonomian pemerintah yang berperan sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian.

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi campuran atau dikenal juga dengan istilah *dual economy* karena mengkombinasikan sistem ekonomi pasar dan komando. Hasilnya pemerintah dan pasar kemudian bekerja sama dalam mengelola sumber daya yang ada. Pemerintah mengakui hak milik perorangan dengan catatan tidak merugikan kepentingan umum. Sistem ini juga merupakan adalah suatu sistem ekonomi yang menggabungkan dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Dalam sistem ini, pemerintah dan pasar sama-sama memiliki peran dalam mengatur alokasi sumber daya dan distribusi barang dan jasa. Sistem ekonomi campuran juga dapat melindungi kepemilikan pribadi dan memberikan tingkat kebebasan ekonomi dalam penggunaan modal, namun juga memungkinkan pemerintah untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan sosial.

Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yaitu adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur mengenai kegiatan ekonomi namun tidak dominan, adanya keberadaan dari swasta diakui sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan kegiatan perekonomian, adanya persaingan serta usaha di perbolehkan namun dapat melalui pengawasan pemerintah dan tidak merugikan masyarakat.

4. Sistem Ekonomi Sosialis

Pengertian dari sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi (pekerja, pengusaha, modal dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat tapi pengelolaannya diatur oleh negara secara penuh). Pemerintah juga berperan penuh dalam mengatur distribusi serta hasil produksi. Sistem ekonomi sosialis dapat dibidang menjadi kebalikan dari kapitalis. Jika di kapitalis pemerintah tidak dapat ikut campur, maka keterbalikan dengan sosialis. Jadi, sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya diatur langsung oleh

pemerintah. Dalam sistem ini pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan perekonomian sepenuhnya. Sistem ekonomi sosialis ini disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat karena memang diatur langsung oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah tidak hanya menjadi fasilitator, tetapi juga akan mengatur dengan kebijakan ekonomi. Selain itu, sistem ekonomi sosialis menerapkan asas kepemilikan bersama.

5. Sistem Ekonomi Pasar

Sistem ekonomi sosialis dapat dibalik menjadi kebalikan dari kapitalis. Jika di kapitalis pemerintah tidak dapat ikut campur, maka keterbalikan dengan sosialis. Jadi, sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah. Dalam sistem ini pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan perekonomian sepenuhnya. Sistem ekonomi sosialis ini disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat karena memang diatur langsung oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah tidak hanya menjadi fasilitator, tetapi juga akan mengatur dengan kebijakan ekonomi. Selain itu, sistem ekonomi sosialis menerapkan asas kepemilikan bersama.

Ciri-ciri sistem pasar yaitu hak milik pribadi, adanya kebebasan berusaha serta kebebasan memilih, motif kepentingan diri sendiri, adanya persaingan bebas, untuk harga ditentukan oleh mekanisme pasar serta adanya peran pemerintah secara terbatas. Dalam sistem ekonomi pasar, pemerintah tidak memiliki peran, semua sistem perekonomian diserahkan kepada individu pelaku perekonomian. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi pasar hanya dalam bentuk memberikan aturan hukum. Tanpa adanya dukungan hukum terutama hukum ekonomi, sistem pemerintah pasar tidak akan berjalan utuh.

6. Sistem Ekonomi Liberal

Definisi sistem ekonomi liberal adalah sebuah sistem ekonomi yang di mana semua anggota masyarakat diberikan kebebasan oleh negara untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Karena itu sistem ekonomi ini disebut dengan istilah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi liberal dapat dikatakan sistem ekonomi yang lebih mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pengusaha akan selalu berusaha untuk selalu produktif agar keuntungan tetap terjaga. Filsafat atau ideologi yang menjadi landasan kepada sistem ekonomi liberal adalah setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberikan adanya kebebasan melakukan kegiatan yang akan memberikan keuntungan kepada dirinya, maka pada waktu yang sama masyarakat akan memperoleh keuntungan juga. Maka setiap orang akan bebas bersaing dengan orang lain dalam bidang ekonomi.

Sistem ekonomi liberal dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi yang memberikan kebebasan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip sistem ekonomi liberal ini adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan orang lain. Ciri-ciri sistem ekonomi tersebut yaitu mengenai harga akan dibentuk di pasar bebas, adanya kebebasan dalam berusaha serta bersaing, campur tangan pihak pemerintah sangat terbatas, bebas mempunyai alat produksi sendiri serta segala kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keuntungan.

7. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Definisi dari sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Artinya bahwa semua kegiatan ekonomi di bawah kendali setiap anggota masyarakat, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan anggota masyarakat menjadi hal yang utama. Karena itu, sistem ekonomi ini sering disebut juga dengan nama ekonomi pancasila. Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan antara lain: bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat; memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup; mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja; adanya

perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

C. Sistem Ekonomi di Indonesia

Indonesia Pada tahun 1950-an, menganut sistem ekonomi liberal hingga paham komunisme masuk ke tanah air dan ekonomi kemudian berubah lagi menjadi ekonomi sistem sosialis. Selanjutnya dari masa orde lama berganti dengan pemerintahan orde baru, bentuk perekonomian diubah lagi menjadi sistem demokrasi ekonomi karena dianggap lebih sesuai dengan citra diri Indonesia. Pada masa orde reformasi bergulir, perekonomian Indonesia berganti lagi menjadi sistem ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi kerakyatan masuk ke dalam jenis sistem yang campuran. Hingga saat ini Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan pengembangan dari sistem campuran. Sistem ekonomi Indonesia pada saat ini menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan campuran antara ekonomi pasar dan ekonomi terpusat yang diatur oleh pemerintah.

Pada dasarnya, Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang memberikan peran kepada pasar untuk menentukan alokasi sumber daya ekonomi, namun dengan intervensi pemerintah untuk mengatur sektor-sektor vital dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta pemerataan pertumbuhan. Pada landasan sistem ekonomi Indonesia sendiri adalah Pancasila dan UUD 1945 yang berasas kekeluargaan dan gotong royong dari, oleh, dan dan untuk rakyat di bawah kepemimpinan dan pengawasan pemerintah. Negara menguasai faktor produksi yang strategis dan menyangkut kepentingan rakyat banyak. Sistem ekonomi Pancasila adalah konsep ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu falsafah dasar yang menjadi panduan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta antara sektor swasta dan sektor publik. Ekonomi Pancasila mempunyai prinsip menuntut adanya distribusi yang adil

dan merata dari hasil-hasil produksi, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, implementasi sistem ekonomi di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 yang mengatur kepemilikan usaha strategis dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi, sistem ekonomi Pancasila juga dapat mengakui peran penting sektor swasta dalam menggerakkan perekonomian, dan dapat memberikan perlindungan serta dukungan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah. Maka sistem ekonomi Pancasila tentunya tujuan adalah untuk dapat menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, serta antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Karakteristik sistem ekonomi di Indonesia, diantaranya:

1. Pada aktivitas ekonomi dianggap sebagai kegiatan bersama dengan mengedepankan adanya unsur kekeluargaan atau gotong-royong.
2. Cabang dari produksi yang dinilai strategis sekaligus dinilai berpengaruh besar kepada hajat hidup rakyat. Maka cabang tersebut harus dikuasai atau dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya.
3. Menerapkan prinsip mengenai wawasan lingkungan serta berkelanjutan untuk seluruh kegiatan ekonomi.
4. Pemerintah selalu melakukan pengawasan kepada setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta. Hal tersebut bertujuan supaya tidak terjadi praktek kecurangan, seperti: mafia perdagangan, monopoli, hingga penipuan. Dengan begitu, akan tercipta unsur keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada Pancasila yaitu lima sila Pancasila, dalam penerapannya dijadikan dasar untuk membentuk mekanisme dalam kegiatan ekonomi. Pembentukan ini akhirnya melahirkan lima prinsip yang sejalan dengan ideologi Pancasila, antara lain:

1. Penggerakan mengenai roda pemerintahan yang adanya dorongan ekonomi.

2. Dapat mewujudkan pemerataan sosial agar tidak terjadi ketimpangan.
3. Pembuatan adanya kebijakan nasionalis agar roda ekonomi tetap tangguh.
4. Mengenai demokrasi dan koperasi sebagai ujung tombak perekonomian.
5. Adanya perencanaan yangimbang di tingkat nasional maupun daerah.

Pada kelima dari prinsip sistem ekonomi Pancasila ini , tentunya bertujuan untuk dapat mengatur sertab menjaga roda perekonomian Indonesia tetap stabil. Pada dasar filosofis sistem ekonomi di Indonesia adalah Pancasila, sementara dasar konstitusionalnya diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23, 27, 33, dan 34. Artinya sistem ekonomi Indonesia diarahkan oleh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (mengutamakan etika dan moralitas agama); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tanpa pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (dengan menekankan kebersamaan, prinsip kekeluargaan, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi dalam bidang ekonomi); Kerakyatan (yang menekankan pada kehidupan ekonomi masyarakat serta kebutuhan dasar banyak orang); dan Keadilan Sosial (yang menekankan kesetaraan, dengan kemakmuran masyarakat sebagai hal yang utama dan bukan hanya bagi individu). Keberadaan keadilan menjadi hal yang sangat penting dalam sistem ekonomi Indonesia berdasarkan poin-poin di atas. Keadilan berfungsi sebagai titik awal, proses berjalan, dan juga tujuan akhirnya.

BAB 5
**KEBIJAKAN EKONOMI
INDONESIA**

Kebijakan ekonomi menjadi instrumen strategis bagi Indonesia dalam mengarahkan pembangunan sosial dan ekonomi, dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi, kebutuhan masyarakat, dan dinamika global. Pemerintah merumuskan kebijakan ini untuk mencapai tiga tujuan utama: stabilitas ekonomi, pertumbuhan inklusif, dan pemerataan kesejahteraan. Sebagai negara yang berlimpah sumber daya alam, Indonesia menghadapi tantangan yang khas yang memerlukan perhatian khusus terhadap pengelolaan fiskal, kebijakan moneter, serta sektor-sektor strategis seperti industri, perdagangan, pertanian, dan lingkungan hidup. Hal ini penting mengingat besarnya potensi masing-masing sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mengingat berbagai sumber daya yang tersedia, strategi kebijakan harus dapat memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya tersebut tidak hanya memberikan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi juga tidak merugikan lingkungan serta masyarakat di masa mendatang. Selain itu, tantangan distribusi kekayaan juga menjadi fokus utama. Ketidakmerataan ekonomi sering kali menimbulkan kesenjangan sosial yang berpotensi memicu ketidakstabilan, sehingga upaya untuk merumuskan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan perlu diperkuat.

Dalam konteks ini, Perumusan kebijakan ekonomi yang responsif dan adaptif sangat penting. Koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan langkah upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Pembaca akan memahami kebijakan ekonomi di Indonesia dan dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Pembahasan mencakup sejarah kebijakan ekonomi, kebijakan makroekonomi, serta tantangan dan peluang bagi pemerintah. Dengan pemahaman ini, diharapkan pembaca bisa melihat bagaimana kebijakan ini membentuk masa depan ekonomi Indonesia.

A. Definisi & Tujuan Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi merupakan serangkaian tindakan, keputusan, atau strategi yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur, mengelola, serta memengaruhi dinamika perekonomian suatu negara. Kebijakan ini dirumuskan agar pemerintah dapat merespons berbagai tantangan ekonomi, seperti inflasi, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan ketidakseimbangan dalam perdagangan internasional. Kebijakan ekonomi dilaksanakan untuk mewujudkan ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

Secara umum, tujuan dari kebijakan ekonomi meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, pengurangan tingkat pengangguran, pemeliharaan stabilitas harga atau pengendalian inflasi, penciptaan pemerataan distribusi pendapatan, serta pemeliharaan keseimbangan neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, kebijakan ekonomi mencakup berbagai bidang penting, antara lain kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan perpajakan, kebijakan moneter yang menyangkut pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga oleh bank sentral, kebijakan perdagangan yang mencakup peraturan mengenai ekspor dan impor, serta kebijakan sektor riil yang berkaitan dengan industri, investasi, dan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, kebijakan ekonomi dapat dianggap sebagai instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan aktivitas ekonomi nasional menuju kondisi yang lebih baik. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong terciptanya iklim ekonomi yang mendukung pertumbuhan usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan yang merata antara berbagai wilayah dan kelompok sosial. Selain itu, kebijakan ekonomi memiliki karakter dinamis, yang berarti bahwa kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi global maupun domestik yang senantiasa berubah seiring berjalannya waktu.

B. Sejarah Kebijakan Ekonomi di Indonesia

1. Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru

Masa orde baru dimulai setelah penggulingan Presiden Soekarno pada tahun 1966, Indonesia saat itu mengalami perubahan mendasar dalam kebijakan ekonominya. Latar belakang transisi ini adalah stabilitas politik yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang hancur akibat krisis pada dekade sebelumnya. Kebijakan ekonomi di periode ini berfokus pada pembangunan yang berorientasi pada stabilitas, dengan dilakukan penerapan program-program stabilisasi untuk mengendalikan inflasi dan menarik kembali kepercayaan investor. Melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), pemerintah berupaya untuk memprioritaskan pada sektor pertanian dan industri. Program intensifikasi pertanian dilaksanakan dengan tujuan swasembada pangan, sementara pengembangan sektor industri didorong melalui kebijakan investasi dalam negeri dan luar negeri.

Pengaturan kebijakan moneter dan fiskal juga menjadi fokus paling utama, yang tercermin melalui pengendalian suku bunga dan upaya mengurangi defisit anggaran. Pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan untuk mendukung industrialisasi dan mobilitas ekonomi, di mana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan strategis dalam pelaksanaan proyek-proyek berskala besar. Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, kebijakan yang dilaksanakan tersebut menuai kritik terkait ketidakmerataan yang diperparah oleh kesenjangan sosial dan dampak lingkungan. Akhirnya, Masa Orde Baru berakhir seiring dengan terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997–1998, saat itu mengguncang stabilitas ekonomi dan politik Indonesia, yang memicu reformasi dan perubahan arah kebijakan ekonomi Indonesia.

2. Perubahan Kebijakan Setelah Reformasi

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam arah kebijakan ekonomi Indonesia. Perubahan ini muncul

sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi selama masa era Orde Baru, termasuk krisis ekonomi yang parah dan tuntutan dari masyarakat untuk transparansi serta akuntabilitas. Salah satu langkah awal pasca-reformasi adalah desentralisasi, di mana pemerintah memberikan otonomi lebih besar kepada daerah agar pengelolaan sumber daya dan anggaran mereka lebih efektif. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan mempercepat pemerataan ekonomi. Hemat Biaya: Dibandingkan dengan metode periklanan tradisional, pemasaran digital menawarkan pilihan yang terjangkau. Baik itu iklan bayar per klik, kampanye media sosial, atau pemasaran email, bisnis dapat mengoptimalkan upaya pemasaran mereka sesuai anggaran yang ditetapkan.

Selanjutnya, reformasi struktural diterapkan dengan fokus pada stabilitas makroekonomi, meningkatkan transparansi keuangan, dan memperbaiki sistem perbankan yang sempat terpuruk. Pemerintah juga mengupayakan perbaikannya dalam regulasi investasi, dengan memberikan insentif untuk membuat daya tarik investor asing serta mendorong pertumbuhan sektor swasta. Di bidang industri, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi, dengan penekanan pada pengembangan teknologi dan penelitian.

Reformasi kebijakan sosial turut diimplementasikan, termasuk dalam mengupaya mengurangi kemiskinan dan memperluas akses pendidikan serta layanan kesehatan bagi masyarakat. Meskipun demikian, tentu tantangan tetap ada yaitu ketidakmerataan tetap marak, dan isu korupsi serta investasi yang kurang merata masih menjadi hambatan bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, perubahan kebijakan setelah reformasi mencerminkan upaya Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika global.

3. Kebijakan dalam konteks Globalisasi dan Krisis Ekonomi

Dalam konteks globalisasi, kebijakan ekonomi memegang peranan penting untuk memastikan negara dapat beradaptasi dengan

tantangan dan peluang yang muncul akibat integrasi ekonomi dunia. Globalisasi mendorong negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional, menarik investasi asing, dan mengadopsi teknologi baru. Kebijakan ekonomi perlu dirancang agar mampu meningkatkan daya saing ekspor sekaligus memenuhi standar internasional, seperti peraturan dari World Trade Organization (WTO). Di sisi lain, ketergantungan antarnegara yang semakin meningkat juga membawa risiko, terutama ketika terjadi gejolak ekonomi global.

Namun, globalisasi juga membawa risiko, khususnya ketika terjadi krisis ekonomi seperti krisis Asia 1997–1998 dan krisis global 2008. Indonesia merespons kondisi krisis dengan mengadopsi langkah-langkah kebijakan fiskal, seperti pengurangan belanja negara dan pengendalian defisit anggaran. Kebijakan moneter digunakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah serta menjaga inflasi tetap terkendali. Di era tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan cadangan devisa dan memperkuat sektor perbankan guna menghadapi dampak dari fluktuasi ekonomi global.

C. Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan ekonomi makro merupakan serangkaian tindakan strategis yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas moneter guna mengatur sistem ekonomi secara menyeluruh. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai berbagai target, seperti pertumbuhan ekonomi yang konsisten, kestabilan harga, keseimbangan dalam neraca pembayaran, serta penyediaan lapangan kerja. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga alat utama yang diterapkan secara terpadu, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta pengelolaan inflasi dan nilai tukar.

1. Kebijakan Fiskal: Pengeluaran dan Pendapatan Negara

Kebijakan Fiskal merupakan instrumen ekonomi pemerintah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara demi mencapai stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi.

a. **Pendapatan Negara**

Pendapatan negara merupakan seluruh penerimaan yang masuk ke kas negara dari berbagai sumber dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pendapatan negara terbagi menjadi tiga sumber utama:

- **Penerimaan Perpajakan**

Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, terdiri dari PPh, PPN, bea masuk, dan cukai. Pajak ini bersifat wajib tanpa imbal balik langsung, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan.

- **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Pendapatan negara yang berasal dari selain pajak, seperti hasil pengelolaan sumber daya alam (minyak, gas, mineral), laba BUMN, denda administrasi, dan layanan pemerintah.

- **Hibah**

Merupakan penerimaan yang bersifat sukarela dari pihak dalam atau luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.

b. **Pengeluaran Negara (Belanja Negara)**

Pengeluaran negara adalah semua pengeluaran pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugas negara. Pengeluaran ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pembangunan. Pengeluaran negara terdiri atas:

- **Belanja Pemerintah Pusat**

Digunakan untuk membiayai operasional kementerian/lembaga, pembayaran utang, subsidi, bantuan sosial, serta proyek-proyek Pembangunan nasional.

- **Transfer ke Daerah dan Dana Desa**

Dana yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal.

Pemerintah dapat mengintervensi perekonomian ketika terjadi gejala, seperti inflasi yang tinggi, pengangguran, atau perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan Melalui kebijakan fiskal. Dalam situasi tertentu, kebijakan fiskal dapat bersifat **ekspansif** atau **kontraktif**:

Tabel 5.1 Kebijakan Ekspansif dan Kontraktif

Aspek	Kebijakan Fiskal Ekspansif	Kebijakan Fiskal Kontraktif
Tujuan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong konsumsi dan investasi	Menurunkan inflasi, menyeimbangkan anggaran negara
Kondisi Diterapkan	Saat resesi atau perlambatan ekonomi	Saat ekonomi overheating atau terjadi tekanan inflasi
Cara Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan belanja pemerintah • Menurunkan pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi belanja pemerintah • Menaikkan pajak
Dampak terhadap Perekonomian	Meningkatkan permintaan agregat, membuka lapangan kerja	Menurunkan permintaan agregat, mengurangi tekanan inflasi
Contoh di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Program PEN saat pandemi COVID-19 • BPUM dan bantuan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Kenaikan tarif PPN tahun 2022 • Pengurangan subsidi energi

Kebijakan fiskal juga berperan dalam pemerataan pendapatan melalui program sosial, seperti bantuan langsung tunai, subsidi, serta pembiayaan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, dari penerimaan negara, sistem perpajakan progresif juga menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat.

Dalam praktiknya, efektivitas kebijakan fiskal sangat tergantung pada kapasitas institusi fiskal, keakuratan perencanaan anggaran, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan fiskal memerlukan dukungan sistem penganggaran yang kredibel dan partisipasi publik dalam pengawasan keuangan negara.

2. Kebijakan moneter: peran Bank Indonesia

Kebijakan yang dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral untuk mencapai dan memelihara stabilitasi nilai rupiah, yang terdiri dari kestabilan harga barang dan jasa (inflasi) serta nilai tukar rupiah. Kebijakan ini diterapkan dengan mengontrol JUB dan menetapkan suku bunganya, untuk memastikan perekonomian tetap stabil dan berkembang secara berkelanjutan. Peran utama Bank Indonesia dalam kebijakan moneter antara lain:

a. Menetapkan Suku Bunga Acuan (BI-Rate):

Digunakan sebagai panduan bagi suku bunga di pasar keuangan. Saat Bank Indonesia menurunkan suku bunga, biaya pinjaman menjadi lebih rendah, pada itu mendorong peningkatan konsumsi dan investasi di sektor-sektor ekonomi. Sebaliknya, jika suku bunga dinaikkan, masyarakat cenderung menabung lebih banyak sehingga tekanan inflasi bisa ditekan. Instrumen ini menjadi alat penting dalam menjaga stabilitas inflasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

b. Melakukan Operasi Pasar Terbuka (OPT):

Bank Indonesia membuat kebijakan yang dilakukan melalui kegiatan jual beli surat berharga pada pasar uang demi mengatur jumlah uang yang beredar. Saat mengurangi likuiditas, BI akan menjualkan surat berharga agar dana masyarakat terserap. Sebaliknya, jika ingin menambah likuiditas, BI membeli surat berharga agar uang kembali mengalir ke masyarakat. Tujuan utama OPT adalah

mengendalikan JUB dan menjaga stabilitas suku bunga dalam jangka pendek.

- c. Menetapkan Giro Wajib Minimum (GWM):
Ketentuan jumlah minimum dana yang harus disimpan bank di BI. Instrumen ini digunakan untuk mengatur likuiditas di sistem perbankan. Ketika BI menaikkan GWM, kemampuan bank dalam menyalurkan kredit menurun sehingga uang beredar berkurang. Sebaliknya, penurunan GWM memungkinkan bank memberikan kredit lebih leluasa, yang berdampak pada peningkatan jumlah uang beredar. Dengan demikian, GWM menjadi alat penting untuk menjaga untuk tetap stabil dan efisiensi sistem keuangan.
- d. Intervensi di Pasar Valuta Asing:
BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui pembelian atau penjualan valuta asing bila diperlukan, untuk menghadapi gejolak pasar global. Jika terjadi gejolak nilai tukar, Bank Indonesia bisa melakukan intervensi pada pasar valuta asing dengan cara melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing, khususnya dolar AS. Tujuan dari intervensi ini tujuannya menstabilkan nilai tukar rupiah, terutama saat terjadi tekanan eksternal seperti capital outflow besar-besaran. Kebijakan ini bersifat pelengkap dan digunakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar tanpa mengganggu fundamental ekonomi nasional.

Melalui instrumen-instrumen tersebut, Bank Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas inflasi yang rendah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memastikan sistem keuangan berjalan dengan sehat dan efisien.

D. Kebijakan Ekonomi Sektor

Kebijakan ekonomi sektor merupakan strategi yang dirancang oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan pada sektor-sektor tertentu dalam perekonomian, seperti pertanian,

industri, dan perdagangan. Pendekatan ini diterapkan untuk mengatasi berbagai hambatan sektoral, meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Kebijakan sektoral juga penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif.

Pada masing-masing sektor memiliki karakteristik, tantangan, dan peluang tentu berbeda, sehingga kebijakan yang diterapkan pun disesuaikan. Melalui kebijakan ekonomi sektoral yang terintegrasi, pemerintah berupaya menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh, mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah, serta mendorong transformasi ekonomi menuju basis industri dan jasa yang berdaya saing tinggi. Kebijakan ini juga menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang seperti yang tertuang dalam RPJMN dan Visi Indonesia Emas 2045.

Tiga Sektor Utama Pertumbuhan Ekonomi

1. Kebijakan Pertanian

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian dalam negeri agar mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri tanpa bergantung pada impor. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah mendorong swasembada pangan melalui peningkatan produktivitas lahan dan efisiensi sistem distribusi. Pemerintah juga memberikan subsidi dan insentif kepada petani, seperti pupuk bersubsidi, benih unggul, serta bantuan alat dan mesin pertanian, guna menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen. Selain itu, dukungan untuk petani juga dilakukan melalui penyediaan akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian, program pelatihan untuk peningkatan keterampilan, serta perlindungan harga agar petani tidak mengalami kerugian saat harga pasar anjlok. Dengan kebijakan ini, sektor pertanian diharapkan menjadi lebih tangguh, berdaya saing, dan mampu menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional.

2. Kebijakan Industri

Fokus utama dari kebijakan ini adalah mendorong pengembangan industri dalam negeri melalui pemberian insentif kepada sektor-sektor strategis seperti manufaktur, Pelaksanaan program hilirisasi sumber daya alam bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus mendorong peningkatan penggunaannya. dan penguasaan teknologi dalam proses produksi. Selain itu, pemerintah juga mendorong investasi asing melalui kebijakan pembukaan penanaman modal asing (PMA) yang disertai dengan penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, serta pembangunan kawasan industri yang terintegrasi. Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk menarik investor luar negeri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperluas basis produksi domestik, dan memperkuat keterkaitan industri dalam rantai pasok global.

3. Kebijakan Perdagangan

Kebijakan ini merupakan instrumen penting dalam mengatur arus barang dan jasa antarnegara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Salah satu bentuk kebijakannya adalah kebijakan tarif, yaitu penetapan bea masuk terhadap produk impor guna melindungi industri lokal dari persaingan yang tidak sehat. Di samping itu, terdapat juga kebijakan nontarif seperti penerapan regulasi teknis, standar mutu produk, serta persyaratan perizinan ekspor-impor yang bertujuan menjaga kualitas barang dan keamanan konsumen. Pemerintah menjalin perjanjian dagang bilateral dan regional seperti RCEP, CEPA, dan FTA, untuk memperluas pasar produk Indonesia dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara mitra.

E. Kebijakan Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan

Kebijakan ekonomi pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan strategis yang diterapkan pemerintah dalam merancang pembangunan jangka panjang yang tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengutamakan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Esensinya adalah bagaimana pembangunan saat ini dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebijakan ini sangat perlu untuk mengatasi tantangan global yang kita hadapi, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, dan keterbatasan sumber daya alam, memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan nasional dan daerah agar pembangunan tidak bersifat eksploitatif dan jangka pendek, melainkan inklusif, berkeadilan, dan lestari.

Selain itu, kebijakan ini menjadi fondasi utama dalam perumusan berbagai program dan inisiatif pembangunan yang mendukung terwujudnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan agar pembangunan tidak hanya mengutamakan hasil jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi acuan dalam menyusun arah pembangunan yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Tiga Pilar Utama dalam Pembangunan Berkelanjutan

1. Aspek Ekonomi

Aspek Ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan

berkeadilan tanpa mengorbankan aspek sosial maupun lingkungan. Tujuan utamanya adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong peningkatan produktivitas, penguatan daya saing, serta pemerataan hasil pembangunan.

Dalam praktiknya, aspek ekonomi ini diwujudkan dengan investasi pada berbagai sektor strategis yaitu infrastruktur, industri ramah lingkungan, pertanian berkelanjutan, dan teknologi inovatif. Pemerintah juga mendorong kewirausahaan dan kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar ekonomi dapat tumbuh dari berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan memastikan distribusi sumber daya yang adil. Semua ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.

2. Aspek Sosisl

Aspek sosial memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh semua lapisan masyarakat. Aspek ini bukan hanya berfokus pertumbuhan ekonomi, selain itu juga fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, keadilan sosial, dan inklusivitas. Artinya, pembangunan harus memberikan manfaat bagi semua orang tanpa diskriminasi, serta menghormati dan melindungi hak-hak dasar manusia. Peningkatan kesejahteraan sosial mencakup berbagai aspek, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. serta penciptaan lapangan kerja yang layak. Tujuan akhirnya adalah membangun masyarakat yang sehat secara fisik dan mental, memiliki kesempatan yang setara, dan hidup dalam lingkungan sosial yang aman, adil, serta mendukung perkembangan individu maupun komunitas.

3. Aspek Lingkungan

Aspek Lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan merupakan pilar penting yang menekankan pada pelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya alam dan ekosistem untuk memastikan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks ini, pembangunan tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak atau mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan, melainkan harus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian.

Upaya yang dilakukan dalam aspek lingkungan meliputi penurunan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah yang efisien, konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan, serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Tujuannya adalah agar SDA tetap tersedia bagi generasi saat ini tanpa mengorbankan hak-hak generasi selanjutnya untuk mendapatkan manfaat yang sama. Aspek ini juga mendorong transisi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon sebagai bagian dari komitmen global terhadap pembangunan yang ramah lingkungan.

Implementasi Kebijakan dan Keterkaitannya dengan SDGs

Kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia diterapkan melalui berbagai instrumen perencanaan dan penganggaran nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, hingga ke tingkat daerah melalui RPJMD. Dalam kebijakan fiskal, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung keberlanjutan, seperti pembangunan infrastruktur hijau, energi terbarukan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Sementara itu, kebijakan moneter dari Bank Indonesia mendukung stabilitas makroekonomi yang dibutuhkan untuk menjaga iklim investasi dan pertumbuhan jangka panjang.

Implementasi kebijakan ini berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal yang dilaksanakan saat ini, pengentasan kemiskinan mendukung SDG 1, peningkatan

layanan pendidikan dan kesehatan terkait dengan SDG 3 dan 4, serta pengendalian perubahan iklim mendukung SDG 13. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan sejalan dengan SDG 9, dan penguatan kerja sama global mencerminkan SDG 17. Melalui pendekatan holistik, Indonesia memastikan pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

BAB 6

**ISU-ISU KONTEMPORER
SEKTOR PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Pertanian merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional. Pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan kebutuhan pangan, menyerap tenaga kerja, dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurut Luthfi Muta'ali (2018), sektor pertanian tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi. Sektor ini turut memiliki dimensi spasial yang signifikan dalam penguatan wilayah pedesaan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Sektor pertanian telah menyerap lebih dari 28% tenaga kerja nasional, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan prasyarat bagi tercapainya stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks dengan adanya krisis pangan yang menjadi isu global dan nasional. Menurut FAO (2020), pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi ketahanan pangan dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini diperkuat dalam laporan Krisis Pangan di Indonesia (2022), yang menyebutkan bahwa gangguan logistik, penurunan daya beli, dan kerentanan petani kecil telah menyebabkan ancaman nyata terhadap ketersediaan dan akses pangan. Isu krisis pangan tidak hanya terlihat dalam kuantitasnya, melainkan juga dalam keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah tekanan ekonomi dan ekologis. Oleh sebab itu, penting untuk memahami bahwa krisis pangan bukanlah peristiwa sementara, melainkan gejala dari persoalan struktural pembangunan sektor pertanian.

Bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membahas isu-isu kontemporer yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia. Hal ini akan membawa kita pada evaluasi kebijakan-kebijakan responsif yang telah dan sedang diterapkan. Fokus pembahasan pada bab ini mencakup tantangan ekologis, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi produktivitas dan ketahanan pangan nasional. Menurut Purwadinata & Batilmurik (2022), pembangunan pertanian di era globalisasi membutuhkan pendekatan integratif yang mempertimbangkan dinamika lokal dan tekanan global secara

bersamaan. Di sisi lain, *Policy Brief* milik Kementerian Pertanian pada tahun 2019 turut menekankan pentingnya transformasi pertanian menuju sistem yang modern, efisien, dan inklusif untuk menghadapi tantangan jangka panjang. Diharapkan pembahasan pada bab ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi sektor pertanian sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan ketahanan pangan Indonesia saat ini.



Gambar 6.1 Sektor Pertanian Indonesia

A. Peran Strategis Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan wilayah di Indonesia dari sisi ekonomi, sosial, maupun spasial. Pertanian menjadi motor penggerak pembangunan wilayah yang berfungsi untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah melalui optimalisasi sumber daya lokal (Muta'ali, 2018). Wilayah perdesaan merupakan lokasi utama aktivitas pertanian yang berperan sebagai basis penting bagi perluasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

di luar kota. Dengan peranan tersebut, penguatan sektor pertanian tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan pemerataan pembangunan secara nasional.

Peran pertanian dalam kehidupan wilayah pedesaan terlihat dari kemampuan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendukung keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Selain itu, sektor ini juga menjadi penghubung penting bagi sektor industri makanan, pengolahan hasil pertanian, hingga distribusi logistik. Ketika sektor pertanian tumbuh, maka permintaan terhadap jasa pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan ikut meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini akan menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi di wilayah yang sebelumnya hanya mengandalkan kegiatan primer. Maka dari itu, sektor pertanian merupakan salah satu pilar terpenting dalam upaya pemerintah menciptakan system perekonomian yang maju, mandiri, dan modern (Kementerian Pertanian, 2019).

Rajagukguk (2021) menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia masih cukup signifikan, terutama di luar wilayah metropolitan. Rajagukguk menunjukkan bahwa bahwa peningkatan kredit pertanian, jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian, serta alokasi belanja pemerintah untuk fungsi pertanian berkorelasi positif terhadap kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini berarti penguatan sektor pertanian dapat menjadi strategi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, akses terhadap air bersih dan tingkat literasi juga terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang menegaskan bahwa pentingnya peranan pembangunan wilayah berbasis sektor pertanian terpadu.

Dalam masa globalisasi dan perubahan struktur ekonomi, sektor pertanian sering dipandang kurang menarik, terutama bagi kalangan muda, dikarenakan oleh rendahnya nilai tambah dan marginalisasi

bagi para petani kecil. Pandangan ini perlu dikaji ulang sebab pertanian modern memiliki potensi besar untuk menciptakan nilai ekonomi baru jika dikembangkan melalui pendekatan berbasis inovasi dan teknologi. Salah satu strategi yang perlu ditempuh adalah mengintegrasikan pertanian dengan sektor lain melalui hilirisasi, agribisnis, dan diversifikasi produk berbasis lokalitas wilayah. Dengan demikian, pembangunan wilayah berbasis pertanian tidak lagi semata-mata bersifat tradisional, melainkan adaptif terhadap perkembangan ekonomi global (Purwadinata & Batilmurik, 2022)

Sektor pertanian juga memainkan peran strategis dalam mengendalikan laju urbanisasi berlebihan. Ketika sektor pertanian di pedesaan berkembang dengan baik, masyarakat tidak akan terdorong untuk melakukan migrasi ke kota-kota besar dalam mencari pekerjaan. Hal ini berdampak pada pengurangan tekanan terhadap infrastruktur kota dan menjaga keseimbangan demografis. Menurut Luthfi Muta'ali (2018), pembangunan pertanian yang berbasis keruangan (spasial) tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan wilayah yang berkeadilan. Oleh karena itu, pembangunan wilayah melalui pendekatan sektor pertanian bukan hanya penting, tetapi juga sangat relevan dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

B. Tantangan Kontemporer Sektor Pertanian di Indonesia

Salah satu tantangan yang paling krusial pada sektor pertanian saat ini adalah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, serta perubahan musim tanam secara ekstrem telah mengganggu pola produksi dan ketahanan pangan nasional. Menurut Hamada (2024), dampak ekologi dari eksploitasi lahan yang berlebihan, penggunaan pestisida kimia, serta deforestasi semakin mempercepat degradasi ekosistem pertanian. Hal ini diperkuat dengan laporan Krisis Pangan di

Indonesia pada tahun 2022 yang menegaskan bahwa krisis ekologi berkaitan langsung dengan kerentanan akses pangan masyarakat miskin, terutama di daerah terpencil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan mekanisme pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan sangatlah krusial untuk diberikan kepada para petani Indonesia.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman turut memperburuk keberlangsungan sektor pertanian nasional. Proses urbanisasi dan pembangunan infrastruktur secara masif seringkali tidak disertai dengan kebijakan perlindungan lahan produktif. Konversi lahan pertanian menyebabkan terjadinya fragmentasi kepemilikan dan melemahkan basis produksi pangan nasional. Selain itu, hilangnya lahan juga berdampak pada krisis regenerasi petani. Hal ini diakibatkan oleh hilangnya akses bagi generasi muda kehilangan terhadap sumber daya utama produksi. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya mempertahankan ketahanan pangan berbasis lokal (Muta'ali, 2018).

Rendahnya akses terhadap teknologi dan modal juga menjadi hambatan serius bagi petani kecil. Usaha tani yang masih dilakukan secara tradisional dengan sarana produksi yang terbatas menyebabkan produktivitas yang stagnan. Dalam *Policy Brief* Kementerian Pertanian (2019), disebutkan bahwa skala usaha pertanian di Indonesia sebagian besar masih berskala kecil dan tidak terintegrasi. Hal ini mengakibatkan kurang efisiennya ekonomi agrikultural di Indonesia. Hambatan dalam akses pembiayaan seperti sulitnya mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lemahnya kelembagaan petani, turut memperburuk kondisi ini. Akibatnya, para petani mengalami kesulitan untuk berinovasi dan meningkatkan nilai tambah dari hasil pertaniannya.

Tantangan lainnya adalah kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Faktor rendahnya pendapatan, kurangnya insentif ekonomi, serta citra pertanian sebagai pekerjaan berat yang tidak dihargai menjadi alasan utama rendahnya regenerasi petani.

Rahim et al. (2024) menyoroti bahwa tanpa kehadiran generasi muda, produktivitas sektor pertanian akan terus menurun dalam jangka panjang. Padahal sektor pertanian Indonesia memiliki potensi yang amat besar untuk dikembangkan menjadi sektor yang inovatif dan bernilai ekonomi tinggi apabila dikelola dengan pendekatan teknologi dan kewirausahaan. Untuk itu, penting bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk merancang strategi revitalisasi pertanian yang menarik bagi kaum muda

Tantangan kontemporer pertanian juga mencakup struktur ekonomi yang belum sepenuhnya mendukung integrasi sektor ini ke dalam perekonomian nasional. Kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih belum maksimal karena rendahnya konektivitas dengan sektor industri dan perdagangan. Ketiadaan infrastruktur penunjang dan lemahnya akses pasar membuat petani tetap berada dalam lingkaran produksi subsisten. Oleh karena itu, pembangunan pertanian tidak cukup hanya berfokus pada sisi produksi, melainkan juga harus memperkuat seluruh ekosistem pendukung dari hulu hingga hilir. Tanpa pembenahan sistem, sektor pertanian akan terus berada pada posisi rentan terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Afriyanti et al, 2023).

C. Dinamika Ketahanan Pangan di Indonesia

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan pangan saja. Ketahanan pangan turut meliputi akses, distribusi, dan kemampuan rumah tangga dalam memperoleh makanan bergizi secara berkelanjutan. Berbagai faktor seperti luas panen, konsumsi beras, harga pangan, dan jumlah penduduk sangat memengaruhi kondisi produksi pangan nasional. Ketika satu saja dari elemen tersebut terganggu, sistem ketahanan pangan nasional bisa kehilangan stabilitasnya. Oleh karena itu, penguatan sistem pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu (Rahim et al, 2024).

Kondisi pandemi COVID-19 lalu menjadi katalis bagi banyak persoalan dalam sistem pangan Indonesia. Berdasarkan kajian Krisis Pangan di Indonesia (2022), pandemi menyebabkan terhambatnya distribusi pangan, turunnya daya beli masyarakat, dan melemahnya posisi petani kecil akibat pasar yang tidak stabil. Ketergantungan terhadap bahan pangan impor juga meningkatkan kerentanan ketahanan pangan nasional. Dalam situasi darurat, kebijakan pembatasan ekspor dari negara produsen dapat memicu krisis di negara pengimpor seperti Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya strategi jangka panjang untuk memperkuat produksi pangan dalam negeri secara mandiri.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, Afriyanti et al. (2023) menekankan bahwa ketahanan pangan yang kuat harus ditopang oleh produktivitas sektor pertanian yang terus meningkat. Faktor-faktor yang dapat mendukung produktivitas sektor perekonomian adalah penerapan teknologi, pembiayaan, dan inovasi kelembagaan. Namun pada kenyataannya, banyak daerah sentra pertanian di Indonesia belum memiliki akses merata terhadap teknologi modern dan dukungan infrastruktur yang memadai. Hal ini menyebabkan kesenjangan produksi antarwilayah dan ketidakseimbangan distribusi pangan nasional. Upaya memperkuat ketahanan pangan harus memperhitungkan konteks spasial dan sosial dari masing-masing wilayah pertanian.

Ketahanan pangan juga tidak bisa dilepaskan dari faktor ekologi. Degradasi lingkungan dan kerusakan ekosistem akibat eksploitasi pertanian intensif berdampak negatif terhadap produktivitas jangka panjang. Penurunan kualitas tanah, kelangkaan air, dan rusaknya biodiversitas menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan produksi pangan. Maka dari itu, pendekatan ketahanan pangan harus diarahkan pada sistem pertanian berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara produksi dan konservasi. Inovasi seperti pertanian organik, agroekologi, dan praktik ramah lingkungan menjadi pilihan strategis untuk masa depan (Hamada, 2024)

D. Transformasi Kebijakan dan Inovasi dalam Sektor Pertanian di Indonesia

Dalam menjawab berbagai tantangan struktural dan ekologis sektor pertanian, transformasi kebijakan menjadi aspek yang sangat penting. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program seperti KostraTani, *food estate*, dan modernisasi pertanian berbasis teknologi untuk mengatasi keterbatasan produktivitas dan daya saing petani kecil. Dalam Policy Brief Kementerian Pertanian (2019), disebutkan bahwa pembangunan pertanian diarahkan untuk menjadi “*maju, mandiri, dan modern*” melalui mekanisasi, integrasi produksi, dan penguatan kelembagaan petani. Salah satu strategi kunci adalah pengembangan kawasan pertanian terintegrasi dengan pendekatan korporatisasi petani yang didukung infrastruktur dan teknologi. Namun dalam implementasinya, tantangan koordinasi lintas sektor dan kesenjangan kapasitas di tingkat daerah masih menjadi hambatan signifikan.

Program *food estate* yang dijalankan di berbagai provinsi seperti Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara menjadi simbol ambisi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Akan tetapi, kajian Krisis Pangan di Indonesia (2022) menunjukkan bahwa proyek ini menuai kritik terkait keberlanjutan lingkungan, potensi konflik lahan, dan efektivitas sosial-ekonominya. Regenerasi petani juga menjadi isu penting dalam kebijakan ini, mengingat banyaknya generasi muda yang enggan terlibat dalam sektor pertanian. Oleh karena itu, kebijakan pertanian masa depan harus melibatkan pendekatan partisipatif dan berbasis wilayah agar sesuai dengan kondisi lokal serta kebutuhan sosial masyarakat desa. Tanpa itu, kebijakan cenderung *top-down* dan gagal menjawab realitas struktural di lapangan.

Selain kebijakan, inovasi menjadi komponen penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan daya saing sektor pertanian. Afriyanti et al. (2023) menekankan pentingnya digitalisasi, akses pembiayaan, dan integrasi pasar bagi petani agar dapat

mengembangkan pertanian berbasis nilai tambah. Inovasi teknologi seperti penggunaan sensor tanah, drone, dan sistem pertanian presisi mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menekan kerusakan lingkungan. Namun adopsi inovasi ini masih terbatas karena kurangnya literasi digital dan minimnya dukungan kelembagaan di tingkat desa. Transformasi pertanian harus mencakup penyediaan pelatihan, akses informasi, dan pemberdayaan petani melalui penyuluhan berkelanjutan.

Peran kelembagaan lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi tani menjadi sangat penting. Menurut Muta'ali (2018), keberadaan kelembagaan ini dapat menjadi penghubung antara petani dan akses terhadap pasar, permodalan, dan teknologi. Lembaga-lembaga lokal yang kuat mampu menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan masyarakat desa, sehingga pembangunan pertanian dapat lebih kontekstual dan efektif. Selain itu, literasi keuangan dan penguatan jaringan antar-petani menjadi langkah strategis dalam membangun ketahanan ekonomi rumah tangga tani. Di sinilah inovasi sosial memegang peran besar dalam mendukung inovasi teknologi.

Ke depannya, pembangunan pertanian tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi. Pembangunan pertanian nasional juga harus diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan penyelarasan kebijakan yang holistik. Reformasi sistem pangan harus berlandaskan pada integrasi antara dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial. Dengan kombinasi kebijakan yang adaptif dan inovasi yang relevan, sektor pertanian Indonesia dapat menjadi pilar utama dalam membangun ketahanan pangan dan kesejahteraan wilayah secara berkelanjutan. Transformasi ini hanya mungkin tercapai jika petani, pemerintah, swasta, dan akademisi bekerja dalam sinergi yang saling memperkuat (Rahim et al., 2024)

BAB 7

**ISU-ISU KONTEMPORER
SEKTOR INDUSTRI DAN
MANUFAKTUR**

Sektor industri dan manufaktur merupakan pilar utama dalam perekonomian Indonesia secara khusus yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi perekonomian yakni Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan perkembangan teknologi.

Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah input dalam hal ini bahan baku atau bahan mentah menjadi produksi akhir yang memiliki nilai tambah. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2014, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Dalam perkembangannya, industri mengalami perubahan dengan dimulai penggunaan mesin uap pada abad 18 yakni revolusi industri 1.0 hingga industri 5.0 saat ini.

Manufaktur secara ekonomi merupakan proses kegiatan mengubah bahan baku atau mentah menjadi bentuk yang dapat bernilai jual di pasaran dengan melewati satu atau beberapa proses perakitan. Sektor industri manufaktur sangat penting bagi perekonomian suatu negara yang mana peranan sektor industri manufaktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja meningkatkan ekspor dan meningkatkan investasi (Carolina, 2017). Untuk memahaminya, maka pada bagian ini akan dijelaskan sejarah industri dan konsep manufaktur.

A. Sejarah Perkembangan Industri

Sejarah perkembangan industri ditandai dengan adanya perubahan produksi dari penggunaan tenaga kerja beralih dengan menggunakan mesin yang dikenal dengan Revolusi Industri. Berdasarkan *Ensiklopedia Britannica*, Revolusi industri atau dikenal dengan Revolusi Industri 1.0 pertama kali terjadi tahun 1760 - 1840 atau abad 18 di Inggris yakni proses perubahan dari ekonomi agraris dan kerajinan ke industri mesin yakni mesin uap yang ditemukan oleh James Watt di tahun 1776. Akibatnya masyarakat yang semula agraris beralih menjadi masyarakat industri yang mengakibatkan terjadinya

kelangkaan tenaga kerja yang semula dibutuhkan untuk menjalankan mesin produksi digantikan menjadi mesin uap.

Tahap selanjutnya Revolusi industri 2.0 di akhir tahun 1800 dengan beralihnya tenaga uap menjadi tenaga listrik. Proses produksi dengan menggunakan tenaga listrik memiliki kelemahan karena dilakukan secara paralel yang mana untuk merakit banyak barang misalnya mobil maka diperlukan banyak tenaga kerja secara bersamaan sehingga sistem produksi pada revolusi industri 2.0 dengan terciptanya lini produksi yang menggunakan ban berjalan atau *conveyour belt* untuk memproduksi secara massal. Perubahan industri terus terjadi saat diketemukannya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis yakni komputer dan robot. Era tersebut merupakan revolusi digital atau revolusi industri 3.0.

Pada era revolusi digital, penemuan komputer dan semi konduktor tersebut menggantikan banyak manusia sebagai pengendali lini produksi yang dilakukan secara otomatis akibatnya terjadi kelangkaan penggunaan sumber daya manusia. Revolusi industri 4.0 muncul pada abad 21 yang dikenal juga dengan *cyber physical system* merupakan revolusi penggabungan antara otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi siber (Ustundag and Cevikan, 2018). Revolusi industri 4.0 memunculkan banyak perbaikan dalam sistem manufaktur dan layanan melalui teknologi informasi sehingga menyebabkan peningkatan produktivitas baik dalam sistem layanan maupun lingkungan manufaktur. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi, konsep industri 4.0 makin ditingkatkan menjadi industri 5.0 yang melibatkan integrasi antara teknologi digital dengan dunia fisik dan manusia, Sehingga industri 5.0 melibatkan penggunaan kecerdasan buatan, robotika, *otomisasi internet of things* (ToT) dan teknologi lainnya untuk menciptakan sistem produksi yang lebih cerdas, terhubung antara teknologi dan manusia (Nugroho, dkk. 2023).

B. MANUFAKTUR: Konsep dan Konteks

Proses merubah bahan mentah menjadi bahan jadi melalui tahapan produksi merupakan konsep manufaktur. Manufaktur juga dapat diartikan sebagai aktivitas inti dari suatu perusahaan atau industri manufaktur yang melibatkan penggunaan tenaga kerja, mesin, peralatan dan teknologi yang dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai jual.

Berdasarkan jenisnya, proses manufaktur dapat dibedakan menjadi:

1. *Make to Stock* (MTS)

Merupakan produksi untuk persediaan. Merupakan salah satu proses manufaktur yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mana perusahaan memproduksi barang sebelum adanya pesanan dari konsumen dan didasarkan pada perencanaan permintaan yang sebelumnya telah dibuat. Tujuan utamanya menjaga ketersediaan stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan.

2. *Make to Order* (MTO)

Merupakan proses manufaktur dimana produksi perusahaan dilakukan berdasarkan pesanan yang spesifik dari konsumen. Strategi produksi *make to order* yang memungkinkan adalah konsumen membeli sesuai dengan permintaan mereka. Biasanya jumlah pesanan MTO lebih rendah dari pada MTS.

3. *Make to Assemble* (MTA)

Merupakan proses manufaktur yang merupakan kombinasi antara *make to stock* dan *make to order*. Perusahaan biasanya sudah mempersiapkan persyaratan dasar untuk produksi barang pada tiap produksinya walaupun belum ada permintaan dari konsumen. Produk dimulai dari menunggu data pesanan pelanggan dan sesuai dengan jumlah serta spesifikasinya. MTA memiliki resiko yang mana pelanggan yang memesan produk yang sesuai dengan barang yang sedang melalui proses produksi dapat menerima barang lebih cepat dan mengurangi waktu tunggu. Namun secara

keseluruhan setiap jenis manufaktur memiliki resiko masing-masing.

Menurut *Taxonomy* proses manufakturing (Todd. et all, 1994), maka proses manufaktur dapat didasakan pada modifikasi *Shaping proses* dan *Non shaping proses*.

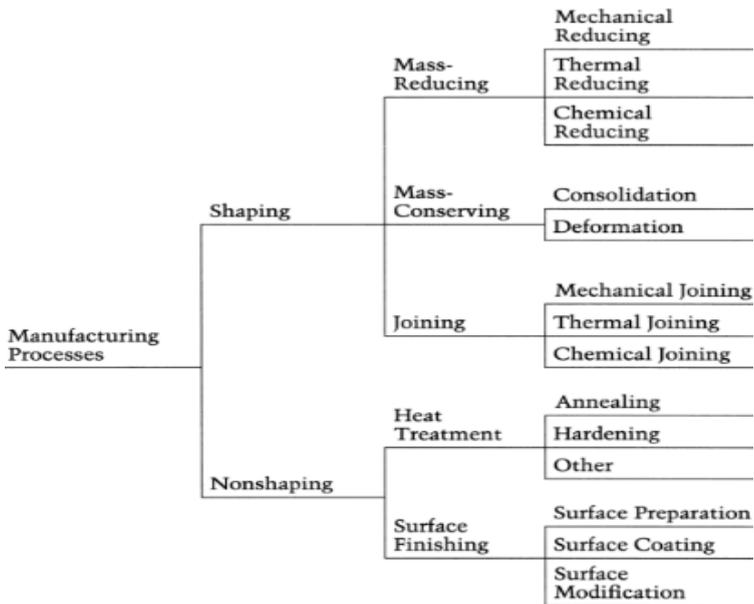
Shaping proses merupakan proses pembentukan material yang melibatkan perubahan bentuk atau ukuran benda sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Shaping proses terdiri dari:

- a) *Mass reducing* yaitu pengurangan massa mencakup penggunaan material yang bermutu misalnya dari kayu ke baja yang memiliki kekuatan tinggi. *Mass reducing* terdiri dari reduksi mekanis, reduksi termal dan reduksi kimia.
- b) *Mass Conserving* meliputi konsolidasi dan deformation.
- c) *Joining* yakni penggabungan beberapa komponen satu produk utuh yang erdiri dari penggabungan mekanik, thermal dan kimia.

Sementara *Non Shaping* proses dalam konteks manufaktur merujuk pada proses yang tidak mengubah bentuk. Proses ini biasanya digunakan untuk memberikan kualitas atau sifat. Sebagai contoh proses finishing yang dapat merubah kualitas suatu produk. Non Shapping terdiri dari:

- a) *Heat treatment* yakni mengubah fisik merkanik dengan cara pemanasan, meliputi: *annealing* dan *hardening*.
- b) *Surface finishing* yakni proses memodifikasi permukaan material untuk meningkatkan karakteristiknya yang meliputi: penmbahan lapisan khusus (coating dan persiapan).

Proses manufakturing tersebut dapat dilihat pada alur gambar 1.1 berikut.



Sumber: Todd et.al, 1994.

Gambar 7.1. Proses Manufaktur

C. Isu-Isu Kontemporer Industri dan Manufaktur

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 oleh BAPPENAS sesuai Visi Indonesia Emas 2045 yakni negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan maka terdapat lima kelompok industri prioritas yakni:

1. Industri yang berbasis sumber daya alam yakni industri berbasis agro (pertanian, perkebunan dan kehutanan), industri berbasis hilirisasi tambang serta industri berbasis sumber daya laut.
2. Industri dasar, mencakup: industri kimia dasar dan industri logam.
3. Industri berteknologi menengah - tinggi, meliputi industri perkapalan, industri kedirgantaraan, industri otomotif dan alat angkut, industri pertahanan, industri alat kesehatan, industri

produk kimia dan farmasi, industri mesin dan perlengkapan, dan industri elektronik.

4. Industri barang konsumsi berkelanjutan, meliputi; industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, dan industri alas kaki.
5. Industri berbasis inovasi dan riset yakni industri berbasis bio dan teknologi.

Adapun isu-isu kontemporer industri manufaktur dapat disebabkan oleh:

1. Tenaga kerja

Pembangunan ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab berat dalam proses pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian suatu negara sangat menentukan capaian pembangunan bidang ketenagakerjaan. Lapangan usaha industri manufaktur kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja menunjukkan trend meningkat sebanyak 1,15 juta orang atau 450 ribu orang per tahun (Rencana Tenaga Kerja Nasional 2025 - 2029, Kemnaker, 2024). Akan tetapi, merujuk pada Indeks Daya Saing Global (*Global Competitive Index*) posisi Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN. Pada tahun 2023, posisi Singapura berada di peringkat ke-4, Thailand di peringkat ke-30, dan Malaysia diperingkat ke-30. Faktor yang perlu mendapatkan perhatian penting pada industri manufaktur adalah rendahnya kualitas tenaga kerja.

2. Gangguan Rantai Pasok

Pengelolaan rantai pasok merupakan faktor yang paling krusial dalam industri manufaktur yang menentukan daya saing di pasar global. Rantai pasok merupakan proses koordinasi dan pengawasan aliran barang, jasa dan informasi, dan keuangan dari pemasok bahan baku hingga produk akhir hingga sampai ke konsumen. Dalam industri manufaktur, rantai pasok mencakup:

- a. pengadaan bahan baku,
- b. manufaktur dan produksi,
- c. distribusi ke pasar atau pelanggan akhir.

Apabila rantai pasok mengalami gangguan maka akan menimbulkan keterlambatan dalam pengiriman barang, sehingga naiknya biaya pengiriman dan akan mempengaruhi efisiensi biaya serta berakibat pada tekanan untuk keberlanjutan permintaan rantai pasok terutama pada industri dalam proses yang lebih hijau (ramah lingkungan).

3. Tekanan Inflasi

Inflasi yang terjadi di negara berkembang adalah inflasi struktural. Teori ini mendasarkan pada argumen bahwa tidak tepat menerapkan model permintaan dan penawaran agregate dalam menjelaskan tingkat inflasi di negara berkembang (Zhang, 2020). Sektor manufaktur rentan terhadap inflasi karena peningkatan inflasi menyebabkan peningkatan biaya produksi. Apabila produktivitas industri manufaktur berkurang maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Apabila negara sedang berkembang mengalami kesulitan dalam mengendalikan inflasi maka negara tersebut akan membatasi pembangunan di sektor manufaktur.

Secara empirik, Badan Kebijakan Fiskal (2025), menjelaskan bahwa aktivitas manufaktur Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada Desember 2024 yang mana berdasarkan *Purchasing Managers Index* (PMI), dinamika sektor manufaktur tujuh kali berada zona ekspansi dan lima kali pada zona kontraksi. PMI Indonesia meningkat dari 49,6 menjadi 51,2 pada Desember 2024.

4. Adopsi Teknologi Baru

Industri manufaktur yang secara tradisional bergantung pada tenaga manusia, saat ini mulai beralih pada sistem otomatisasi yang dapat bekerja dengan presisi tinggi dengan waktu yang lebih cepat. Revolusi industri menimbulkan banyak perbaikan pada sistem manufaktur dan layanan. Sinergi ini muncul dari integritas kemajuan dalam teknologi informasi, layanan dan manufaktur terwujud yang mengakibatkan peningkatan produktivitas baik dalam sistem layanan maupun manufaktur itu sendiri. Industri 4.0

yang pertama kali diumumkan pemerintah Jerman sebagai salah satu inisiatif utama revolusi industri baru menunjukkan sistem yang lebih produktif sehingga industri 4.0 menjadi dasar pengembangan produk cerdas dan proses cerdas (Salkin. C et all, 2018). Dengan adanya industri 4.0 yang lebih produktif dan berkelanjutan, maka perusahaan mencari adaptasi yang tepat sebagai strategi implementasi antara teknologi inti dan pendukung serta prinsip desain untuk pemahaman yang lebih baik antara prinsip desain dan teknologi yang dapat dijelaskan secara terinci.

5. Perubahan iklim

Emisi gas rumah kaca yang memerangkap sinar matahari menyebabkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Adapun salah satu faktor penyebab perubahan iklim akibat adanya aktivitas manusia adalah peningkatan manufaktur (Jayawardana, dkk, 2023). Proses produksi industri dan manufaktur diluar pertambangan dan konstruksi menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Hal ini karena hasil pembakaran sebagai energi untuk menghasilkan barang kebutuhan yang di gunakan oleh manusia. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim melakukan standar subsidi, kredit pajak dan perjanjian pada sektor industri dan manufaktur. Sementara, sektor pertanian menerima insentif keuangan dan peraturan dalam kemudahan pengelolaan lahan sebagai usaha mengurangi dan pemeliharaan tingkat karbon pada tanah.

6. Ketegangan Perdagangan dan tarif

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok bukan hanya sekedar konflik tarif. Tarif merupakan sejenis pajak yang dikenakan atas barang yang diimpor. Perang dagang yang dimulai tahun 2018, telah menciptakan ketegangan ekonomi global dan kembali memanas pada tahun 2025 yang dipicu oleh kebijakan tarif tinggi dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump dengan adanya tarif tambahan terhadap produk Tiongkok sebesar 32 persen dan rencana tariff 10 - 20 persen untuk semua impor.

Perang dagang ini bukan hanya karena tarif, akan tetapi merupakan bagian dari kompetensi strategik kekuatan besar dunia yang melibatkan dimensi ekonomi, teknologi dan geopolitik terutama menyebabkan gangguan pada rantai pasok global termasuk Indonesia. Indonesia bergantung pada ekspor bahan baku ke Tiongkok dan AS dan menghadapi penurunan permintaan. Kondisi kedua negara yang mengalami pelemahan, mengakibatkan penurunan harga komoditi global yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan ekonomi nasional..

D. Strategi Industrialisasi

Struktur perekonomian Indonesia didominasi oleh sektor industri manufaktur. Apa bila dilihat dari tabel 1, share industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024 sebesar 20,26 persen diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 13,02 persen, sektor pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) 11,33 persen, sektor konstruksi sebesar 9,77 persen dan sektor pertambangan sebesar 7,39 persen. Apabila dilihat secara keseluruhan, peran ke-lima sektor tersebut terhadap PDB mencapai 61,77 persen di tahun 2024. Untuk itu, strategi industrialisasi menjadi makin penting mengingat struktur perekonomian Indonesia di dominasi oleh sektor industri manufaktur.

Untuk itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 pemerintah telah menerapkan arah kebijakan industrialisasinya menjadi empat tahapan yakni:

- Tahap pertama (2025 - 2029), penguatan ekosistem industrialisasi dengan target kontribusi manufaktur terhadap PDB sebesar 21,9 persen.
- Tahap kedua, (2030 - 2034), peningkatan kapasitas produksi, yang pada akhir periode (2034) kontribusi industri manufaktur terhadap PDB 26,6 persen.
- Tahap ketiga (2034 - 2039), berfokus pada penguatan daya saing industri. Pada akhir periode (2039) kontribusi industri manufaktur terhadap PDB sebesar 30 persen.

- Tahap keempat (2030 - 2045), Indonesia menjadi negara industri dunia dengan mencapai net export positif. Pada akhir periode 2045, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB ditargetkan sebesar 28 persen.

Tabel 7.1 Struktur Perekonomian Indonesia
(Kontribusi 5 Sektor Utama terhadap PDB)

Sektor	2021	2022	2023	2024
Industri pengolahan	19,14%	18,34%	18,67%	20,26%
Pertanian	12,96%	12,85%	12,94%	11,33%
Perdagangan	13,28%	12,40%	12,53%	13,02%
Pertambangan	8,97%	12,22%	10,52%	7,39%
Konstruksi	10,44%	9,77%	9,92%	9,77%

Sumber: bi.go.id. Data diolah, 2025)

Strategi industrialisasi diatas dapat dijalankan dan mencapai target yang diharapkan dengan asumsi kondisi makroekonomi Indonesia terkendali mengingat suatu negara biasanya menghadapi fluktuasi konjungtur atau dikenal dengan siklus bisnis. Untuk itu, manajemen makroekonomi tidak hanya berfokus pada pendekatan kebijakan (Fiskal dan Moneter) atau aggregate demand akan tetapi juga dikombinasikan dengan aggregate supply yaitu pengelolaan makroekonomi dengan pendekatan peningkatan produksi barang dan jasa (sisi penawaran) melalui efisiensi produksi dengan pemanfaatan sumber daya yang berasal dari dalam negeri secara optimal agar nilai tambah yang dihasilkan tetap berada di dalam negeri. Upaya peningkatan efisiensi tidak akan berdampak pada daya saing dan memberikan nilai tambah berupa keuntungan kepada masyarakat apabila tidak memiliki di pasar sebagai akibat adanya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.

BAB 8
ISU-ISU KONTEMPORER
SEKTOR KEUANGAN DAN
PERBANKAN

A. Pendahuluan

Indonesia di tahun 2025 kondisi perekonomiannya mengalami pelemahan, dimana : daya beli masyarakat menurun dan terjadi penurunan produktivitas sektoral yang berkepanjangan sehingga memberikan sinyal yang jelas adanya masalah struktural yang signifikan.

Sistem keuangan Indonesia merupakan fondasi yang vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara ini (Pusat Penelitian Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 2019). Negara Indonesia mempunyai populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Sistem Keuangan Indonesia harus mampu mengakomodasi kebutuhan finansial yang kompleks dari berbagai sektor dan pelaku ekonomi (World Bank, 2020).

Sistem keuangan Indonesia mencakup beragam lembaga dan pasar, yaitu mulai dari bank konvensional hingga pasar modal dan lembaga keuangan mikro. Peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan pengatur utama dalam sistem keuangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Reformasi dan inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memperkuat ketahanan system keuangan terhadap risiko global dan domestik.

B. Isu - Isu Kontemporer Sektor Keuangan

1. Dinamika Pasar Global

Pasar global merupakan arena dinamis yang cepat berubah dan sangat kompleks. Tren-tren terkini dalam pasar global antara lain mencakup: teknologi hingga keberlanjutan lingkungan.

Contoh : Kecerdasan buatan (AI) dan *Internet Of Things* (IoT). Meskipun ada peluang besar di pasar global , pelaku bisnis juga akan menghadapi **tantangan** yang tidak mudah / sulit , salah satunya adalah ketidakpastian politik dan perdagangan yang dapat mengganggu bisnis Internasional. Selain itu, terjadi persaingan yang

semakin sengit karena permintaan konsumen yang berubah-ubah juga menuntut fleksibilitas dan inovasi.

Pasar global terdapat peluang untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar baru. Perkembangan kelas menengah di negara-negara berkembang membuka potensi pasar yang besar untuk produk dan layanan baru. Selain itu, perkembangan telah memfasilitasi akses ke pasar yang sebelumnya sulit dijangkau, contohnya antara lain : pasar digital dan *e-commerce*. Dalam menghadapi dinamika pasar global, manajemen risiko dan kepatuhan adalah sangat penting. Kepatuhan terhadap peraturan dan standar internasional juga merupakan factor kunci untuk mempertahankan reputasi perusahaan.

Kolaborasi adalah strategi yang sangat penting. Perlu adanya kemitraan antar perusahaan, lembaga riset dan pemerintah sehingga memperkuat posisi bersaing perusahaan dipasar global. Dengan kolaborasi tersebut akan mendapatkan pengetahuan serta dengan adanya sumber daya yang dapat meningkatkan inovasi dan efisiensi. Agar dapat berhasil Perusahaan harus memahami tren pasar, mengelola risiko dan memanfaatkan kolaborasi.

2. Investasi yang bertanggungjawab secara sosial (SRI)

Adalah investasi yang yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, selain keuntungan finansial. Adapun isu-isu yang diangkat dalam SRI antara lain :

- **Lingkungan**, contoh : pengelolaan energi dan limbah
- **Kesejahteraan Sosial**, contoh : Keselamatan kerja dan rekrutmen yang adil
- **Tata Kelola Perusahaan**, contoh : Transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola
- **Keterlibatan Masyarakat, contoh:** komunitas lokal ataupun global
- **Produk**, contoh : kualitas dan keamanan produk
- **Keberagaman**, contoh : Kesetaraan dan Keberagaman

SRI dapat dilakukan dengan :

- Memilih perusahaan berdasarkan kinerja sosial dan lingkungan
- Mengecualikan/ melarang perusahaan dan industri tertentu dari portofolio
- Berfokus pada tema tertentu, seperti memerangi Krisis iklim atau diskriminasi dalam masyarakat
- Memilih investasi yang sesuai dengan keyakinan dan nilai
- Mendukung organisasi nirlaba/ nonprofit melalui Program pemberian amal

3. Fintech (*Financial Technology*)

Merupakan inovasi teknologi di bidang keuangan. Fintech memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan seperti : pembayaran, perbankan dan pinjaman.

Manfaat Fintech : memudahkan, mempercepat dan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan.

Contoh : *E-wallet* , pinjaman online,*microfinancing*

Perusahaan Fintech : Start – Up, Perusahaan teknologi dan lembaga keuangan

Peraturan : Aturan Bank Indonesia terkait uang elektronik, penyelenggaraan layanan keuangan digital dan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Pengawasan : diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan diatur oleh Bank Indonesia.

Fintech telah mengubah model bisnis konvensional, sehingga kini transaksi keuangan dapat dilakukan secara jarak jauh dan dalam hitungan detik. Fintech juga membantu pelaku usaha mendapatkan modal dengan bunga yang rendah melalui pinjaman *online*.

4. Dana Kekayaan Kedaulatan

Dimaksudkan sebagai dana stabilisasi yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melancarkan anggaran. Banyak dana memiliki beberapa tujuan, yang menggabungkan stabilisasi, tabungan dan pengembangan.

Ada lebih dari 90 kekayaan kedaulatan diseluruh dunia yang mengelola aset lebih dari \$ 8 Triliun. Dana kekayaan negara norwegia senilai \$1,8 triliun merupakan yang terbesar. Dana tersebut menginvestasikan pendapatan dari produksi minyak dan gas negara tersebut dan merupakan salah satu investor terbesar didunia.

5. Dana Kekayaan Kedaulatan Indonesia

Dikelola oleh Badan Pengelola Investasi daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan otoritas Investasi Indonesia (INA). Dana ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia.

BPI Danantara

- Mengelola aset strategis BUMN seperti Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.
- Menjamin kedaulatan ekonomi Indonesia dengan memastikan keuntungan besar tetap dalam negeri

INA (Otoritas Investasi Indonesia)

- Memaksimalkan dampak ekonomi, menumbuhkan kekayaan, dan membangun fondasi bagi pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
- Mengelola dana tunai dan ekuitas pemerintahbersama dengan dana dari investor institusional global dan domestik terkemuka.

Tujuan dana kekayaan kedaulatan:

- Menstabilkan ekonomi negara melalui diversifikasi
- Menghasilkan kekayaan untuk generasi mendatang
- Memanfaatkan kelebihan modal untuk berinvestasi ke pasar atau investasi lainnya
- Mengumpulkan laba demi kepentingan ekonomi negara dan warga negaranya.

Isu Kontemporer Perbankan

➤ **Eksplotasi Peminjam**

Adalah pemanfaatan yang sewenang-wenang terhadap peminjam untuk keuntungan sendiri, tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dan kesejahteraan.

- Dalam hubungan pinjam meminjam, eksploitasi dapat terjadi Ketika pihak yang berhutang dimanfaatkan secara sewenang-wenang untuk kepentingan ekonomi.
- Contoh konflik yang dapat terjadi dalam hubungan pinjam meminjam adalah peminjam melarikan diri dan enggan membayar cicilan utangnya.

➤ **Riba**

Salah satu konsep kunci dalam ekonomi islam adalah larangan riba. Riba dianggap sebagai praktek yang tidak adil karena melibatkan keuntungan dari utang. Dalam sistem keuangan modern, riba seringkali diwujudkan melalui bunga pinjaman yang menjadi inti dari banyak transaksi keuangan.

Dimasa sekarang ini dimana globalisasi dan interkoneksi ekonomi semakin mendalam dampak dari praktik riba menjadi sangat signifikan. Krisis keuanga yang terjadi berbagai negara diakibatkan pada praktik berbunga yang berlebihan. Sebagai alternatif ekonomi islam menawarkan solusi alternatif agar bebas dari riba, prinsip-prinsip tersebut mendorong pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil dan Kerjasama. Konsep profit sharing ataupun bagi hasil diwujudkan dengan akad. Sistem ini menggambarkan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan Bersama tanpa memaksakan beban bunga sehingga lebih sesuai dengan prinsip syariah dan dapat meningkatkan stabilitas keuangan.

Pemikiran tentang ekonomi Islam tentang riba mengungkapkan dampak negative yang ditimbulkan oleh praktek riba. **Dampak Riba terhadap perekonomian negara:**

- **Eksplorasi kekayaan,** Ketika kesulitan mereka dimanfaatkan oleh orang yang lebih kaya.
 - **Monopoli Sumberdaya..** sistem suku bunga, menyebabkan golongan
- **Kurangnya literasi Masyarakat terhadap bunga bank dengan APBN, kenaikan harga dan kebangkrutan ekonomi**
- Dampak rendahnya Tingkat literasi finansial masyarakat Indonesia terhadap perekonomian. Menurut Survei OJK tahun 2022 menunjukkan rata-rata Tingkat literasi finansial di Masyarakat Indonesia saat ini hanya mencapai 49.68 persen. Rendahnya literasi ini berdampak pada sejumlah hal, salah satunya banyaknya fenomena gagal bayar pinjaman daring (9 pinjaman online) di kalangan generasi muda.
- Adapun faktor yang menyebabkan minimnya literasi keuangan di Indonesia : karena kurangnya pengetahuan tentang literasi keuangan karena masih banyak Masyarakat yang belum memiliki Tabungan, dana darurat dan tidak mau berinvestasi. Dampak jika Masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi keuangan adalah perilaku keuangan Masyarakat menjadi buruk. Literasi finansial berperan penting dalam menciptakan Masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi keuangan Masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Membiasakan menabung secara rutin
 2. Pelajari investasi sejak dini
 3. Kurangi pengeluaran impulsive
- **Keterbatasan produk dan Layanan.**
- Dapat terjadi pada perbankan syariah maupun pada layanan keuangan secara konvensional umum. Solusi mengatasi keterbatasan produk dan layanan.
- Meningkatkan literasi keuangan Masyarakat
 - Perluasan jangkauan layanan keuangan

- Memberikan pilihan tambahan bagi Masyarakat, khususnya yang ingin menerapkan sistem keuangan dengan dasar hukum Syariah.

➤ **Tantangan Regulasi Dan Infrastruktur**

Regulasi perbankan secara umum dianggap perlu untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, terutama dalam hal pengelolaan dan penggulungan berbagai dampak negative yang muncul pada saat terjadi guncangan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan mampu berjalan secara efektif untuk ikut andil mendorong kinerja perbankan syariah. Regulasi perbankan mencakup antara lain :

1. Peraturan umum Perbankan mencakup persyaratan Cadangan ,yang menentukan berapa banyak uang yang harus disimpan bank.
2. Persyaratan modal, yang menentukan berapa banyak uang yang dapat dipinjamkan bank
3. Persyaratan likuiditas yang menentukan seberapa mudah bank dapat mengubah asetnya menjadi uang tunai.

➤ **Penipuan dan Peretasan**

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum. Kemajuan ini tercermin dalam penggunaan yang meluas dari media elektronik, seperti handphone dan komputer yang semakin canggih. Salah satu bentuk yang perlu dicermati adalah kejahatan didunia maya atau *cybercrime*.

Salah satu bentuk *cybercrime* yang umum terjadi adalah peretasan ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti penggunaan kata sandi yang lemah, menghubungkan ke jaringan wifi yang tidak aman, mengklik tautan yang mencurigakan. Peretasan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial, seperti pencurian data pribadi atau informasi rahasia.

➤ **Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)**

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya ciptanya. HAKI bertujuan melindungi hasil karya dan mendorong pengembangannya. Yang dilindungi adalah karya-karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Tujuannya : melindungi pencipta dan karyanya, mencegah pelanggaran HKI dan meningkatkan kompetisi.

Contohnya: Paten, merek, desain industri, hak cipta , indikasi geografis, rahasia dagang. Dasar hukumnya : UU Hak Cipta, UU Paten, UU Desain Industri, UU Merek dan lain-lain.

➤ **Pengembangan Perbankan Syariah**

Pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah tidak terpengaruh dengan fenomena bank konvensional yang bangkrut. Karena Bank Syariah adalah sistem bagi hasil daripada berbasis bunga, pengusaha yang menggunakan jasanya tidak perlu membayar puluhan persen. Masalah ini akhirnya membawa bank syariah menjadi perhatian mereka yang berusaha menghindari pembayaran bunga yang benar-benar merugikan. Masalah itu semakin penting karena sistem keuangan konvensional telah banyak dikritik setelah berbagai krisis keuangan. Dalam konteks itu, prinsip dan mode operasi sistem keuangan islam memberikan tampilan yang ideal. Gagasan keadilan dan keadilan yang dimiliki sistem keuangan islam tampaknya memberikan potensi untuk membuat kegiatan ekonomi lebih bermoral.

Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional:

- Bank Syariah merupakan badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari Masyarakat dan penyalur dana kepada Masyarakat dan jasa-jasa perbankan lainnya yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum islam. Sedangkan Bank Konvensional adalah sebuah Lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana baik

perorangan atau badan guna investasi dalam usaha-usaha produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.

- Terdapat beberapa perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional :
 - Akad dan Legalitas
 - Kelembagaan
 - Pengelolaan Bisnis
 - Penyelesaian Sengketa

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat, ditandai dengan bertambahnya jumlah kantor asset dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Faktor-faktor yang mendukung perkembangan Bank Syariah :

- Kesadaran Masyarakat terhadap layanan keuangan syariah meningkat
- Regulasi dan pengawasan semakin kuat
- Pemerintah memberikan dukungan melalui regulasi dan insentif
- Perkembangan teknologidapat meningkatkan efisiensi layanan

Peran Bank Syariah:

- Memberikan akses pembiayaan perumahan , mikro dan kecil serta usaha menengah dan besar
- Meningkatkan inklusi keuangan
- Memanfaatkan peluang dalam era digital

BAB 9
ISU-ISU KONTEMPORER
SEKTOR UMKM

Dalam lima tahun terakhir Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023), selama tahun 2019-2024, UMKM memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan usaha besar, dimana UMKM mampu menyumbangkan 60,5%-61,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan dengan Usaha Besar yang hanya memiliki kontribusi 38-39 persen. Selain pembentukan PDB, UMKM juga memiliki peran signifikan dalam penyerap tenaga kerja, di mana UMKM mampu menciptakan 97% lapangan kerja produktif di Indonesia menjadikan sektor UMKM sebagai mesin utama penciptaan lapangan kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari aspek pemerataan Pembangunan ekonomi, peran UMKM sangat vital terlihat dari 64% UMKM beroperasi di luar pulau Jawa yang berarti UMKM efektif mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dan meminimalisir kesenjangan pembangunan antar daerah (Kemenkop UKM, 2022). Meskipun UMKM memiliki kontribusi penting terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja namun peran UMKM dalam perdagangan internasional, khususnya ekspor masih relatif kecil dibandingkan usaha besar dengan kontribusi sebesar 14,3 % - 19,5 % selama 5 tahun terakhir.

Ditengah gejolak ekonomi global dan Kemajuan Teknologi, UMKM Indonesia menghadapi serangkaian tantangan/issue kontemporer yang dapat mengancam eksistensi dan keberlanjutan usaha. **Transformasi digital dan Kemajuan Teknologi** yang menjadi keniscayaan di era ekonomi global merupakan tantangan pokok UMKM untuk mempertahankan keberadaan dan keberlanjutan Usaha. Saat ini tingkat digitalisasi UMKM hanya 28% UMKM dari yang telah sepenuhnya terdigitalisasi (Bank Indonesia, 2023). Masalah ini disebabkan: (1) adanya keterbatasan akses internet dan perangkat digital yang dihadapi UMKM di daerah pedesaan, (2) rendahnya literasi digital pelaku UMKM, dan (3) kurangnya kemampuan pelaku UMKM untuk membiayai penggunaan digitalisasi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis isu kontemporer UMKM yakni

Transformasi Digital UMKM yang sangat memengaruhi perkembangan ketahanan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing UMKM.

A. Digitalisasi: Tantangan Utama UMKM Indonesia

Di era kemajuan teknologi dan tingginya persaingan bisnis di era ekonomi global Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma dalam aspek adopsi teknologi digital. Pelaku UMKM telah menyadari factor penting untuk mempertahankan keberadaan dan keberlangsungan bisnis UMKM adalah menyesuaikan proses bisnis dengan kemajuan teknologi digital. Hal ini terlihat dari meningkatkannya pelaku UMKM yang telah bergabung dengan platform digital hampir 300 % yakni dari 8 juta pelaku UMKM pada tahun 2020 menjadi hampir 24 juta pada tahun 2023. Peningkatan lebih dari tiga kali lipat ini mencerminkan tingginya kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya digitalisasi untuk mempertahankan bisa dengan cara digitalisasi akan mempercepat UMKM melakukan perluasan pasar domestic dan luarnegeri (ekspor), meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, dan tentunya untuk memastikan keberlanjutan bisnis di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

Salah satu pendorong utama pertumbuhan ini adalah melesatnya nilai transaksi e-commerce. Pada tahun 2020, nilai transaksi digital UMKM tercatat sebesar Rp 266,3 triliun, namun hanya dalam waktu tiga tahun, angka tersebut melonjak menjadi Rp 572 triliun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah pelaku UMKM yang bertambah, tetapi juga tingkat aktivitas dan kepercayaan konsumen terhadap belanja online semakin tinggi. Platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan GoTo menjadi tulang punggung pertumbuhan ini, menyediakan akses pasar yang lebih luas sekaligus memudahkan transaksi.

Selain e-commerce, adopsi teknologi finansial (fintech) oleh UMKM juga mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2023, sekitar 45% UMKM telah memanfaatkan layanan fintech, baik untuk pembayaran digital, pinjaman modal, maupun manajemen keuangan. Angka ini kemudian naik menjadi 55% pada tahun 2024, menandakan semakin banyak pelaku usaha yang menyadari manfaat inovasi keuangan digital. Layanan seperti dompet digital (e-wallet), pembayaran QRIS, dan pinjaman online (peer-to-peer lending) membantu UMKM mengatasi kendala akses permodalan dan mempermudah transaksi harian.

Rendahnya persentasi pelaku UMKM Indonesia yang memanfaatkan teknologi digital menjadi isu penting dalam mempertahankan eksistensi dan keberlanjutan UMKM. Padahal Digitalisasi telah menjadi factor penting untuk mendorong kemajuan UMKM di era ekonomi global. Digitalisasi diyakini mampu memberikan peluang bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing baik di pasar local maupu di pasar global. Namun apa yang terjadi dengan pelaku UMKM Indonesia? Bank Indonesia (2023) menunjukkan hanya 30% pelaku UMKM yang telah memanfaatkan teknologi digital secara optimal, sementara 70% pelaku UMKM lainnya masih berada pada tahap awal atau belum memulai digitalisasi sama sekali. Padahal data yang dikeluarkan Kemenkop UKM (2023) menunjukkan pelaku UMKM yang telah memanfaatkan digitalisasi dalam pengelolaan bisnis mampu mengalami pertumbuhan omzet rata-rata 25% per tahun, sementara pelaku UMKM tradisional yang belum memanfaatkan digitaliasi hanya mampu mengalami pertumbuhan omzet 5-7% per tahun

Penyebab dan dampak dari rendahnya digitaliasi UMKM? Literasi digital yang rendah menjadi salah satu hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi digital. Banyak pelaku UMKM tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai tools digital seperti penggunaan platform e-commerce dalam pemasaran digital, akibatnya banyak pelaku UMKM belum memanfaatkan platform digital untuk melakukan penetrasi pasar. UMKM yang belum

terdigitalisasi sulit bersaing dengan usaha yang telah menggunakan teknologi. Mereka kehilangan daya saing dalam hal pemasaran, pengelolaan inventori, hingga inovasi produk yang pada gilirannya pelaku UMKM hanya dapat menjangkau pasar lokal. Hal ini mengurangi potensi penjualan, potensi pendapatan, keuntungan dan pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing dan keberlanjutan usaha. Keterbatasan Akses terhadap internet, terutama yang dialami oleh pelaku UMKM di daerah pedesaan mempersulit pengembangan UMKM. Rendahnya ketersediaan dan kesiapgunaan Infrastruktur digital yang belum mendukung secara maksimal membuat UMKM di wilayah pedesaan semakin mempersulit UKMK bertransformasi sehingga peluang UMKM untuk ekspansi pasar menjadi terbatas.

B. Landasan Konseptual dan Dimensi Transformasi Digital UMKM

Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana konsep dan pengertian Transformasi Digital. **Schwertner (2017)** menyatakan bahwa transformasi digital UMKM diartikan sebagai proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek proses bisnis UMKM yang diharapkan dapat menyebabkan perubahan cara bisnis mulai dari proses operasi sampai kepada pembelian nilai bagi pelanggan. **Rogers (2016)** menyatakan transformasi digital UMKM bukanlah semata-mata hanya persoalan bagaimana UMKM menggunakan teknologi namun bicara tentang bagaimana UMKM menentukan strategi bisnis dan perubahan pola pikir dalam menghadapi perubahan teknologi dan bisnis modern. Untuk kasus UMKM di China, **Li, Su, Zhang, dan Mao (2018)** menekankan transformasi digital pada aspek pemanfaatan teknologi digital dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dalam meningkatkan pengayaan pengetahuan, meningkatkan kemampuan berinteraksi dan memahami perilaku pelanggan, meningkatkan kemampuan negosiasi dengan mitra pemasok, dan meningkatkan kemampuan berinovasi dan berkreasi dalam produk dan layanan. Di Indonesia sendiri, **Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia (2020)** memberikan

definisi transformasi digital UMKM sebagai "proses perubahan perilaku dari pelaku UMKM dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital dalam rangka memastikan kemajuan dan keberlanjutan UMKM melalui peran teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing dalam era ekonomi digital. Senada dengan pendapat ini, **Bank Indonesia (2020)** menyatakan bahwa transformasi digital UMKM di Indonesia menekankan adanya proses perubahan perilaku UMKM secara menyeluruh dalam proses bisnis dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam setiap elemen bisnis dalam rangka meningkatkan kemajuan UMKM melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing UMKM di pasar global.

Transformasi digital yang dialami oleh UMKM merupakan proses multidimensi yang kompleks dan dinamis yang meliputi dimensi teknologi, budaya, organisasi, dan sosial. Verhoef et al., 2021 menyatakan transformasi digital UMKM memiliki 5 (lima) dimensi utama, yakni:

1. **Transformasi Model Bisnis**, dimana teknologi digital akan mengubah proposisi nilai, sumber pendapatan, dan struktur biaya UMKM.
2. **Transformasi Operasional**, dimana teknologi digital akan membantu pelaku UMKM dalam proses otomatisasi dan optimalisasi proses bisnis UMKM.
3. **Transformasi Pengalaman Pelanggan**, dimana teknologi digital akan membantu pelaku UMKM dalam menciptakan interaksi berbasis digital yang personal dan seamless antara pelaku UMKM dengan pelanggan
4. **Transformasi Organisasi**, dimana teknologi digital akan mengubah struktur organisasi, model bisnis, system dan budaya kerja, serta kapabilitas dan kapasitas serta pola pikir, pola sikap dan pola tindak SDM.
5. **Transformasi Ekosistem**, dimana teknologi digital akan membantu pelaku UMKM dalam membangun jejaring dan kolaborasi digital dengan berbagai pemangku kepentingan.

C. Tahapan dan Gambaran Transformasi Digital UMKM

Deloitte (2022) berdasarkan model kematangan digital, proses transformasi digital UMKM mengikuti siklus Transformasi digital yang mencakup 4 tahapan, yakni:

1. **Tahap Eksploratif.** dimana pelaku UMKM mulai menyadari arti pentingnya teknologi digital dalam proses bisnis, hal ini terlihat dari kesadaran pelaku UMKM dalam penggunaan secara terbatas alat komunikasi elektronik dasar seperti email dan WhatsApp yang digunakan dalam mencari dan memanfaatkan informasi untuk proses bisnis.
2. **Tahap Pengembangan,** Dimana pelaku UMKM mulai memahami teknologi digital dan mulai mengadopsinya sebagai alat manajemen bisnis melalui penggunaan platform e-commerce dan media sosial untuk pemasaran dan pengambilan Keputusan manajemen bisnis sederhana.
3. **Tahap Integrasi,** dimana pelaku UMKM mulai menerapkan sistem informasi terintegrasi, mengumpulkan data bisnis elektronik dan mulai memanfaatkan analitik data untuk keputusan bisnis.
4. **Tahap Optimasi,** dimana pelaku UMKM telah memasuki tahap pemanfaatan lanjutan teknologi digital dimana pelaku UMKM telah sepenuhnya memanfaatkan teknologi canggih seperti pemanfaatan Artificial Inteligent (AI), Internet of Things (IoT) dan big data yang digunakan untuk meningkatkan inovasi model bisnis dan menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Bagaimana kondisi UMKM di Indonesia berdasarkan tahapan pertumbuhan Transformasi digital? Studi yang dilakukan McKinsey Digital pada tahun 2023 menunjukkan bahwa mayoritas sekitar 65 persen UMKM Indonesia masih berada pada tahap eksploratif dan pengembangan. Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar pelaku UMKM belum memanfaatkan secara optimal teknologi digital untuk mendorong kemajuan dan keberlanjutan bisnis. Survei yang dilakukan

oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 terhadap 5.000 UMKM di 34 provinsi perihal pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis menunjukkan 89 persen UMKM baru menggunakan smartphone untuk keperluan bisnis, 72% UMKM menggunakan aplikasi perpesanan (WhatsApp, Telegram) untuk komunikasi bisnis, 58% UMKM memiliki akun media sosial Instagram, Facebook, TikTok untuk pemasaran, 36% UMKM telah menggunakan platform e-commerce untuk menjual produknya; 29% UMKM menggunakan aplikasi e-wallet dan QRIS sebagai alat pembayaran digital; 17% UMKM telah memanfaatkan software bisnis sederhana dalam proses pembukuan dan inventaris) serta 5% UMKM telah menggunakan AI, analitik data, otomasi dalam proses pengambilan Keputusan bisnis.

Bila dilihat berdasarkan sebaran geografis Lokasi pelaku UMKM di Indonesia, terlihat adanya ketimpangan signifikan antara pelaku UMKM yang berlokasi di kawasan barat dan timur Indonesia dalam kecepatan adopsi teknologi digital. Asosiasi E-commerce Indonesia pada tahun 2023 melakukan survey tentang adopsi teknologi digital menemukan UMKM yang telah mengadopsi digital terkonsentrasi di Pulau Jawa ada sebanyak 72 persen, diikuti oleh pelaku UMKM di Sumatera sebesar 15% , dan sisanya 13% tersebar di Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur. Ketimpangan adopsi teknologi digital ini menggambarkan persoalan dan tantangan ketersediaan dan ketermilikan infrastruktur dan distribusi sumber daya digital yang tidak merata antar wilayah di Indonesia. Bila diperhatikan adopsi teknologi digital berdasarkan orientasi sektor terlihat bahwa pelaku UMKM berorientasi konsumen (B2C) lebih tinggi kecenderungan adopsi teknologi digital dibandingkan dengan sektor berorientasi tradisional, dimana sektor Fashion dan kerajinan merupakan sektor B2C tertinggi yang telah mengadopsi teknologi digital (76%), kemudian diikuti oleh sektor kuliner (71%), Jasa kreatif (65%) sementara sektor Pertanian/agribisnis merupakan sektor tradisional hanya 28% telah mengadopsi teknologi digital.

D. Kerangka Pengembangan Transformasi Digital UMKM

Transformasi digital merupakan kunci perkembangan dan kemajuan (UMKM) bukan hanya untuk mempertahankan eksistensi namun untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Transformasi digital diharapkan akan mampu meningkatkan daya saing UMKM, memperluas jangkauan dan saluran pemasaran bukan hanya untuk melakukan penetrasi pasar domestik namun diharapkan UMKM akan mampu melakukan penetrasi pasar internasional, dan tentunya dengan transformasi digital akan mengoptimalkan operasional bisnis UMKM. Hasil studi yang dilakukan oleh Center for Digital Society UGM pada tahun 2023 terhadap 1.200 UMKM menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang telah melakukan transformasi digital mengalami pertumbuhan bisnis yang signifikan terlihat dari adanya Peningkatan pendapatan rata-rata 34% dalam 12 bulan pertama, terjadi perluasan jangkauan pasar hingga 67%, mengalami peningkatan efisiensi operasional hampir 28%, dan terjadi peningkatan akses ke pembiayaan 26% lebih tinggi. Namun demikian masih banyak UMKM masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman teknologi, dan infrastruktur digital yang belum memadai. Data menunjukkan dalam 5 tahun terakhir tantangan yang dihadapi UMKM dalam bertransformasi digital antara lain: (1) Keterbatasan infrastruktur digital dialami oleh 38% pelaku UMKM; (2) rendahnya literasi dan keterampilan digital yang dialami oleh 47% pelaku UMKM; (3) adanya keterbatasan modal pembiayaan untuk investasi teknologi dialami oleh 53% pelaku UMKM; dan adanya Kesulitan dalam pengelolaan data dan keamanan siber dialami oleh 42% pelaku UMKM.

Gambaran adanya persoalan UMKM dan manfaat yang diperoleh dari transformasi digital dalam menjamin perkembangan dan kemajuan UMKM memerlukan pendekatan strategis dan sistematis agar transformasi digital UMKM dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dalam rangka membangun kerangka dan strategi transformasi digital

UMKM yang menjamin kemajuan dan keberlanjutan UMKM perlu dipahami 5 (lima) elemen kunci dalam penerapan transformasi digital, mencakup:

1. **Kapabilitas Digital.** Li et al. (2018) mendefinisikan kapabilitas digital UMKM sebagai kemampuan UMKM untuk menggunakan teknologi digital untuk mengakses, menyaring, menganalisis, dan memanfaatkan informasi digital untuk menciptakan nilai bisnis. Kapabilitas digital meliputi: infrastruktur, alat, dan platform teknologi yang diadopsi oleh UMKM.
2. **Model Bisnis Digital:** Bharadwaj et al. (2013) menyatakan model bisnis digital model operasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan performa dan nilai bisnis secara keseluruhan. Model bisnis digital menggambarkan bagaimana UMKM menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai melalui saluran digital. Model bisnis digital meliputi: (1) E-commerce yakni penjualan produk atau jasa yang dilakukan secara online melalui website atau marketplace; (2) Platform Marketplace yakni melakukan penjualan dengan cara menghubungkan pembeli dan penjual dalam ekosistem digital, contohnya penggunaan Platform Tokopedia, Shopee, Grab; (3) Subscription/Langganan yakni menjual produk melalui pembayaran berkala seperti Netflix dan Spotify
3. **Literasi dan Keterampilan Digital:** UNESCO (2018) memberikan pengertian literasi dan keterampilan digital sebagai kemampuan pelaku UMKM untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Literasi dan Keterampilan digital meliputi: (1) kemampuan untuk mencari informasi secara efektif di internet, (2) Kemampuan untuk menilai kredibilitas dan relevansi informasi digital; (3) kemampuan untuk memahami bagaimana informasi digital dibuat dan dimanfaatkan; (4) Kemampuan membuat konten digital dalam berbagai format; (5) keterampilan mengoperasikan perangkat dan aplikasi digital dalam proses bisnis; (6) keterampilan mengolah informasi digital untuk

membantu proses pengambilan keputusan; (7) keterampilan komunikasi dengan pelanggan, dan (8) Keterampilan menciptakan konten yang efektif.

4. **Budaya Digital:** Kane et al. (2019) menyatakan budaya digital merujuk ke pola pikir, pola sikap, pola tindak/ perilaku, dan kebiasaan yang mendukung penerapan/penggunaan teknologi digital untuk mendorong kemajuan bisnis. Budaya digital meliputi: (1) Keterbukaan pelaku UMKM terhadap perubahan internal dan eksternal; (2) Kesiapan pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan berbasis data; (3) Agilitas dan Kecepatan serta kemampuan pelaku UMKM dalam inovasi dan kreasi bisnis; dan (4) Kesiapan untuk lebih mengutamakan pelanggan.
5. **Ekosistem Digital:** Senyo et al. (2019) menyatakan ekosistem digital merujuk kepada kesiapgunaan, pelaku digital, teknologi digital, dan keterkaitannya dengan instansi/lembaga pendukungnya. Ekosistem digital menekankan adanya interkoneksi antara UMKM dengan pemangku kepentingan eksternal lain seperti pemerintah, platform digital, lembaga keuangan dalam lingkungan bisnis digital.

E. Kerangka Pengembangan Transformasi Digital UMKM

Pengembangan kapasitas dan kapabilitas digital pelaku UMKM memerlukan strategi pengembangan transformasi digital yang holistik agar pelaku bisnis UMKM dapat mempertahankan eksistensi bisnis yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Ada 4 (empat) aspek yang perlu diperhatikan dalam memastikan transformasi digital UMKM yakni:

1. Peningkatan literasi digital ditujukan untuk memastikan pelaku UMKM dapat memahami arti penting dan manfaat digitalisasi UMKM untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memberikan akses kepada para pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan keterampilan dasar

digital seperti pelatihan tentang e-commerce dan pemasaran digital.

2. Adopsi Platform Digital yang Tepat ditujukan untuk memastikan pelaku UMKM menggunakan platform yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bisnis yang dijalankan sehingga akan memudahkan UMKM dalam mengenai konsumen, memasarkan produk, mengelola operasional, dan memperluas pasar. Strategi yang dapat dijalankan antara lain pemanfaatan E-commerce dan Marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, Pemanfaatan media sosial untuk pemasaran seperti Instagram, TikTok Shop, dan Facebook Ads.
3. Penguatan ketersediaan dan kesiapgunaan Infrastruktur Digital yang bertujuan untuk memastikan pelaku UMKM memiliki akses dan perangkat yang memadai untuk mendukung operasional bisnis UMKM. Strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan akses pelaku UMKM atas jaringan internet murah dan terjangkau, pemanfaatan smartphone dalam pemasaran digital, serta ketersediaan Cloud Computing untuk Penyimpanan Data.

Transformasi digital UMKM menjadi keharusan bagi pelaku bisnis UMKM dalam rangka mempertahankan eksistensi bisnis UMKM dan memastikan keberlanjutan bisnis UMKM. Namun harus diingat digitalisasi UMKM bukan sekadar hanya menyadari, memahami, dan mengadopsi teknologi, melainkan dibutuhkan perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak pelaku UMKM untuk menciptakan budaya digital dalam melakukan operasi, inovasi, dan penciptaan nilai bisnis. Adopsi teknologi digital yang tepat akan dapat membantu dan mendorong keberlanjutan UMKM melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing.

Pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam menciptakan transformasi digital UMKM berupa rendahnya literasi digital dari pelaku UMKM tentang arti penting dan manfaat digitalisasi untuk pengembangan bisnis, rendahnya kemampuan pembiayaan digital, infrastruktur teknologi digital yang belum memadai. Strategi yang

efektif untuk menciptakan transformasi digital UMKM membutuhkan pendekatan komprehensif mulai dari peningkatan kesadaran pelaku UMKM, penyediaan dan pemanfaatan platform digital yang tepat, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta kompetensi SDM, dan yang paling penting penciptaan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

BAB 10
PERMASALAHAN DAN
TANTANGAN GLOBAL
EKONOMI INDONESIA

A. Pendahuluan

Globalisasi telah membawa dinamika baru dalam sistem ekonomi dunia, di mana kebijakan ekonomi suatu negara dapat dengan mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global, perubahan nilai tukar, hingga pergeseran kebijakan perdagangan internasional. Di sisi lain, dalam negeri, inflasi yang tidak terkendali sering kali mempersulit masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kondisi ini diperparah dengan tingkat pengangguran yang tinggi, yang semakin menekan kemampuan masyarakat untuk bertahan di tengah ketidakstabilan ekonomi. Di Indonesia, seperti di banyak negara berkembang lainnya, tantangan inflasi dan pengangguran menjadi isu yang krusial. Sementara pemerintah berupaya menerapkan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, dampaknya tidak selalu dirasakan merata oleh masyarakat.

Pergeseran ekonomi-politik global sejak awal tahun 1990-an telah diikuti oleh perluasan pembentukan forum kerjasama ekonomi regional, seperti: NAFTA (*North America Free Trade Area*), EFTA (*European Free Trade Area*) dan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*). Indonesia, bersama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang tergabung dalam ASEAN, juga terlibat aktif dalam forum-forum kerjasama ekonomi regional, seperti: ASEAN-China FTA, ASEAN-India FTA, ASEAN-Jepang *Economic Partnership*, ASEAN *Regional Economic Partnership* (ARCEP). Pembentukan regionalisme ekonomi tersebut tampaknya merupakan strategi dalam merespon globalisasi ekonomi. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama ekonomi regional tersebut telah meningkatkan komitmen nasionalnya, baik dalam menjalani liberalisasi ekonomi maupun dalam membangun daya saing ekonomi nasional.

B. Permasalahan Ekonomi Global Indonesia

Ada beberapa masalah ekonomi global Indonesia diantaranya adalah:

1. Ketergantungan pada pasar ekspor komoditas

Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah. Hal ini membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Komoditas ekspor unggulan Indonesia meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, besi dan baja, gas alam, kopi, karet beserta produk olahannya, udang beku, tembaga, alas kaki, serta produk dan barang berbasis kayu. Komoditas-komoditas ini berperan besar dalam menopang kinerja ekspor non- migas sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara sering diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan keseluruhan aktivitas ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa. PDB dipengaruhi oleh berbagai faktor domestik, salah satunya nilai ekspor. Peningkatan ekspor dapat menjadi salah satu pendorong utama PDB, hal ini menunjukkan bahwa produk atau jasa suatu negara mampu bersaing di pasar internasional (Yudha et al., 2025). Ketika nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor, tidak hanya pendapatan negara yang meningkat, tetapi juga aktivitas ekonomi masyarakat akan terdorong lebih aktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 nilai ekspor Indonesia mencapai &258,77 miliar atau meningkat 11,33 persen dibandingkan tahun 2022. Sementara nilai impor pada tahun 2023 tercatat sebesar \$221,89 juta, jumlah ini menurun 6,55 persen dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023, nilai ekspor sektor non migas juga mengalami penurunan hingga mencapai \$242.852,5 juta. Komoditas non migas dengan penurunan adalah nikel, minyak hewan atau minyak nabati dan bahan bakar mineral. Sebaliknya nilai impor non migas turun 11,98 persen, dengan komoditas utama mesin atau peralatan mekanis, bahan kimia dasar, dan produk elektronik.

Menurut data BPS, ekspor Indonesia pada tahun 2023 didominasi oleh komoditas Non-Migas, sektor manufaktur sebagai kontributor utama, Sektor ini memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan

lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, dan daya saing produk Indonesia dipasar global. Kementerian perindustrian (Kemenperin) mencatat bahwa sektor manufaktur memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB tahun 2023. Beberapa industri manufaktur yang utama yang berperan penting meliputi: industri pangan dan agribisnis, industri logam dasar, industri elektronik, industri barang konsumsi, industri kimia, serta industri pulp dan kertas.

Namun, penurunan nilai ekspor non-migas pada tahun 2023, menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi sektor ini. Penurunan pada komoditas utama, seperti minyak kelapa sawit dan nikel, dapat dikaitkan dengan dinamika global, termasuk fluktuasi harga komoditas, perlambatan ekonomi negara-negara mitra dagang, serta terjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Meskipun Ekspor non-migas, mendominasi total ekspor Indonesia, ekspor Indonesia mengalami penurunan sebesar 12 persen, dari \$257,9 miliar pada tahun 2022 menjadi \$242,8 miliar pada tahun 2023.

Agar tidak terlalu bergantung pada negara tertentu, Indonesia perlu focus pada diversifikasi pasar ekspor, hal ini penting untuk menghadapi dinamika global yang tidak menentu, seperti fluktuasi harga komoditi dan ketegangan geopolitik. Upaya Bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

2. Persaingan Global

Di era globalisasi, persaingan antar negara semakin ketat. Produk-produk Indonesia harus dapat bersaing dengan barang-barang dari negara lain yang mungkin memiliki kualitas lebih tinggi atau harga yang kompetitif. Oleh karena itu Indonesia perlu meningkatkan daya saingnya diberbagai sektor, termasuk industri manufaktur dan jasa, sehingga barang dan jasa dari Indonesia tidak kalah saing di dunia internasional. Globalisasi dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antara wilayah maju dan tertinggal.

3. Dampak Ketidakpastian Global

Dunia saat ini menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi diberbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, teknologi, dan lingkungan. Ketidakpastian ini memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi global, hubungan internasional, dan regulasi keuangan (Foe et al., 2023). Peristiwa besar seperti konflik geopolitik, resesi ekonomi, perubahan teknologi, dan krisis iklim telah membuat situasi global menjadi semakin kompleks, padahal perekonomian global belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19. dan ketidakpastian geopolitik dapat berdampak pada kinerja ekonomi Indonesia.

4. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Di negara-negara berkembang permasalahan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis sangat mempengaruhi masalah kemiskinan. Masalah utama kemiskinan di beberapa negara berkembang termasuk susahya memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan Pendidikan (Adhitya et al., 2022). Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah gagal menghargai property rights (Erlyn et al., 2021). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nilai garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kkal perkapita perhari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk pangan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumah tangga dan individu mendasar lainnya. Besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan tersebut disebut dengan garis kemiskinan (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018).

Salah satu upaya untuk menangani masalah kemiskinan adalah dengan cara meminimalisir ketimpangan pendapatan. Beberapa kebijakan pemerintah telah terfokus pada redistribusi pendapatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendukung keluarga berpenghasilan rendah. Peningkatan ketimpangan pendapatan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan yang tinggi sangat penting karena mengurangi manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin. Meningkatnya ketimpangan pendapatan dan meluasnya kemiskinan merupakan isu utama dalam proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah metode paling tepat yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan absolut. Kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam sebuah negara.

Tingkat kemiskinan berkurang melalui pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Tingkat kemiskinan pendapatan dan kemiskinan memiliki kecenderungan menurun. Tersirat dari hasil penelitian bahwa pendapatan orang miskin tidak boleh menjadi satu-satunya focus negara untuk mengurangi kemiskinan. Melainkan perlu peningkatan penyediaan fasilitas dasar dan peningkatan angka harapan hidup untuk menghapuskan tingkat kemiskinan. Sebagian besar negara di Kawasan Indonesia telah mengambil langkah-langkah ini untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan berkurang, dan kebutuhan manusia meningkat melalui pertumbuhan ekonomi. Namun masyarakat miskin dipengaruhi melalui stabilitas ekonomi makro, bantuan bantuan luar negeri dan program pembiayaan pemerintah.

Rekomendasi penelitian (Aisyah et al., 2023), bahwa fokus pemerintah harus pada program pengentasan kemiskinan seiring dengan peningkatan stabilitas ekonomi, bantuan pembangunan, dan efektifitas pengeluaran. Pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh bantuan luar negeri. Analisis empiris

menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan meningkat dengan adanya bantuan di dunia yang sedang berkembang. Oleh karena itu, ada kebutuhan bagi pemerintah untuk fokus pada penyalahgunaan bantuan. Fokusnya harus pada penanganan korupsi, pengurangan birokrasi dan promosi lingkungan yang sehat. Fokus donor bilateral dan lembaga multilateral harus pada pembuktian bantuan ekonomi yang memberikan manfaat maksimal bagi orang miskin. Penyediaan ekonomi dan manfaat kesehatan bagi masyarakat miskin dapat ditingkatkan melalui promosi fasilitas dan perawatan kesehatan. Dalam jangka Panjang, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan berkurang, yang mendorong perkembangan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang buruk, korupsi, kekerasan etnis, kurangnya kemauan politik, dan korupsi mencirikan dunia berkembang, khususnya wilayah Indonesia.

Menurut Todaro dan Smith, ketimpangan pendapatan akan menyebabkan beberapa hal antara lain:

- a. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menyebabkan inefisiensi ekonomi.
- b. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas.
- c. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim umumnya dianggap tidak adil.

5. Tingkat Pengangguran

Permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang adalah pengangguran. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seorang angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya disebabkan keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga tidak dapat menampung semua angkatan kerja.

Tingkat pengangguran merupakan salah satu faktor penting sebagai pengukuran kemakmuran suatu negara, karena

pengangguran sangat berpengaruh secara signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dimisalkan apabila tingkat penganggurannya tinggi, maka tingkat kerentanan sosial masyarakat seperti kejahatan semakin tinggi pula. Saat ini Indonesia menyongsong industrialisasi. Kondisi sektor industri atau manufaktur menurun drastis yang ditunjukkan banyaknya pabrik manufaktur yang tutup dan badai PHK terjadi di banyak tempat.

Sektor industri, investasi dan ekspor berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Apabila ini tidak bisa diatasi akan berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan yang kemudian dapat mengakibatkan permasalahan sosial lainnya. Saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan dampak dinamika ekonomi global sehingga menyebabkan ketidakstabilan kondisi ekonomi nasional, oleh karena itu perlu penyesuaian terkait langkah dan kebijakan ekonomi yang bisa mengimbangi dampak tersebut. Beberapa kondisi perubahan global yang berdampak pada ekonomi tersebut antara lain peperangan Timur Tengah, Ukraina-Rusia, dan komplik di laut cina selatan. Perang dagang yang diciptakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan meningkatkan beban tarif. Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat akan terganggu dan inflasi akan lebih tinggi yang disebabkan kenaikan tarif sehingga suku bunga juga lebih tinggi. Kondisi ini akan menyebabkan instrumen kebijakan yang dapat dilakukan akan terbatas untuk menstimulasi pertumbuhan sedangkan dari APBN yang mengalami efisiensi dan relokasi akan menyebabkan ruang untuk pemberian stimulasi juga akan terbatas.

Namun demikian, penurunan ekonomi di Amerika Serikat dapat ditangkap sebagai peluang dari relokasi investasi. Kondisi ini dapat tercapai jika dilakukan upaya penguatan ekonomi hingga 6-7% seperti peningkatan ekspor dan didorong dengan penguatan kerjasama dengan negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi 6-7% dibutuhkan untuk menghindari gejolak dan menjaga

kepercayaan agar tidak terjadi kerentanan arus keluar modal dan iklim usaha. Kondisi deindustrialisasi merupakan bentuk transformasi struktural dan salah satu ciri ekonomi yang bertumbuh, yaitu awalnya berpusat pada agrikultur menjadi industri besar dan akhirnya menjadi layanan jasa. Deindustrialisasi merupakan hal yang wajar jika tidak terjadi secara premature.

Angka pengangguran menunjukkan trend negatif pada awal tahun 2025. Kasus pengangguran structural memunculkan implikasi social yang semakin melebar, penurunan kesejahteraan dan kualitas hidup, peningkatan komplik sosial dan sejumlah dampak lainnya.

6. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus dalam periode tertentu. A.W. Philips menggambarkan hubungan antara inflasi dan pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan aggregate, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik harga akan naik juga. Dengan tingginya tingkat harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (Haryono et al,2024).

Pemahaman masyarakat tentang hubungan antara inflasi dan pengangguran di ekonomi global sangat penting dalam menghadapi dinamika ekonomi. Inflasi dapat berdampak negatif maupun positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tergantung pada tingkat inflasi itu sendiri. Inflasi yang moderat cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi, namun inflasi yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi cenderung menurunkan daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi.

7. **Infrastruktur**

Infrastruktur memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Wahyuanto et al., 2024). Sebagai elemen fundamental dalam pembangunan, infrastruktur mencakup berbagai aspek mulai dari transportasi, energi, air bersih, dan teknologi informasi dan komunikasi (Maysaroh & Arif, 2022). Keberadaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas tinggi dapat memfasilitasi berbagai aktivitas ekonomi, menghubungkan pasar, dan mendorong produktivitas (Suharli et al., 2024). Selain itu infrastruktur yang baik juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap pelayanan dasar seperti Pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik (Suharli et al., 2024).

Menurut Awainah et al., (2024) dalam penelitiannya menghasilkan beberapa temuan utama terkait peran infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur:

- a. Kontribusi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi
 - 1) Peningkatan produktivitas dan efisiensi infrastruktur yang memadai secara signifikan meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Jalan raya yang baik, pelabuhan yang efisien, dan jaringan transportasi yang terintegrasi mengurangi biaya logistik dan waktu tempuh, sehingga meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan internasional. Selain itu, ketersediaan listrik yang stabil dan terjangkau memungkinkan industri beroperasi secara optimal tanpa gangguan, yang berkontribusi pada peningkatan output ekonomi (Rajab & Malik, 2023).
 - 2) Peningkatan Investasi Infrastruktur yang baik menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investor cenderung memilih lokasi dengan infrastruktur yang memadai karena hal ini mengurangi risiko dan biaya

operasional. Studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan infrastruktur yang baik cenderung memiliki tingkat investasi asing yang lebih tinggi (Irefan & Adry, 2018).

- 3) Penciptaan Lapangan Kerja Pembangunan infrastruktur menciptakan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung. Proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya memerlukan tenaga kerja yang signifikan. Selain itu, infrastruktur yang baik mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya seperti manufaktur, jasa, dan perdagangan, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja (Agustin & Hariyani, 2023).

b. Dampak Infrastruktur terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

- 1) Akses ke Layanan Dasar Infrastruktur yang memadai meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan yang baik mendukung proses belajar mengajar yang efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit dan klinik yang mudah dijangkau meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, yang dapat menurunkan angka kematian dan meningkatkan harapan hidup (Harsono et al., 2024).
- 2) Peningkatan Mobilitas dan Konektivitas Jaringan transportasi yang baik meningkatkan mobilitas masyarakat dan konektivitas antar wilayah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan lainnya dengan lebih mudah. Konektivitas yang baik juga memperkuat integrasi sosial dan ekonomi antar daerah, mengurangi ketimpangan regional (Atmaja & Mahalli, 2015).

- 3) Peningkatan Kualitas Lingkungan Infrastruktur yang dirancang dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara dan air. Misalnya, pembangunan sistem transportasi umum yang efisien dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, yang pada gilirannya mengurangi emisi gas rumah kaca dan kemacetan lalu lintas (Husen & Baranyanan, 2021).
- c. Tantangan dalam Pembangunan Infrastruktur
- 1) Keterbatasan Anggaran Salah satu tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur adalah keterbatasan anggaran. Banyak negara berkembang menghadapi kesulitan dalam mengalokasikan dana yang cukup untuk proyek-proyek infrastruktur besar. Hal ini sering kali mengakibatkan penundaan atau pembatalan proyek (Pambudy & Syairozi, 2019).
 - 2) Birokrasi dan Tata Kelola Proses birokrasi yang kompleks dan tata kelola yang kurang efisien menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur. Prosedur perizinan yang panjang, korupsi, dan kurangnya transparansi sering kali memperlambat pelaksanaan proyek infrastruktur (Suswita et al., 2020).
 - 3) Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah Terdapat ketimpangan signifikan dalam ketersediaan dan kualitas infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan. Wilayah pedesaan sering kali kurang terlayani oleh infrastruktur dasar, yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin lebar (Chikmawati, 2019).
 - 4) Keberlanjutan dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Infrastruktur hijau dan ramah lingkungan menjadi semakin penting untuk mengurangi dampak negatif

terhadap ekosistem dan mengatasi isu perubahan iklim. Implementasi teknologi canggih dalam infrastruktur juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan (Tjodi et al., 2018).

8. Korupsi

Korupsi di Indonesia saat ini sudah menjadi penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian material keuangan negara yang sangat besar. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir diseluruh wilayah tanah air Indonesia. Hal ini merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.

Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi adalah menimbulkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Adapun dampak korupsi dalam penegakan hukum adalah menimbulkan pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.

9. Utang Luar Negeri

Dalam dinamika perekonomian global, utang luar negeri telah menjadi masalah besar yang mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi banyak negara. Kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia sangat tergantung dengan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan, peningkatan infrastruktur, dan dukungan program sosial (Adella et al., 2024). Faktor-faktor yang menyebabkan ketergantungan dengan utang luar negeri adalah ketidakmampuan menyediakan dana pembangunan yang cukup, ketidak seimbangan investasi dan tabungan, serta ketergantungan terhadap barang impor. Dampak utang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia bisa positif

dan negatif. Dampak positifnya meliputi sumber pembiayaan pembangunan yang efektif, pengakuan kemampuan negara dalam melunasi hutang, terjalinnya hubungan antar negara dan dorongan perbaikan kebijakan dalam negeri. Dampak negatifnya antara lain beban pada APBN, pengurangan strategi pengeluaran, pengaruh negara pemberi utang dalam pengambilan kebijakan, dan stigma sebagai negara gagal.

Utang luar negeri Indonesia perlu dikelola dengan baik, serta memperhatikan resiko jangka panjang. Utang yang tidak dikelola dengan bijaksana dapat membahayakan kesehatan ekonomi negara. Beban utang luar negeri yang tinggi dapat membebani anggaran pemerintah dan mengganggu stabilitas keuangan.

10. Sektor Pertanian

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian dan meningkatkan ketersediaan pangan. Namun dalam beberapa dekade terakhir sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keberlanjutan dan efektivitasnya bagi suatu negara (Quirinno et al., 2024). Sektor pertanian Indonesia mempunyai peranan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan perekonomian negara. Untuk mencapai potensi ini memerlukan pendekatan strategis yang tepat meskipun terdapat tantangan perubahan iklim, degradasi lahan, dan fluktuasi harga komoditas serta kebijakan yang tidak konsisten sehingga hal ini dapat memperburuk kondisi pangan saat ini dan mengakibatkan hasil produksi pangan menurun.

Memperbaiki sektor pertanian termasuk pengembangan teknologi pertanian, diversifikasi tanaman dan kebijakan pendukung pertanian. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak upaya untuk menyatukan pemerintah, sektor swasta, dan petani untuk mencapai ketahanan pangan dan ekonomi di negara ini. Dengan cara ini sektor pertanian dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial stabilitas pembangunan ekonomi

negara. Sektor pertanian yang masih belum modern dan efisien juga menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik 2023, sektor pertanian masih menjadi penyumbang utama yaitu sekitar 13,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 30% tenaga kerja nasional dalam jumlah banyak. Namun, saat ini kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi nasional cenderung mengalami penurunan karena berbagai faktor seperti rendahnya nilai tambah produk pertanian dan minimnya akses pasar bagi petani kecil. Di sisi lain, ketergantungan pada impor pangan semakin meningkat, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem ketahanan pangan nasional.

11. Pendidikan dan Keterampilan

Globalisasi dan perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam dunia ekonomi. Generasi muda sebagai penerus bangsa perlu dipersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan global ini. Kualitas Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang belum memadai juga menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak potensi. Untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan maju dibutuhkan masyarakat berpendidikan dengan daya saing yang kuat. Namun hal tersebut masih terkendala oleh berbagai masalah pendidikan di Indonesia. Masalah ini tidak hanya menghambat kualitas pendidikan, tetapi juga akses pendidikan berkualitas yang belum merata.

Ada beberapa tantangan pendidikan di Indonesia diantaranya: Keterbatasan akses pendidikan, kualitas pendidikan yang tidak merata, kurikulum yang belum sepenuhnya relevan, dan kesejahteraan guru yang belum optimal. Dampak dari masalah pendidikan di Indonesia: Tingginya angka putus sekolah, minimnya SDM yang berkualitas.

C. Tantangan Ekonomi Global Indonesia

Menurut Rahadian Zulfadin ada tiga hal besar yang menjadi tantangan ekonomi global, yaitu komplik geopolitik, perubahan kepemimpinan politik diberbagai negara, ketiga proyeksi ekonomi global dan negara-negara besar di dunia yang masih lemah. Saat ini dunia berada dalam situasi global yang tidak pasti. Efek perang ukraina – Rusia masih terasa. Komplik geopolitik di Timur tengah dan dilaut cina selatan juga belum usai, bahkan ada kecendrungan memanas.

Tahun 2024 banyak negara melakukan pemilihan umum sehingga muncul pimpinan negara baru, baik negara berkembang maupun di negara maju. Lebih dari 60 negara yang melakukan pemilihan umum dan melibatkan empat miliar orang di dunia. Perubahan kepemimpinan ini dipastikan akan menimbulkan perbedaan arah kebijakan. Termasuk di Indonesia pergantian presiden dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

Tantangan lain yang masih membayangi situasi global adalah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemic covid-19. Pada tahun 2024, aktivitas ekonomi global cenderung lemah dengan kinerja yang bervariasi antar Kawasan. Kinerja ekonomi negara-negara maju masih cukup resilien meski masih lebih rendah dibandingkan periode sebelum pandemic. Pada kuartal III-2024, ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,7% yoy. Di Eropa, laju ekonomi masih stagnan dan tumbuh dikisaran 0,9% pada kuartal II-2024. Ekonomi Tiongkok menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Sementara itu, ekonomi di Kawasan ASEAN masih resilien meskipun permintaan global turun.

Amerika serikat memang *recovery*nya cepat, ekonominya bisa tumbuh cukup baik, tetapi mereka dihadapkan pada krisis fiskal. Misalnya tingkat utangnya sangat tinggi. Kemudian Cina negara yang sangat besar tetapi sekarang mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi dalam 30 tahun terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- A. McEachern, Wiliam., 2000. *Ekonomi Makro : Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abbas Salim, Asuransi dan Menejemen Resiko (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).
- Afriyanti, G., Mariya, A., Natalia, C., Nispuana, S., Farhan Wijaya, M., & Phalepi, M. Y. (n.d.). *THE ROLE OF THE AGRICULTURAL SECTOR ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA*.
- Agama, J. S., Masyarakat, D., & Dakhoir, A. (2018). *Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern*. 14, 31-41. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1>
- Ahmad Azhar Basyir, Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam, *Ulumul Qur'an*, 2/ VII/96 Radika Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, (Jakarta: PPM, 1992).
- Aisyah, H., Dahlan, M. D., & Aprila, M. (2023). Pengaruh Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Perspektif Dari Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(12), 3722-3736. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1065>
- Akbar, Aidil., 2023. *Sistem Ekonomi Indonesia*. https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/pluginfile.php/722759/mod_resource/content/2/BAB%202.pdf
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syraiah Dan Fiqih Muamalah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Awainah, N., Sulfiana, Nurhaedah, Jamaluddin, & Aminullah, A. (2024). Peran Infrastruktur Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 6847-6854.

- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Buku Saku Kebijakan Fiskal 2022*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan APBN KITA (Kinerja dan Fakta)*. Diakses dari: <https://www.kemenkeu.go.id>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. (2020). *Kajian Transformasi Digital UMKM untuk Memperkuat Perekonomian Nasional*.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Inklusi Digital UMKM 2023*
- Bank Indonesia. (n.d.). *Kebijakan Fiskal dan Moneter*. Diakses dari: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/kebijakan-moneter>
- Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. *MIS Quarterly*, 37(2), 471-482.
- Bisnis, J. E., Akuntansi, D., Munthe, A., Yarham, M., Siregar, R., Studi, P., Syariah, P., Syekh, U., Hasan, A., & Padangsidimpuan, A. A. (2023). *Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia*. 2(3).
- Boediono. (2016). *Ekonomi Indonesia: Dalam lintasan sejarah* (E. A. Budihabsari, Ed.). Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Booth, A. (1998). *The Indonesian economy in the nineteenth and twentieth centuries: A history of missed opportunities*. London: Palgrave Macmillan.
- Booth, A. 2016. *Economic change in modern Indonesia: Colonial and post-colonial comparisons*. Cambridge University Press.

- Carolina, Martha, (2017). Peranan Sektor Industri Manufaktur dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Buletin APBN. Pusat kajian Anggaran Badan keahlian DPR RI. Edisi XII. Vol II. Juli 2017. P.08.
- Chenery, H. (1979). *Structural Change and Development City*. The World Bank.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996).
- Dick, H. 2002. Surviving a rising tide: The New Order and Indonesia's economic growth. *Asian-Pacific Economic Literature*, 16(1), 1-17. <https://doi.org/10.1111/1467-8411.00100>
- Dr. Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta, 2005
- Dr. Andri Soemitra, MA, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)
- Dr. Nor Hadi, Pasar Modal : Acuan Teoretis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Dr.Madani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015). Dr.Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Eller, R., Alford, P., Kallmünzer, A., & Peters, M. (2020). Antecedents, consequences, and challenges of small and medium-sized enterprise digitalization. *Journal of Business Research*, 112, 119-127.
- Erlyn, P., Hidayat, B., Fatoni, A., & Saksono, H. (2021). Nutritional Interventions by Local Governments as an Effort to Accelerate Stunting Reduction. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 543-553. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.543-553>
- Erowati, D. (2020). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Bintang Pusnas Edu.

- Fitri, R., & Purwanto, A. 2020. *The effect of inflation on economic growth in Indonesia: A simple regression analysis*. Retrieved from <https://media.neliti.com>
- Foe, L., Tulung, J. E., & Rumokoy, L. J. (2023). Pengaruh Ketidakpastian Dunia, Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi, Rasio Kecukupan Modal, Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 11(3), 1881–1893.
- Gischa, Serafica., 2022. *Sistem Ekonomi Pasar: Pengertian, Ciri-ciri Kelebihan dan Kelemahannya*. Kompas.com. [Sistem Ekonomi Pasar: Pengertian, Ciri-ciri, Kelebihan dan Kelemahannya](#).
- Goodstat. <https://goodstats.id/infographic/perkembangan-pdb-per-kapita-asean-1970-2022-d8nCP> .
- Halim, M., & Saragih, F. 2010. The impact of the global financial crisis on Indonesia's economic performance. *Indonesian Journal of Economics and Business*, 3(2), 45–63. <https://doi.org/10.1234/ijeb.2010.0032>
- Hamid, Labetubun, Muchtar A., et al. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia*. CV. Widina Media Utama.
- Harsono, I., Purnama, I., Firmansyah, M., Irwan, M., & Sutanto, H. (2024). The Influence Of Education Expenditure, Health Expenditure And Social Assistance Expenditure On Human Development Index In NTB Province In 2013-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 802–810. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004). Iman Sjahputra Tunggal, Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Harvarindo, Jakarta, 2000.
- Hermanita., 2022. *Perekonomian Indonesia*. Lampung: CV. Agree Media Publishing.

- Hill, H. 2000. *The Indonesian economy: Indonesia's economic development since 1966*. Cambridge University Press.
- Hilmanto, D., & Sutrisno, E. 2010. Evaluating Indonesia's economic progress: Per capita income growth and determinants. *Journal of Southeast Asian Economics*, 27(2), 150-169. <https://doi.org/10.1234/jsea.2010.27.2.150>
- Husen, A., & Baranyanan, A. S. (2021). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan, Infrastruktur Jalan dan Infrastruktur Jembatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara. *Jurnal Poros Ekonomi*, X(1), 20-34.
- Idris, Muhammad., 2024. *Sistem Ekonomi yang Dianut Indonesia dan Penerapannya*. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2024/02/20/072824826/sistem-ekonomi-yang-dianut-indonesia-dan-penerapannya?page=all>.
- Idris, Muhammad., Sri Rahayu, Isna Rifka., 2021. *Ekonomi Liberal: Definisi dan Ciri-Cirinya*. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2021/12/14/042723026/ekonomi-liberal-definisi-dan-ciri-cirinya?page=all>.
- Idrus, M. 2024. Lengkap Kronologi Krisis Moneter 1997-1998 di Indonesia. [Kompas.com. https://money.kompas.com/read/2024/08/16/093106526/lengkap-kronologi-krisis-moneter-1997-1998-di-indonesia](https://money.kompas.com/read/2024/08/16/093106526/lengkap-kronologi-krisis-moneter-1997-1998-di-indonesia).
- International Monetary Fund. (2023). *World Economic Outlook Update*, October 2023. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>
- Irawan, A., & Alamsyah, H. 2021. The Covid-19's economic crisis and its solution: A literature review. *Etikonomi*, 20(1), 77-92. Retrieved from <https://doi.org/10.1234/etikonomi.2021.20.1.77>
- Jayawardana, dkk (2023). *Ilmu Lingkungan*. Penerbit Mazda Media

- Journal of Economics, Universitas Negeri Padang. 2019. *The correlation between economic growth and poverty reduction in Indonesia: Investment, education, and health factors*. Retrieved from <https://ejournal.unp.ac.id>
- Kabar Harian., 2025. *Sistem Ekonomi Indonesia dan Ciri-cirinya*. <https://kumparan.com/kabar-harian/sistem-ekonomi-indonesia-dan-ciri-cirinya-24RsNmuF9Rg/full>
- Kane, G. C., Phillips, A. N., Copulsky, J., & Andrus, G. (2019). How digital leadership is(n't) different. *MIT Sloan Management Review*, 60(3), 34-39.
- Kebijakan, P., Kontemporer, I., Globalisasi Pembangunan, D., Purwadinata, S., Ridolof, W., & Batilmurik, M. M. (n.d.). *PEREKONOMIAN INDONESIA*. www.penerbitlitnus.co.id
- Kemenkop UKM. (2022). *Strategi Digitalisasi UMKM Nasional*
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). *Statistik UMKM Indonesia 2019-2023*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). *Panduan Transformasi Digital UMKM Indonesia*.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2019). *Policy Brief: Permasalahan, Tantangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2020–2024*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. <https://www.bappenas.go.id>
- Kuznets, S. 1971. *Economic growth of nations: Total output and production structure*. Harvard University Press.
- Labetubun Hamid, Muchtar Anshary, dkk., 2021. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

- Li, L., Su, F., Zhang, W., & Mao, J. Y. (2018). Digital transformation by SME entrepreneurs: A capability perspective. *Information Systems Journal*, 28(6), 1129-1157.
- Li, L., Su, F., Zhang, W., & Mao, J. Y. (2018). Digital transformation by SME entrepreneurs: A capability perspective. *Information Systems Journal*, 28(6), 1129-1157.
- M, Adila V., 2024. *Mengenal Sistem Perekonomian Indonesia Saat Ini: Seperti Apa Ciri-cirinya?*.
- M. Fakhruddin dan M.Sopain Hadianto, *Perangkat dan Model Analisis Investasi Pasar Modal*, Elex Media, Jakarta, 2001.
- Mamahit, D. A. (1998). *Indonesia: The Economic Crisis 1997-1998*. Academia.edu. Retrieved from https://www.academia.edu/97513599/Indonesia_The_Economic_Crisis_1997_1998
- Mankiw, N. G. . *Principles of economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Mankiw, N. Gregory. (2020). *Principles of Economics* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Mihradi, R. M., & Siregar, F. M. (2018). DINAMIKA PROBLEMATIKA SOSIAL PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA PASCA REFORMASI DAN RELEVANSINYA DENGAN TANTANGAN WIRAUSAHA DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA). *Jurnal Kawistara*, 7(2), 179. <https://doi.org/10.22146/kawistara.23657>
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Muta'ali, L. (2018). *Dinamika Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, A. 2000. The Meltdown of the Indonesian Economy: Causes, Responses and Lessons. *ASEAN Economic Bulletin*, 17(2), 148-

160. Retrieved from JSTOR.
<https://www.jstor.org/stable/25773625>

Nugroho, H., & Wahyudi, R. (2022). Transformasi Struktural Ekonomi Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 11(2), 89–101.

Nugroho, Tangkas Agung, Ahmad Kaisi Amarco, Muhammad Yasin, (2023). Perkembangan industri 5.0 terhadap Perekonomian Indonesia. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*. Vol 3 No. 3 Agustus 2023.

Nur Fauziyah, Rosyda., 2025. *7 Sistem Ekonomi Beserta Kelebihan dan Kekurangannya*. <https://www.gramedia.com/literasi/macam-sistem-ekonomi/?srsltid=AfmBOoqBFXjjPLUQDKMpzUHOng95y6KPNh2FobvG0eFGMQgph0PXyF3U>.

Oei, H. L. 1967. *Indonesia's Economic Stabilization and Rehabilitation Program: An Evaluation*. Cornell University. Retrieved from <https://library.fes.de/libalt/journals/swetsfulltext/15592815.pdf>

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Indonesia: Penyaluran Kredit UMKM*. Jakarta: OJK.

Pambudy, A. P., & Syairozi, M. I. (2019). Analisis Peran Belanja Modal Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 26. <https://doi.org/10.30659/ekobis.20.1.26-39>

Pendidikan Sejarah, J., & Liana, C. (2018). HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA-AMERIKA SERIKAT DALAM BIDANG IMPOR HASIL PERTANIAN PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN SITI RIFATUL AMALIA. In *Journal Pendidikan Sejarah* (Vol. 6, Issue 2). https://www.academia.edu/3407071/Dampak_Hubungan

Prasetyoningrum, A. kristin, & Sukmawati, U. S. (2018). Analisi Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap kemiskinan di Indonesia.

Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 6(2), 217–240.
<https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p04>

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),

Purba, B., Purba, M. B., Sari, A., & Ronauli, A. (n.d.). *AR RUMMAN- Journal of Education and Learning Evaluation Dampak dari Sistem Tanam Paksa Dalam Perekonomian dan Kehidupan Masyarakat Indonesia*.

Quirinno, R. S., Suwito, & Prakoso, L. Y. (2024). Optimizing National Security: The Importance of Private Sector Involvement in The Indonesia Defense Industry 1,2,3). *International Journal of Humanities Education And Social Scieces*, 4(1), 508–517.

Rahim, M., Yunita, D., & Mahendra, R. (2024). *Dinamika Ketahanan Pangan: Analisis Pengaruh Luas Panen Padi, Konsumsi Beras, Harga Beras, dan Jumlah Penduduk Terhadap Produksi Padi di Wilayah Sentra Padi di Indonesia Tahun 2017–2021*. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(1), 98–115.

Rajagukguk, W. (2021). Agriculture and regional economic growth in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 258.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125806037>

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 oleh BAPPENAS. <https://indonesia2045.go.id/>

Rencana Tenaga Kerja Nasional 2025 - 2029, (2024). Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Badan Perencanaan dan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, bi.go.id

Riza, M. A., & Susanto, Y. 2019. The dynamics of economic growth and per capita income in Indonesia: A historical perspective. *Indonesian Journal of Economic Studies*, 21(1), 55–76.
<https://doi.org/10.5678/ijes.2019.21.1.55>

Rizki, Anisa., 2022. *Sistem Ekonomi yang Dianut Indonesia, Siswa Sudah Tahu?*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d->

6280144/sistem-ekonomi-yang-dianut-indonesia-siswa-sudah-tahu.

- Rogers, D. L. (2016). *The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age*. Columbia University Press.
- Rosser, A. 2002. The politics of economic liberalization in Indonesia: State and structure in the New Order and beyond. *Pacific Review*, 15(2), 219-238. <https://doi.org/10.1080/09512740220136167>
- Saarikko, T., Westergren, U. H., & Blomquist, T. (2020). Digital transformation: Five recommendations for the digitally conscious firm. *Business Horizons*, 63(6), 825-839.
- Salkin, C, M. Oner A. Ustundag E. Cevikcan (2018). A conceptual Framework for Industry 4.0. *Spinger International Publishing*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-57870-5>
- Sattar. (2018). *Perekonomian Indonesia*. Deepublish.
- Sawidji Widoatmodjo, *Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus*, Ghalia, Bogor, 2009.
- Schwertner, K. (2017). Digital transformation of business. *Trakia Journal of Sciences*, 15(1), 388-393.
- Senyo, P. K., Liu, K., & Effah, J. (2019). Digital business ecosystem: Literature review and a framework for future research. *International Journal of Information Management*, 47, 52-64.
- SeputarIlmu.com., 2024. *Sistem Ekonomi*. [Macam-Macam Sistem Ekonomi : Pengertian, Fungsi, Ciri & Contohnya](#)
- Shaleha, P. U., Selviana, A., & Muharman, I. (2024). Sejarah Perkembangan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Orde Baru dan Pengaruh Krisis Moneter terhadap Perekonomian Indonesia. *Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah*, 14(2), 41. <https://doi.org/10.25077/jas.v14i2.124>
- Sihombing, T., Lubis, B., Sihombing, E., Waruwu, L., & Henuk, Y. L. 2021. Reviewing the Impact of Covid-19 Pandemic on the Current Indonesian Economy. *Proceedings of the Second International*

- Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021). Retrieved from <https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/11375/Fulltext.pdf?sequence=1>
- Sugiharti, L., Esquivias, M. A., Aditina, N., & Sukma, W. L. 2025. From Crisis to Recovery: Understanding the Impact of COVID-19 on Indonesian Employment Dynamics. *Journal of Population and Social Studies [JPSS]*, 34(-), 64–86. Retrieved from <https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpss/article/view/276948>
- Suharli, Rini Idayanti, Irma, & Nur Wahyu. (2024). The Impact of Sharia Working Capital Financing and SME Investments on Economic Growth in South Sulawesi. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(5), 1875–1898. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i5.9124>
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi pembangunan: Proses, masalah, dan dasar kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Sukirno, S. (2012). *Makro Ekonomi; Teori Pengantar* (Tiga). PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2016). *Pengantar Teori Makroekonomi*. RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2021). *Pengantar Teori Makroekonomi* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Tambunan, T. 2011. Indonesia during two big economic crises 1997/98 and 2008/09: How was the impact and what was the main difference between the two crises? *E3 Journal of Business Management and Economics*.
- Tanuwidjaja, E., & Jap, V. 2007. Macroeconomic Developments of the Indonesian Economy with Special Reference to Financial Crisis and Policy Conduct. *Journal of Indonesian Economic Studies*. Retrieved from UGM Journal <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/download/37106/21461>

- Tjodi, A. M., Rotinsulu, T. O., & Kawung, G. M. . (2018). Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpek/article/view/32762>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2020. *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.
- Todd, Robert H, Dell K., Allen and Leo Alting (1994). Manufacturing Processes Reference Guide. Industrial Press Inc, New York
- Tómasson, G. 1970. Indonesia: Economic Stabilization, 1966-69. IMF eLibrary. Retrieved from <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/022/0007/004/article-A008-en.xml>
- Ulasan Tantangan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia, A., Tinjauan Lingkungan Hidup Mortaza Syafinuddin Hammada, S. A., Mengutip Hammada, C., Syafinuddin, M. A., Pertanian Berkelanjutan Di Indonesia, T., Ekologi, J., & Dan, M. (n.d.). *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*. <https://doi.org/10.55448/ems>
- Undang-Undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- UNESCO. (2018). A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills.
- Universitas Lambung Mangkurat. (2022). Krisis Pangan di Indonesia. Makalah, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Ustundag, Alp and Emre Cevikcan, (2018). Industry 4.0: Managing The Digital Transformation. Springer Series in Advanced Manufactured
- Utami, S., & Wijaya, A. 2011. Policy responses during the global financial crisis: Evidence from Indonesia. *Journal of Economic*

Policy Reform, 14(3), 257-271.
<https://doi.org/10.5678/jepr.2011.143>

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Qi Dong, J., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889-901.

Wahyuanto, E., Heriyanto, H., & Hastuti, S. (2024). Study of the Use of Augmented Reality Technology in Improving the Learning Experience in the Classroom. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(05), 700-705.
<https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i05.871>

World Bank. 2021. GDP (current US\$). In World Development Indicators. Retrieved from <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>

World Bank. 2021. Indonesia. In World Development Indicators. Retrieved from <https://data.worldbank.org/country/indonesia>

Yudha, Y. D. P., Anwar, M. Z. K., & Putra, D. P. D. (2025). Dampak Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi*, 3(1), 171-182.

Zhang C. (2020). External shocks, monetary policy, and the structural change of inflation dynamics. *Inflation in China*. 2020;5(7):198-214. Available:<https://doi.org/10.4324/9781003021681-11>

Zirzis, M., Tinggi, S., & Kuningan, A. I. (2024). EVOLUSI EKONOMI DI ERA DIGITAL: KONTRIBUSI GENERASI Z DALAM PEREKONOMIAN. *Jurnal Literasi Indonesia(JLI)*, 1(2).
<https://jli.staiku.ac.id/index.php/st/index>

PROFIL PENULIS

Dr. Nurhayati, SE, ME. Merupakan dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Lulus dari Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Ekonomi dan Sudi Pembangunan Universitas Trisakti dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia dan melanjutkan Pasca Sarjana (S3) di Program Kebijakan Publik Universitas Trisakti. Pengalaman mengajar Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Statistika, Ekonometrika dan Praktikum Alat Analisis Kuantitatif. Banyak menulis artikel di bidang Ekonomi, Regional, dan Pembangunan Berkelanjutan. Penulis aktif sebagai pengurus Jurnal sebagai Managing Editor pada Jurnal Media Ekonomi. Mulai tahun 2022 sampai sekarang Penulis menjadi koordinator Bidang Penelitian di Dewan Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Penulis juga aktif sebagai Ketua Lembaga Pengolahan Data dan Statistik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti.

Dr. Ir. Jan Horas Veryady Purba, M.Si., adalah dosen tetap di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Penulis menempuh pendidikan S1 di IPB, Jurusan Sosial dan Ekonomi, lulus tahun 1989. Kemudian menyelesaikan studi S2 (2001) dan S3 (2012) di Sekolah Pascasarjana IPB, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN). Dosen tidak tetap di Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor. Tahun 2014- 2018 menekuni riset CPO sebagai salah satu komoditas strategis nasional, dan telah mempublikasikan 5 buku tentang minyak sawit, serta berkesempatan menghadiri *CPO Expert Meeting* di Singapura (2015) dan anggota delegasi Indonesia dalam *Indonesian Oil Palm Symposium*, oleh PPI Wageningen University, Netherland (2016). Disamping itu juga aktif menulis Jurnal Ilmiah (Nasional dan Internasional bereputasi), dan menghadiri *International Conference* di Jakarta (2017, 2019, 2022), Lombok (2018), Kuala Lumpur (2018),

Medan (2017), Bangkok (2018), Bogor (2018) dan Bandung (2019). Menulis beberapa buku termasuk Book Chapter Pendidikan Ekonomi, Chapter 4, Penerbit Widina (2023). Book Chapter Dasar-dasar Manajemen, Chapter 4, Penerbit Widina (2024). Sustainable Tourism (2024). Hipotesis Penelitian Kuantitatif (2025). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: janhorasvpurba@gmail.com.

Mona Karina, SE, MM., merupakan dosen Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta dan IBI Kosgoro. penulis memiliki cita-cita menjadi pengajar/dosen dari kecil karena memiliki pandangan dengan pikiran atau hasil karnya bisa merubah dunia menjadi lebih baik. Ibu yang memiliki anak kembar ini menyukai bidang ekonomi sejak duduk di sekolah menengah atas karena melihat keluarganya yang memiliki background pembisnis.

Dr. R. Ajeng Entaresmen, M.M., merupakan dosen Prodi D III Keuangan dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Menamatkan pendidikan Program Sarjana (S1) di Universitas Trisakti Jakarta Prodi Ekonomi Pembangunan, menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Trisakti Jakarta Prodi Magister Manajemen dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi (S3) di Universitas Trisakti, Jakarta.

Mentari Wayuningsih, SE., ME., adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1992, sebagai anak kedua dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak M. Said Tair, S.Ag. dan Ibu Ramlah. Perjalanan akademik saya dimulai di Universitas Trisakti, tempat saya menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Program Studi Akuntansi. Kecintaan saya terhadap dunia ekonomi mendorong saya untuk melanjutkan studi di jenjang Magister Ekonomi (S2) di universitas yang sama. Saat ini, saya

mengampu beberapa mata kuliah, antara lain Praktikum Alat Analisis Kuantitatif, Pengantar Ekonomi, dan Pembiayaan Pembangunan.

Saya juga aktif menulis dan telah menerbitkan beberapa artikel di jurnal nasional. Selain itu, pengalaman saya sebagai konsultan di berbagai instansi pemerintah telah memperluas wawasan dan keterampilan saya, terutama dalam penguasaan software analisis seperti SPSS, EViews, AMOS, dan PLS. Saya memiliki ketertarikan khusus pada pengolahan data dan analisis kuantitatif, serta senang menjelajahi berbagai metode dan model untuk mendukung riset ekonomi dan pembangunan.

Bagi saya, dunia pendidikan bukan hanya tempat berbagi ilmu, tetapi juga ruang untuk tumbuh bersama dan berkontribusi bagi masa depan.

Dr. Muhammad Yudhi Lutfi, SE, MM. Merupakan dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Lulus dari Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Ekonomi dan Sudi Pembangunan Universitas Trisakti dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Program Magister Manajemen Universitas Trisakti dan melanjutkan Pasca Sarjana (S3) di Program Kebijakan Publik Universitas Trisakti. Pengalaman mengajar Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro. Menulis artikel di bidang Ekonomi, Regional, dan Pembangunan Berkelanjutan. Penulis aktif sebagai Ketua Unit Afiliasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Penulis juga aktif sebagai Koordinator Program Beasiswa Berprestasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti.

Dr. Dini Hariyanti, ME, merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Penulis menamatkan pendidikan program studi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (S1) di Universitas Trisakti. Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi (S2) di Universitas Indonesia. Strata Tiga (S3) di Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti. Penulis mengajar mata kuliah Mikroekonomika dan

Makroekonomika Pengantar, Makroekonomika I dan II pada S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Trisakti, Mata kuliah Makroekonomika Lanjutan, Ekonomi Regional dan Wilayah dan Metodologi Penelitian di Program Magister Ekonomi Universitas Trisakti serta mata kuliah Ekonomika Lanjutan pada S3 konsentrasi Manajemen Strategic, *Management Sustainability Development* dan Akuntansi di Program studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti.

Dr. Tyahya Whisnu Hendratni, S.E., M.M., merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Penulis memiliki ketertarikan dalam bidang manajemen Keuangan sehingga dari S1 sampai dengan S3 konsentrasi beliau adalah Manajemen Keuangan. Penelitian-penelitian yang ditulis lebih banyak terkait dengan manajemen keuangan dan Perbankan. Dengan latar belakang pendidikan di bidang manajemen keuangan Tyahya Whisnu Hendratni mulai menulis sejak masih mahasiswa S1 memutuskan untuk berfokus pada penulisan yang menginspirasi pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang *finance* (keuangan) dan Perbankan.

Dr.Ir. Hisar Sirait, M,A adalah seorang akademisi dan pakar di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan pengembangan UMKM. Saat ini aktif sebagai Rektor Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, serta aktif dalam penelitian dan pengembangan pengelolaan UMKM. Sebagai seorang peneliti ekonomi dan bisnis, Dr. Ir. Hisar Sirait, M,A telah banyak memberikan kontribusi dalam kajian Ekosistim Digital UMKM, Pertumbuhan Ekonomi, Efisiensi Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan. Selain aktif dalam dunia akademik dan penelitian, Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A, juga dikenal sebagai pakar pengelolaan Perguruan Tinggi, Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMI dan SPME=Akreditasi) dan Audit Mutu Internal (AMI), aktif berperan sebagai narasumber dan Fasilitator dalam berbagai pelatihan dan pendampingan pengelolaan perguruan tinggi, SPMI, dan Akreditasi. Dedikasi dan komitmen untuk pengembangan pengelolaan dan mutu Pendidikan di Indonesia ditunjukkan dengan membuat kanal youtube

Pendidikan dengan alamat: **Hisar Sirait – SPMI** yang menjadi salah satu referensi utama bagi pengelola PT tentang pengelolaan dan penjaminan mutu dan bagi mahasiswa dan praktisi yang ingin mengikuti pembelajaran ekonomi melalui materi Belajar Ekonomi Enak dan Menyenangkan.

Dr. Harmaini, SE, MSi, GRCE. Seorang Penulis dan Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Lahir di Talang, 20 Mei 1961 Sumbar. Penulis merupakan anak pertama dari delapan bersaudara dari pasangan bapak Abu Bakar (Alm) dan Ibu Rosmaniar. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Andalas Padang prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Gajah Mada prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dan menyelesaikan program Doctor (S3) di Universitas Trisakti prodi Ilmu Ekonomi konsentrasi di bidang Islamic Economic Finance (IEF).

KAMI HADIR DENGAN BERBAGAI PAKET
PENERBITAN YANG SESUAI KEBUTUHAN ANDA
STARDIGITAL PUBLISHING

*" Karya buku adalah investasi masa depan,
menulis cara terbaik untuk mengikal ilmu "*

KIRIM NASKAH & TERBITKAN BUKU SEKARANG

Whatsapp
0812-6007-4406

Informasi Lebih Lanjut
www.stardigitalpublishing.com



PT. Star Digital Publishing adalah perusahaan bergerak di bidang Penerbitan Buku Berkedudukan di Bantul-Yogyakarta-Indonesia dengan alamat website www.stardigitalpublishing.com merupakan web/situs resmi kami PT. Star Digital Publishing sebagai media untuk menerbitkan buku-buku karya berkualitas dan terbaik , serta penerbit menjamin aktif dan dapat diakses secara berkesinambungan.

Visi kami adalah menjadi jembatan bagi penulis dan pembaca, memberikan platform yang mendukung kreativitas dan inovasi dalam dunia literasi ilmu pengetahuan. Kami berusaha untuk menerbitkan karya-karya yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat di Indonesia maupun di dunia.

Badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum:

NOMOR : AHU-059267.AH.01.30.Tahun 2024

Kegiatan Usaha : 58110 - Penerbitan Buku

PT. Star Digital Publishing Berkedudukan di BANTUL-Yogyakarta-Indonesia

Anggota IKAPI: No. 202/DIY/2024

Email:

ptstardigitalpublishing@gmail.com

Contact :

Admin 1: 0812-6007-4406

Admin 2: 0813-1881-5928

Hormat Kami,

Redaksi: PT. Star Digital Publishing

(Amanah, Melayani Sepenuh Hati)

PEREKONOMIAN INDONESIA

Pengantar dan Isu Kontemporer berbagai Sektor dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Buku Perekonomian Indonesia: Pengantar dan isu kontemporer berbagai sektor dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia menyajikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Buku ini dimulai dengan pembahasan tentang sejarah perkembangan perekonomian Indonesia, yang mencakup era kolonial hingga masa reformasi ekonomi modern. Selanjutnya, konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, struktur, serta sistem perekonomian Indonesia dijelaskan secara mendalam, termasuk kebijakan-kebijakan ekonomi yang memainkan peran penting dalam pengembangan sektor-sektor utama.

Selain itu, buku ini mengulas isu-isu kontemporer yang terjadi di berbagai sektor strategis perekonomian Indonesia. Isu-isu tersebut meliputi sektor pertanian dan ketahanan pangan, sektor industri dan manufaktur, sektor keuangan dan perbankan, serta pentingnya peran UMKM dalam memajukan perekonomian nasional. Di bagian akhir, buku ini juga mengajak pembaca untuk memahami tantangan global yang mempengaruhi ekonomi Indonesia, seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan ketegangan geopolitik. Buku ini cocok untuk menjadi referensi akademik dan praktis bagi mereka yang ingin memahami perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Penulis :

Dr. Nurhayati, SE., ME
Dr. Jan Horas Veryady Purba
Mona karina, SE., MM
Dr. R. Ajeng Entaresmen, MM
Mentari Wahyuningsih, S.E., M.E
Dr. Muhammad Yudhi Lufti, SE., MM
Dr. Dini Hariyanti, SE., ME
Dr. Tyahya Whisnu Hendratni, S.E., M.M
Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A
Dr. Harmaini, SE., MSi



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA



StarDigital Publishing
www.stardigitalpublishing.com

ISBN 978-623-89945-6-4



9

786238

994564

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025054659, 25 Mei 2025

Pencipta

Nama : **Dr. Nurhayati, SE., ME, Dr. Jan Horas Veryady Purba dkk**

Alamat : Jalan Raya Pondok Gede No.1 Rt/Rw 01/08, Makasar, Kota Adm.
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13560

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Nurhayati, SE., ME, Dr. Jan Horas Veryady Purba dkk**

Alamat : Jalan Raya Pondok Gede No.1 Rt/Rw 01/08, Makasar, Kota Adm.
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13560

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **PEREKONOMIAN INDONESIA: Pengantar dan Isu Kontemporer
berbagai Sektor dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi di
Indonesia**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 25 Mei 2025, di Kota Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000894920

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Nurhayati, SE., ME	Jalan Raya Pondok Gede No.1 Rt/Rw 01/08 Makasar, Kota Adm. Jakarta Timur
2	Dr. Jan Horas Veryady Purba	Bukit Cimanggu City, Cluster Oakwood, KC3A No 10 Tanah Sareal, Kota Bogor
3	Mona karina, SE., MM	Kavling DKI 1. Jl. H. M. Raih 1 No 8 Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur
4	Dr. R. Ajeng Entaresmen, MM	Tomang Tinggi I No.15 Rt 009/006 Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat
5	Mentari Wahyuningsih, S.E., M.E	Jalan Bidar 3C No.12 Kelapa Dua, Kab. Tangerang
6	Dr. Muhammad Yudhi Lufti, SE., MM	Jl. Letjen S. Parman No.1 Kampus A, RT.6/RW.16 Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat
7	Dr. Dini Hariyanti, SE., ME	Cluster Bukit Padma Indah Residence Blok A4 No 28 Bukit Indah Ciputat, Kota Tangerang Selatan
8	Dr. Tyahya Whisnu Hendratni, S.E., M.M	KAV DPR Ciganjur Jl. Benda II No.183 C Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan
9	Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A	Puri Depok Mas Blok PD No 2 Pancoran Mas, Kota Depok
10	Dr. Harmaini, SE., MSi	Jl. Temugiring No. 23 RT 02 RW 08 Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Nurhayati, SE., ME	Jalan Raya Pondok Gede No.1 Rt/Rw 01/08 Makasar, Kota Adm. Jakarta Timur
2	Dr. Jan Horas Veryady Purba	Bukit Cimanggu City, Cluster Oakwood, KC3A No 10 Tanah Sareal, Kota Bogor
3	Mona karina, SE., MM	Kavling DKI 1. Jl. H. M. Raih 1 No 8 Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur
4	Dr. R. Ajeng Entaresmen, MM	Tomang Tinggi I No.15 Rt 009/006 Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat
5	Mentari Wahyuningsih, S.E., M.E	Jalan Bidar 3C No.12 Kelapa Dua, Kab. Tangerang
6	Dr. Muhammad Yudhi Lufti, SE., MM	Jl. Letjen S. Parman No.1 Kampus A, RT.6/RW.16 Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat
7	Dr. Dini Hariyanti, SE., ME	Cluster Bukit Padma Indah Residence Blok A4 No 28 Bukit Indah Ciputat, Kota Tangerang Selatan
8	Dr. Tyahya Whisnu Hendratni, S.E., M.M	KAV DPR Ciganjur Jl. Benda II No.183 C Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan

9	Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A	Puri Depok Mas Blok PD No 2 Pancoran Mas, Kota Depok
10	Dr. Harmaini, SE., MSi	Jl. Temugiring No. 23 RT 02 RW 08 Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur

